

FORUM BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Jurnal Ilmiah STIE Multi Data Palembang

Dewan Redaksi

- Pembina : Johannes Petrus, S.Kom., M.T.I.,CFP® (*Ketua STIE MDP*)
- Penanggungjawab : M.Ricky Pribadi, M.Kom (*Ketua LPPM STIE MDP*)
- Ketua Penyunting : Dr. Anton Arisman, SE., M.Si., Ak., CA
- Penyunting Ahli : 1. Prof. H. Syamsurijal, Ak, Ph.D. (*Universitas Sriwijaya*)
2. Prof. Dr. Kamaludin, S.E., M.M (*Universitas Bengkulu*)
3. Dr. Istijanto, M.M., M.Com. (*Prasetiya Mulya Business School*)
4. Dr. H. Zakaria Wahab, MBA. (*Magister Manajemen UNSRI*)
5. Dr. H. Zamzami, S.E., M.Si. (*Universitas Jambi*)
6. Dr. Lukluk Fuadah, SE., MBA., Ak., CA (*Pasca Sarjana UNSRI*)
7. Dr. Yulizar Kasih, SE., M.Si. (*STIE MDP*)
- Penyunting Pelaksana : 1. Siti Khairani, S.E., Ak, M.Si.,CFP®
2. Retno Budi Lestari, S.E., M.Si
3. Kardinal, SE., M.M., CFP®
- Sekretariat : Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom., M.Si
- Penerbit : STIE Multi Data Palembang
- Alamat : Jl. Rajawali 14 Palembang 30113 Telp. 0711-376400
Fax. 0711-376360 E-mail: redaksi@stie-mdp.ac.id

Forum Bisnis dan Kewirausahaan adalah jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan gagasan dalam bidang manajemen, akuntansi, perpajakan, ekonomi, dan kewirausahaan. Jurnal ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun (September dan Maret) dan bertujuan untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian terbaru dan gagasan dalam bidang manajemen, akuntansi, ekonomi, dan kewirausahaan kepada masyarakat ilmiah.

FORUM BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Jurnal Ilmiah STIE Multi Data Palembang

DAFTAR ISI

Pengaruh Kemampuan Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening

Dimas Pratama
Universitas Tridinanti, Palembang 82 - 103

Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dalam Pembayaran PPH Pasal 21 Di Kota Palembang (Studi Kasus Kantor Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)

Icha Fajriana dan Cherrya Dhia Wenny
STIE MDP, Palembang 104 - 117

Pengaruh Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Leverage Dan Aktivitas Terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2016)

Raisa Pratiwi, Charisma Ayu Pramuditha
STIE MDP, Palembang 118 - 135

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Kain Songket Di Kota Palembang

Usnia Wati Keristin
STIE MDP, Palembang 136 - 153

Evaluasi Sistem Pengendalian Persediaan Material Pada PT Buluh Cawang Plantations Suka Mulya

Oza Putri Laraswati dan Nurussama
PalComTech Palembang 154 - 168

Pengaruh Moralitas Aparatur Pemerintah Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah

Muhsin
Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat 169 - 184

Pedoman Penulisan Artikel 185 - 188

Biodata Penulis 189 - 190

Indeks Penyunting/Mitra Bestari 191

Abstrak Volume 7 Nomor 1 192 - 195

Indeks Jurnal Volume 7 Nomor 1 196

Pengaruh Kemampuan Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening

Dimas Pratama Putra

Universitas Tridinanti

Dimaspratama190491@gmail.com

Abstract: *This study was conducted on the local work unit (read: SKPD) in Palembang. The objective of this study is to determine the effect of apparatus' capability and the use of regional financial accounting information system, and the role of internal control on the financial accountability with the quality of financial reports as a mediator variable. Population in this study is the local work unit in Palembang. The sample is taken using purposive sampling with the specified criteria of 40 respondents. This study conducted through path analysis by using SPSS 20. For testing the mediator variable, the reseacher used causal strategy. The results show that: (1) apparatus' capability does not have any effects on the quality of financial reports, (2) the use of regional financial accounting information system is positive and significant effect on the quality of financial reports, (3) the role of internal control does not have any effects on the quality of financial reports, (4) apparatus' capability is positive and significantly effect the financial accountability, (5) the use of regional financial accounting information system has positive and significant effect on the financial accountability, (6) the role of internal control is positive and significantly effect the financial accountability, (7) the quality of financial reports has positive and significant effect on the financial accountability, (8) the quality of the finacial reports mediate the apparatus' capability towards the financial accountability, (9) the quality of financial reports mediate the use of regional financial accounting information system towards financial accountability, (10) the quality of financial reports mediate the role of internal control towards financial accountability.*

Keywords: *apparatus' capability, the use of regional financial accounting information system, the role of internal control, quality of financial reports, financial accountability.*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal terhadap variabel dependen akuntabilitas keuangan dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel mediator. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sampel yang ditentukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan adalah 40 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis jalur dengan menggunakan SPSS 20. Tes variabel mediator dilakukan dengan strategi kausal. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kemampuan aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (2) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan, (3) Peran pengawas internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (4) Kemampuan aparatur berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, (5) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, (6) Peran pengawas internal berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, (7) Kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, (8) Kualitas laporan keuangan memediator antara kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan, (9) Kualitas laporan keuangan memediator antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan, (10) Kualitas laporan keuangan memediator peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan.

Kata kunci: kemampuan aparatur, pemanfaatan SIKD, peran pengawas internal, kualitas laporan keuangan, akuntabilitas keuangan.

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan atas pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi sangat penting di era desentralisasi saat ini. Di sini peran pemerintah daerah perlu didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* berupa transparansi dan akuntabilitas publik. Misi utama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan dan pelayanan publik. Reformasi yang terjadi di Indonesia tidak hanya mengubah kehidupan politik di Indonesia, tetapi tatanan pemerintah pun menjadi berubah seiring besarnya keinginan masyarakat untuk mengatur pemerintahan daerahnya secara otonom, selain itu keinginan masyarakat juga didorong untuk menciptakan *good governance* yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah menjadi suatu budaya bangsa Indonesia

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah Undang-Undang yang berupaya mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas. Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas berarti memberikan kebebasan yang sangat luas untuk mengatur segala segi pemerintahan daerah, baik pengelolaan keuangan, sumber daya yang ada bahkan pemanfaatan potensi daerah itu sendiri. Namun dibalik kebebasan itu harus ada suatu pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga timbul transparansi dan akuntabilitas. Untuk hal tersebut maka dibutuhkan kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan terutama mengenai keadaan keuangan. Khusus untuk melaksanakan kontrol tersebut, masyarakat membutuhkan informasi akuntansi yang berkualitas. Informasi akuntansi yang berkualitas tersebut tersirat kepada laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah juga harus memenuhi standar yang baku serta harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar yang baku tersebut adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan produk hukum dari Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010. Disamping Peraturan Pemerintah, disusul dengan peraturan yang lebih teknis yaitu dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Suwardjono (2005) menyatakan bahwa tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana keorganisasian tersebut. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan di maksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Roviyantie (2011) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas yang memenuhi karakteristik kualitatif diperlukan aparatur pengelolaan keuangan yang mempunyai kemampuan dalam bidang akuntansi.

Widodo (2001:308), menyatakan bahwa kemampuan didapat dengan berbagai macam cara antara lain sebagai berikut; (1) Melalui Pendidikan, (2) Melalui Pelatihan, (3) Melalui Pengalaman. Dari deskripsi teori kemampuan aparatur yang telah diuraikan di atas, diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa kemampuan aparatur adalah suatu kondisi

dinamis sumber daya manusia yang mencakup aspek Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman.

Selain kemampuan, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat efektif dan efisien. Karakteristik yang menonjol dari kerangka sistem informasi diantaranya dimensi sumber daya manusia, meliputi: data, pelaksanaan atau personalia, perlengkapan, peralatan, dan dana; dimensi tugas, meliputi: pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendalian data, pengadaan informasi; dimensi tujuan, meliputi: dukungan terhadap pengambilan keputusan, dukungan terhadap operasi harian, dukungan terhadap kewajiban kepengurusan; dimensi pemakai informasi, meliputi: manajer, pegawai, pemilik, dan pemakai eksternal lainnya; dimensi tahapan, meliputi: masukan, pemrosesan, keluaran. (Nunuy 2009).

Saat ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, dimana menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, serta mengelolah data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dapat mempercepat proses kerja dalam mengelolah keuangan daerah dan menyediakan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas.

Selain itu peran pengawas internal berperan penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Menurut Yuliani (2010) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang

dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian pengawas internal membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi. Dengan adanya peran internal audit/inspektorat selaku aparat pengawas internal diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengarahkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan.

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor eksternal Pemerintah. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan. Pada tahun 2015 Kota Palembang telah memperoleh penghargaan 'Wajar Tanpa Pengecualian' (WTP) untuk penyajian dan pelaporan keuangan pemerintah. Penghargaan tersebut diperoleh kota Palembang berturut-turut sejak tahun 2010. Walaupun demikian, berdasarkan hasil evaluasi BPKP perwakilan Sumatera Selatan, dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang temuan-temuan yang berkaitan dengan pengaruh kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

- (1) Kesiapan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual belum memadai. Penjelasan: Belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan memadai setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama dalam hal pengelolaan keuangan berdasarkan data yang diperoleh dari badan kepegawaian daerah provinsi Sumsel yang memiliki latar belakang Sarjana Ekonomi sebanyak 504 orang, yang terdiri dari 126 orang

Sarjana Akuntansi dan sebanyak 378 orang Sarjana Ekonomi Non Akuntansi,

- (2) Pengendalian dan pengelolaan teknologi informasi belum memadai dalam aspek strategi dan kebijakan teknologi informasi, aspek keamanan, integritas sistem informasi, sumber daya manusia, dan pengendalian terhadap pemrosesan dan file data,
- (3) Peran pengawas internal masih berada di level satu (initial). Hal ini menunjukkan APIP belum mampu untuk memberikan *Assurance* bahwa program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, APIP belum mampu mencegah korupsi, APIP belum mampu memberikan *assurance* atas efisiensi dan efektifitas program kegiatan pemerintah. Dari permasalahan tersebut walaupun kota Palembang diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dengan kualitas laporan keuangan. Hal tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh dan adanya perubahan peraturan pemerintah yang harus menerapkan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan PP 71 tahun 2010.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory

Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (Jensen, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Dipandang dari sudut pandang teori keagenan diatas.

Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan

wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikansumberdaya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (terjadi asimetri informasi) maka prinsipal membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh agen adalah benar. Dalam posisi sebagai pihak ketiga inilah sebenarnya peran akuntan sektor publik diharapkan berperan besar. Mengingat bahwa sebagian (atau bahkan sebagian besar) laporan yang diberikan pemerintah adalah berbentuk informasi keuangan.

2.2 Decision Usefulness Theory

Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi merupakan bagian dari teori normatif. Teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) dari informasi akuntansi dikemukakan dalam disertasi Staubus untuk pertama kalinya pada Tahun 1954. Premis dari teori kegunaan-keputusan merupakan tujuan akuntansi untuk menyediakan informasi keuangan mengenai organisasi guna pengambilan keputusan. Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingan terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk laporan keuangan. Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan.

Pengelompokkan *users* dalam konsep *decision-usefulness* terbagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok masyarakat, kelompok legislatif, dan kelompok dewan pengawas. Kelompok masyarakat menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk mengevaluasi koefisienan dan keefektifan kegiatan yang dilakukan pemerintah, membandingkan hasil program yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya, menaksir operasional keuangan dan kondisi keuangan, dan untuk menentukan terlaksananya anggaran yang dibuat. Kelompok

dewan pengawas menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk mengevaluasi pendanaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh eksekutif, membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasi anggaran yang terjadi, pengawasan aktivitas dana dan posisi keuangan untuk menganalisis keseimbangan dana.

2.3 *Accountability Theory*

Boven (2008) membahas dua konsep utama akuntabilitas sebagai kebajikan dan akuntabilitas sebagai mekanisme. Akuntabilitas sebagai kebajikan digunakan terutama sebagai konsep normatif, sebagai satu set standar untuk evaluasi perilaku sektor publik. Akuntabilitas dipandang sebagai kualitas positif dari organisasi atau pejabat, oleh karena itu, studi akuntabilitas sering berfokus pada isu-isu normatif, pada penilaian perilaku agen publik. Akuntabilitas sebagai mekanisme, digunakan dalam arti lebih sempit, deskriptif. Hal ini dilihat sebagai hubungan kelembagaan atau pengaturan dimana seseorang aktor dapat dimintai pertanggungjawaban oleh forum. Akuntabilitas sebagai mekanisme yang memperlihatkan pengaturan bagaimana kelembagaan beroperasi. Kedua konsep ini sangat berguna untuk studi dan perdebatan tentang pemerintahan yang demokratis.

Di sisi lain Boven (2008) telah menetapkan akuntabilitas dalam pengertian lebih sempit sebagai hubungan antara aktor dan forum, dimana aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan pertanyaan dan aktor mungkin lulus dalam penilaian. Aktor mungkin individu, misalnya seorang pejabat atau pegawai sipil, mungkin juga organisasi seperti lembaga publik dan agen. Hubungan antara forum dan aktor dapat bersifat hubungan *principal-agent* forum menjadi pimpinan tertinggi, misalnya parlemen, yang telah mendelegasikan kewenangan untuk menteri, agen, yang dimintai pertanggungjawaban atas kinerja di kantor.

4.4 **Kemampuan Aparatur**

Aparatur akan berkualitas ketika mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan

kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemampuan tersebut hanya dapat dicapai manakala mereka mempunyai bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Widodo (2001:308), kemampuan didapat dengan berbagai macam cara antara lain sebagai berikut: (1) Melalui Pendidikan, (2) Melalui Pelatihan, (3) Melalui Pengalaman.

Dari deskripsi teori kemampuan aparatur yang telah diuraikan di atas, diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa kemampuan aparatur adalah suatu kondisi dinamis sumber daya manusia yang mencakup aspek Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman.

2.5 **Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi dan sistem informasi akuntansi bertitik tolak dari suatu landasan yang terdiri dari berbagai konsep, yaitu konsep mengenai akuntansi itu sendiri, konsep sistem, konsep informasi, konsep organisasi, dan konsep pengambilan keputusan. (Nunuy, 2009).

Pada sistem akuntansi pemerintahan, ada beberapa ciri terpenting atau persyaratan yang diperlukan, diantaranya sistem akuntansi pemerintahan harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Sistem akuntansi pemerintahan harus dapat menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Sistem akuntansi pemerintahan harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.

2.6 **Peran Pengawas Internal**

Menurut Yuliani (2010) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit

membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 Menteri/ Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

2.7 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-

benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan Masyarakat.

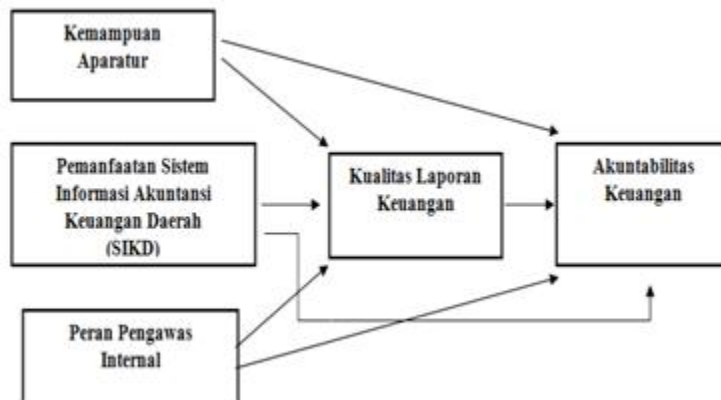
2.8 Kualitas Laporan Keuangan

Berbicara mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah berarti berbicara mengenai karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut. Dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dihendaki: (1) relevan, (2) handal, (3) dapat dipahami, (3) dapat diperbandingkan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun seperti dalam bagan berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas

internal terhadap akuntabilitas keuangan terhadap kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening.

2.10 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_1 : Ada pengaruh kemampuan aparatur terhadap kualitas laporan keuangan.
- H_2 : Ada pengaruh antara pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
- H_3 : Ada pengaruh antara peran pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan
- H_4 : Ada pengaruh antara kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan
- H_5 : Ada pengaruh antara sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan
- H_6 : Ada pengaruh antara peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan.
- H_7 : Ada pengaruh antara kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan.
- H_8 : Ada pengaruh antara kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan melalui kualitas laporan keuangan.
- H_9 : Ada pengaruh antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan melalui kualitas laporan keuangan.
- H_{10} : Ada pengaruh antara kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan melalui kualitas laporan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini adalah Kemampuan Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening.

3.2 Jenis dan Sumber Data

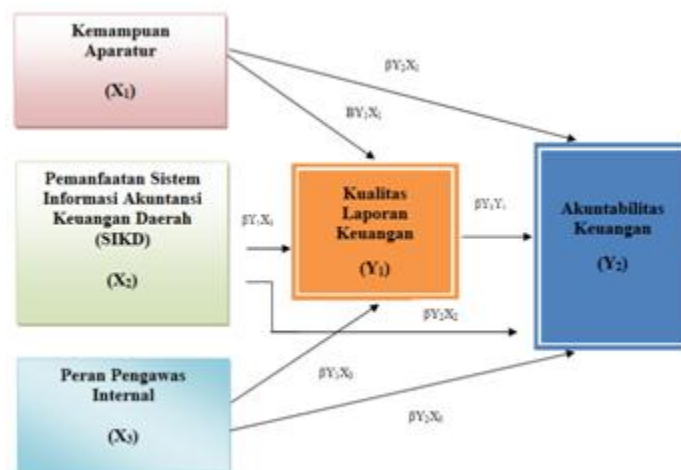
Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis berupa data Kuantitatif. Skor jawaban Aparatur SKPD sebagai responden yang diperoleh melalui quesioner.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan adalah data primer yang langsung diperoleh dari lapangan melalui percobaan, survei, dan observasi. Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kuesioner ke Aparatur SKPD Kota Palembang terdiri dari Kepala Subbagian Keuangan dan Bagian Bendahara.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Adapun struktur (jalur) hubungan antar variabel dalam penelitian ini digambarkan:



Gambar 2. Struktur Hubungan Variabel Penelitian

Diagram jalur di atas dapat dituliskan menjadi persamaan struktural yang menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti, yaitu:

$X_2 = \text{SIKD}$.
 $X_3 = \text{Pengawas Internal}$.
 $Y_1 = \text{Kualitas Laporan Keuangan}$.
 $Y_2 = \text{Akuntabilitas Keuangan}$.
 $e = \text{Koefisien korelasi di luar model}$.

Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung:

$$Y_1 = PX_1Y_1 + PX_2Y_1 + PX_3Y_1 + e_1$$

$$Y_2 = PX_1Y_2 + PX_2Y_2 + PX_3Y_2 + PY_1Y_2 + e_2$$

Dimana :
 $X_1 = \text{Kemampuan Aparatur}$.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi variabel operasional pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator	Skala	Nomor Pertanyaan		
1	Kemampuan Aparatur	Pendidikan	• Pengetahuan	Interval	1		
			• Pemahaman		2		
		Pelatihan Pengalaman	• Khursus/Seminar	Interval	3		
			• Lamanya bekerja	Interval	4		
			• Macam tugas yang pernah dikerjakan		5		
2	Pemanfaatan SIKD	Sumberdaya personalia/ pelaksanaan peralatan dan aturan hukum	• Ketersediaan sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.	Interval	6		
			• Kelayakan peralatan yang digunakan untuk proses akuntansi		7		
			• Adanya peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang mengatur sistem informasi akuntansi keuangan daerah		8		
			Tugas		• Terlaksananya pemrosesan data yang akurat.	Interval	9
					• Terkendalinya data		10
		• Terlaksananya penyediaan dan distribusi informasi tepat waktu		11			

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel Penelitian Lanjutan

		Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhnya kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan dan pengendalian operasi 	Interval	12
3	Pengawas Internal	Melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas & fungsi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah • Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi dan berjalan sesuai dengan rencana • menentukan baik tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah • menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah. 	Interval	13
					14
					15
		Melakukan pembinaan & penyelenggaraan SPIP	<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP • sosialisasi SPIP • peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. 	Interval	16
					17
					18
					19
4	Akuntabilitas Keuangan	Integritas keuangan Pengungkapan	<ul style="list-style-type: none"> • Kejujuran penyajian • agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau 	Interval	20
				Interval	21

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel Penelitian Lanjutan

			kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.		
		Ketaatan terhadap peraturan undang-undang.	•peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan.	Interval	22

Sumber: Data Diolah Penulis

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Dalam desain penelitian telah dijelaskan

bahwa responden penelitian ini adalah aparatur SKPD kota Palembang. Oleh karena pejabat SKPD yang mengisi kuesioner hanya terdiri dari dua yakni Bendahara dan Kasubag Keuangan. Tabel 2 berikut ini adalah sebaran sampel berdasarkan jabatan:

Tabel 2: Sebaran Sampel Aparatur SKPD Kota Palembang

No	Instansi/SKPD	Bendahara	Kasubag. Keuangan	Jumlah
1	Dinas Perindag & Koperasi	1	1	2
2	Dinas Inspektorat	1	1	2
3	Dinas Bappeda	1	1	2
4	Dinas Kesehatan	1	1	2
5	Dispenda	1	1	2
6	BKB-PP	1	1	2
7	Dinas Dikpora	1	1	2
8	Dinas Tenaga Kerja	1	1	2
9	Dinas Cakil	1	1	2
10	Dinas BLH	1	1	2
11	Dinas Kesbangpol	1	1	2
12	Dinas Penanaman Modal	1	1	2
13	Dinas Perhubungan	1	1	2
14	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	1	1	2
15	Dinas Satpol PP	1	1	2
16	Dinas Pariwisata	1	1	2
17	Sekda Bagian Umum	1	0	1
18	Sekda Bagian Pemerintahan	1	0	1

Tabel 2: Sebaran Sampel Aparatur SKPD Kota Palembang Lanjutan

19	Sekda Bagian Keuangan	1	0	1
20	Sekda Bagian Perekonomian	1	0	1
21	Sekda Bagian Humas	1	0	1
22	Sekda Bagian Hukum	1	0	1
23	Sekda Bagian Sosial	1	0	1
24	Sekda Bagian Pembangunan	1	0	1
Jumlah		24	16	40

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 2 di atas sampel aparatur SKPD kota Palembang dengan jabatan sebagai bendahara sebanyak 24 orang (60%) sedangkan 16 orang (40%) sebagai Kasubag Keuangan. Kemudian lama bekerja 6 tahun sebanyak 23 orang (57,5%), lama bekerja 7 tahun sebanyak 16 orang (40%) dan 1 orang (2.5%) dengan lama bekerja 8 tahun.

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Dua prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini mengukur kekonsistenan dan keakurasian data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen, yaitu (1) uji konsistensi internal dengan uji statistik Cronbach's Alpha, (2) uji korelasional antara skor masing-masing butir dengan skor total (Imam Ghazali, 2001). Hasil pengujian reliabilitas tersaji pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3: Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel	Cronbach Alpha
Kemampuan Aparatur (X1)	0,946
Pemanfaatan SIKD (X2)	0,983
Peran Pengawas Internal (X3)	0,986
Kualitas Laporan Keuangan (Y1)	0,982
Akuntabilitas Keuangan (Y2)	0,968

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

4.3 Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalisasi

- (1) uji normalisasi terhadap variabel akuntabilitas keuangan (Y2) menunjukkan nilai signifikan atau probabilitas $0,650 > 0,05$ artinya data residual berdistribusi normal,
- (2) uji normalisasi terhadap variabel kualitas

laporan keuangan (Y1) menunjukkan nilai signifikan atau probabilitas $0,553 > 0,05$ artinya data residual berdistribusi normal,

- (3) uji normalisasi terhadap variabel kemampuan aparatur (X1) menunjukkan nilai signifikan atau probabilitas $0,954 > 0,05$ artinya data residual berdistribusi normal,
- (4) uji normalisasi terhadap variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2) menunjukkan nilai signifikan atau probabilitas $0,849 > 0,05$ artinya data residual berdistribusi normal, dan
- (5) uji normalisasi terhadap variabel peran pengawas internal (X3) menunjukkan nilai signifikan atau probabilitas $0,340 > 0,05$ data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

- (1) menyajikan data hasil uji multikolinearitas terhadap variabel kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa kemampuan aparatur nilai *tolerance* $0,660 >$ nilai *tolerance* hitung $0,10$ dan nilai VIF $1,516 <$ nilai VIF hitung $10,00$, maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah nilai *tolerance* $0,445 >$ nilai *tolerance* hitung $0,10$ dan nilai VIF $2,197 <$ nilai VIF hitung $10,00$, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen, peran pengawas internal nilai *tolerance* $0,593 >$ nilai *tolerance* hitung $0,10$ dan nilai VIF $1,685 <$ nilai VIF hitung $10,00$, maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen, dan

- (2) menyajikan multikolinearitas terhadap variabel akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa kemampuan aparatur nilai *tolerance* > 0,660 nilai *tolerance* hitung 0,10 dan nilai VIF 1,516 < nilai VIF hitung 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah nilai *tolerance* 0,455 > nilai *tolerance* hitung 0,10 dan nilai VIF 2,197 < nilai VIF hitung 10,00 maka tidak terjadi multikoliniearitas antar variabel independen, peran pengawas internal nilai *tolerance* 0,593 > nilai *tolerance* hitung 0,10 dan nilai VIF 1,685 < nilai VIF hitung 10,00 maka tidak terjadi multikoliniearitas antar variabel independen.

4.4 Pengujian Hipotesis

1. Analisis Substruktur 1

$$Y_1 = a + PX_1 + PX_2 + PX_3 + e_1$$

4.5 Pengujian Simultan (Uji F)

Besarnya angka R square (R^2) pada kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan adalah 0,860 atau 86% untuk mengetahui kelayakan model regresi digambarkan angka-angka dari tabel ANOVA. Jika F-hitung > F-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya F-hitung < F-tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari hasil perhitungan, diperoleh angka F-hitung sebesar 80,741 > F-tabel sebesar 2,64 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian model regresi tersebut sudah layak dan benar.

Kesimpulannya adalah kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal secara simultan mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 86% dan tingkat signifikan $0,000a < \alpha = 0,05$. Besar pengaruh variabel lain di luar model regresi tersebut dihitung dengan rumus: $(1-r^2)$ atau $(1-0,860)$ yaitu 0,14% atau 14%.

4.6 Pengujian Parsial (Uji t)

Tabel 4: Pengaruh Kemampuan Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Pengawas Internal Secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Model	t	Sig	Keterangan
kem aprt x_1	1,548	0,130	H1 Ditolak
pemftn_SIKD x_2	5,838	0,000	H2 Diterima
Prn_pngws_intrnl x_3	0,334	0,740	H3 Ditolak

Sumber: Diolah Melalui SPSS

- a. Pengaruh Kemampuan Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Jika t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya t-hitung < t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 1,548. Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-2)$ atau $(40-2) = 38$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t-tabel sebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungan tabel signifikan diperoleh angka sebesar 0,130 > $\alpha = 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat pengaruh variabel kemampuan aparatur terhadap kualitas laporan keuangan. Tidak adanya pengaruh kemampuan aparatur terhadap kualitas laporan keuangan dilihat dari besarnya nilai signifikan penelitian terhadap tingkat signifikan $0,130 > \alpha = 0,05$.
- b. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Jika t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya t-hitung < t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 5,838. Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-2)$ atau $(40-2) = 38$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t-tabel sebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungan tabel signifikan diperoleh angka sebesar 0,000 < $\alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah

terhadap kualitas laporan keuangan. Adanya pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dilihat dari kecilnya nilai signifikan penelitian terhadap tingkat signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$.

c. Pengaruh Peran Pengawas Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Jika t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya t-hitung < t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 0,334. Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-2)$ atau $(40-2) = 38$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t-tabel sebesar 0,740. Berdasarkan hasil perhitungan tabel signifikan diperoleh angka sebesar $0,740 > \alpha = 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat pengaruh variabel peran pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan. Tidak adanya pengaruh peran pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan dilihat dari besarnya nilai signifikan penelitian terhadap tingkat signifikan $0,740 > \alpha = 0,05$.

2. Analisis Substruktur 2

$$Y_2 = a + PX_1 + PX_2 + PX_3 + PY_1Y_2 + e_2$$

4.6 Pengujian Simultan (Uji F)

Besarnya angka R-square (r^2) adalah 0,953 dimana angka tersebut mempunyai arti bahwa pengaruh kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan secara simultan adalah 95,3%. Untuk mengetahui kelayakan model regresi digambarkan angka-angka dari tabel ANOVA. Jika F-hitung > F-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya F-hitung < F-tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari hasil perhitungan, diperoleh angka F-hitung sebesar $265,066 > F$ -tabel sebesar 2,64 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian model regresi tersebut sudah layak dan benar. Kesimpulannya

adalah kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal secara simultan mempengaruhi akuntabilitas keuangan sebesar 95,3% dan tingkat signifikan $0,000a < \alpha = 0,05$. Besar pengaruh variabel lain di luar model regresi tersebut dihitung dengan rumus: $(1-r^2)$ atau $(1-0,953)$ yaitu 0,047 atau 4,7%. Pengujian kualitas laporan keuangan sebagai mediasi terhadap akuntabilitas keuangan. Besarnya angka R-square (r^2) adalah 0,878 dimana angka tersebut mempunyai arti bahwa kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan adalah 87,8%. Untuk mengetahui kelayakan model regresi digambarkan angka-angka dari tabel ANOVA. Jika F-hitung > F-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya F-hitung < F-tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari hasil perhitungan, diperoleh angka F-hitung sebesar $281,469 > F$ -tabel sebesar 2,64 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian model regresi tersebut sudah layak dan benar. Kesimpulannya adalah kualitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas keuangan sebesar 87,8% dan tingkat signifikan $0,000a < \alpha = 0,05$. Besar pengaruh variabel lain di luar model regresi tersebut dihitung dengan rumus: $(1-r^2)$ atau $(1-0,878)$ yaitu 0,112 atau 12,2%.

4.7 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5: Pengaruh Kemampuan Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Pengawas Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Model	t	Sig	Keterangan
kem_aprt_x ₁	2,165	0,037	H4 Diterima
pemftn_SIKD_x ₂	7,152	0,000	H5 Diterima
Prn_pngws_intrnl_x ₃	4,002	0,000	H6 Diterima
Kua_lk_y ₁	16,777	0,000	H7 Diterima

Sumber: Diolah Melalui SPSS

a. Pengaruh Kemampuan Aparatur terhadap Akuntabilitas Keuangan

Jika t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya t-hitung < t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 2,165.

Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-2)$ atau $(40-2) = 38$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t-tabel sebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungan tabel signifikan diperoleh angka sebesar $0,037 < \alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh variabel kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan. Adanya pengaruh kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan dilihat dari besarnya nilai signifikan penelitian terhadap tingkat signifikan $0,037 < \alpha = 0,05$.

b. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan

Jika t-hitung $>$ t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya t-hitung $<$ t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 7,152. Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-2)$ atau $(40-2) = 38$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t-tabel sebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungan tabel signifikan diperoleh angka sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh variabel sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan. Berpengaruhnya sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan dilihat dari besarnya nilai signifikan penelitian terhadap tingkat signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$.

c. Pengaruh Peran Pengawas Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan

Jika t-hitung $>$ t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya t-hitung $<$ t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 4,002. Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-2)$ atau $(40-2) = 38$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t-tabel sebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungan tabel signifikan diperoleh angka sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh variabel peran

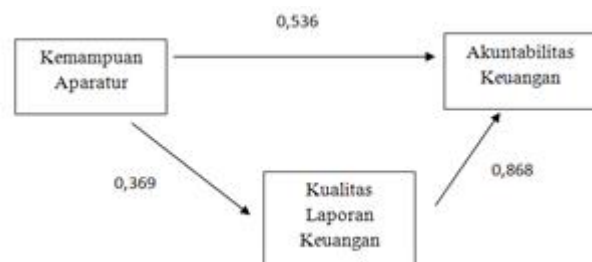
pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan. Adanya pengaruh peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan dilihat dari kecilnya nilai signifikan penelitian terhadap tingkat signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$.

d. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan

Jika t-hitung $>$ t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya t-hitung $<$ t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 16,777. Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-2)$ atau $(40-2) = 38$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t-tabel sebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungan tabel signifikan diperoleh angka sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh variabel kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan. Adanya pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan dilihat dari kecilnya nilai signifikan penelitian terhadap tingkat signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$.

4.8 Pengujian Variabel Intervening

Strategi *Causal Step*



Gambar 3. Hubungan Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening Menggunakan Strategi Causal

Tiga persamaan regresi yang harus diestimasi dalam strategi causal step dalam pengujian variabel intervening adalah sebagai berikut:

- Persamaan regresi variabel intervening Kualitas Laporan Keuangan (Y_1) pada variabel independen Kemampuan Aparatur (X_1)

Tabel 6: Strategi Causal Step Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
1 (Constant)	-10,445	0,249
Kem_aprt_x ₁	0,369	0,130

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil analisis ditemukan bukti bahwa kemampuan aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $0,130 > \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,369.

- b. Persamaan regresi variabel independen Akuntabilitas Keuangan (Y_2) terhadap variabel independen Kemampuan Aparatur (X_1)

Tabel 7: Strategi Causal Step Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
1 (Constant)	-31,684	0,000
kem_aprt_x ₁	0,322	0,037

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil analisis ditemukan bahwa kemampuan aparatur signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan $0,037 < \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,322.

- c. Persamaan regresi berganda variabel dependen Akuntabilitas Keuangan (Y_2) pada variabel independen Kemampuan Aparatur (X_1) dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai intervening (Y_1)

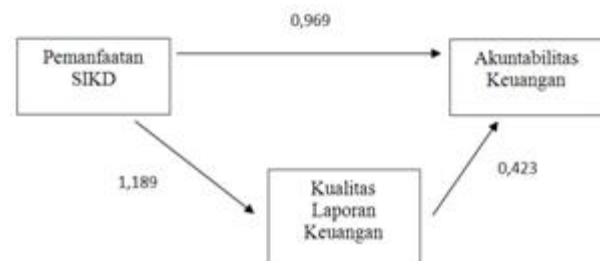
Hasil analisis ditemukan bahwa kemampuan aparatur signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, setelah dimediasi oleh kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $0,012 < \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,536. Selanjutnya ditemukan bahwa kualitas laporan keuangan signifikan terhadap

akuntabilitas keuangan, setelah memediasi oleh kemampuan aparatur dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,868. Selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa model ini termasuk ke dalam *part mediation* dimana variabel kemampuan aparatur dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan secara langsung dan bisa melalui kualitas laporan keuangan sebagai mediasi.

Tabel 8: Strategi Causal Step Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Intervening

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
kem_aprt_x ₁	0,536	0,012
kua_lk_y ₁	0,868	0,000

Sumber: Diolah dari SPSS



Gambar 4. Hubungan Pengaruh Pemanfaatan SIKD Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening Menggunakan Strategi Causal

- a. Persamaan regresi variabel intervening Kualitas Laporan Keuangan (Y_1) pada variabel independen Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)

Hasil analisis ditemukan bukti bahwa pemanfaatan SIKD berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 1,189.

Tabel 9: Strategi Causal Step Pengaruh Pemanfaatan SIKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
1 (Constant)	-10,445	0,249
Pemftn_SIKD_x ₂	1,189	0,000

Sumber: Diolah dari SPSS

- b. Persamaan regresi variabel independen Akuntabilitas Keuangan (Y_2) terhadap variabel dependen Pemanfaatan SIKD (X_2)

Tabel 10: Strategi Causal Step Pengaruh Pemanfaatan SIKD Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
1 (Constant)	-31,684	0,000
Pemftn_SIKD_x ₂	0,911	0,000

Sumber: Diolah dari SPSS

- c. Persamaan regresi berganda variabel dependen Akuntabilitas Keuangan (Y_2) pada variabel independen Pemanfaatan SIKD (X_2) dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai intervening (Y_1)

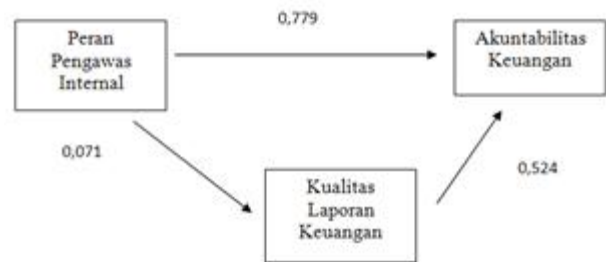
Tabel 11: Strategi Causal Step Pengaruh Pemanfaatan SIKD Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Intervening

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
Pemftn_SIKD_x ₂	0,969	0,000
kua_lk_y ₁	0,423	0,001

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil analisis ditemukan bahwa pemanfaatan SIKD signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, setelah dimediasi oleh kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$

dan koefisien regresi = 0,969. Selanjutnya ditemukan bahwa kualitas laporan keuangan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, setelah dimediasi oleh pemanfaatan SIKD dengan nilai signifikan $0,001 < \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,423. Selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa model ini termasuk ke dalam *part mediation* dimana variabel pemanfaatan SIKD dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan secara langsung dan bisa melalui kualitas laporan keuangan sebagai mediasi.



Gambar 5. Hubungan Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening Menggunakan Strategi Causal

- a. Persamaan regresi variabel intervening Kualitas Laporan Keuangan (Y_1) pada variabel independen Peran Pengawas Internal (X_3)

Tabel 12. Strategi Causal Step Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
1 (Constant)	-31,684	0,000
Pemftn_SIKD_x ₂	0,911	0,000

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil analisis ditemukan bukti bahwa peran pengawas internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $0,740 > \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,071.

- b. Persamaan regresi variabel independen Akuntabilitas Keuangan (Y_2) terhadap variabel dependen Peran Pengawas Internal (X_3)

Tabel 13: Strategi Causal Step Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
1 (Constant)	-31,684	0,000
Prn pgwsintrl x ₃	0,531	0,000

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil analisis ditemukan bahwa peran pengawas internal signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan 0,000 < $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,531.

- Persamaan regresi berganda variabel dependen Akuntabilitas Keuangan (Y_2) pada variabel independen Peran Pengawas Internal (X_3) dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai intervening (Y_1)

Tabel 14: Strategi Causal Step Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Intervening

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
Prn pgwsintrl x ₃	0,779	0,000
kua_lk_y ₁	0,524	0,000

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil analisis ditemukan bahwa Peran Pengawas Internal signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, setelah dimediasi oleh kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan 0,000 < $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,779. Selanjutnya ditemukan bahwa kualitas laporan keuangan signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, setelah dimediasi oleh Pemanfaatan SIKD dengan nilai signifikan 0,000 < $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,524. Selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa model ini termasuk ke dalam *part mediation* dimana variabel Peran Pengawas Internal dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan secara

langsung dan bisa melalui kualitas laporan keuangan sebagai mediasi.

4.9 Perhitungan Pengaruh

Tabel 15: Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Variabel	Hasil
Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan $X_1 \rightarrow Y_1$	0,369
Pengaruh Pemanfaatan SIKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan $X_2 \rightarrow Y_1$	1,189
Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan $X_3 \rightarrow Y_1$	0,071
Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Akuntabilitas Keuangan $X_1 \rightarrow Y_2$	2,165
Pengaruh Pemanfaatan SIKD Terhadap Akuntabilitas Keuangan $X_2 \rightarrow Y_2$	7,152
Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan $X_3 \rightarrow Y_2$	4,002
Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan $Y_1 \rightarrow Y_2$	16,777

Tabel 16: Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Variabel	Perhitungan	Hasil
Pengaruh Kemampuan Aparatur terhadap Akuntabilitas Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan $X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	0,369 x 0,868	0,320
Pengaruh Pemanfaatan SIKD terhadap Akuntabilitas Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan $X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	1,189 x 0,423	0,502
Pengaruh Peran Pengawas Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan $X_3 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	0,071 x 0,524	0,037

Tabel 17: Pengaruh Total (*Total Effect*)

Variabel	Perhitungan	Hasil
Pengaruh Kemampuan Aparatur terhadap Akuntabilitas Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan $X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	0,320 + 0,536	0,856
Pengaruh Pemanfaatan SIKD terhadap Akuntabilitas Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan $X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	0,502 + 0,969	1,471
Pengaruh Pemanfaatan SIKD terhadap Akuntabilitas Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan $X_3 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	0,037 + 0,779	0,816

4.10 Pembahasan

Berikut disajikan pembahasan pengaruh kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening.

a. Analisis Pengaruh Kemampuan Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara parsial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa variabel kemampuan aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan dibuktikan dengan nilai signifikan $> 0,05$ Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yaitu kemampuan aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini dilandasi oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK, 2014-2015) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumsel menyatakan bahwa kesiapan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual belum memadai yang dimana belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) terutama dalam hal pengelolaan keuangan berdasarkan data yang diperoleh dari badan kepegawaian daerah provinsi Sumsel yang memiliki latar belakang sarjana ekonomi sebanyak 504 orang, yang terdiri dari 126 orang sarjana akuntansi dan sebanyak 378 orang sarjana ekonomi non akuntansi. Oleh karena itu merupakan faktor tidak berpengaruhnya kemampuan aparatur terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Analisis Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara parsial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $< 0,05$. Hal ini sejalan dengan hipotesis yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini sesuai dengan hipotesis serta teori kegunaan-keputusan (*Decision Usefulness Theory*) yang mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Hasil penelitian ini juga didukung temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliani Safrida (2010), SIKD berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

c. Analisis Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara parsial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa peran pengawas internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $> 0,05$. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis.

Hasil penelitian ini dilandasi oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP

BPK, 2014-2015) menyatakan bahwa Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum mampu untuk memberikan *assurance* bahwa program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan peraturan undang-undang,

Aparatur pengawas internal pemerintah belum mampu mencegah korupsi, aparatur pengawas internal pemerintah belum mampu memberikan *assurance* atas efisiensi dan efektifitas program kegiatan pemerintah di dalam pelaksanaan sistem laporan keuangan pemerintah, dan jumlah instansi pemerintah yang dinilai akuntabel baru mencapai 24%. Oleh karena itu merupakan faktor tidak berpengaruhnya peran pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan.

d. Analisis Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara persial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa kemampuan aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan $< 0,05$. Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa kemampuan aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan sangat berkaitan dengan teori akuntabilitas menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai mekanisme yang harus diterapkan oleh aparatur pemerintahan sehingga dibutuhkan keahlian untuk menerapkan mekanisme tersebut di dalam peningkatan akuntabilitas keuangan.

e. Analisis Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara persial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan $< 0,05$. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan berkaitan dengan teori keagenan bahwa prinsipal memberikan kepercayaan kepada agen untuk

mengelola sumberdaya dalam bentuk pajak dan lain-lain. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif, dan efisien.

f. Analisis Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara persial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa peran pengawas internal berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan $< 0,05$. Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa peran pengawas internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis dan berkaitan dengan teori akuntabilitas yang menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai mekanisme yang harus diterapkan oleh aparatur pemerintahan untuk pertanggung jawaban keuangan.

Dalam menunjang mekanisme tersebut selain kemampuan aparatur itu sendiri juga dibutuhkan peran pengawas internal karena peran pengawas internal tugasnya memonitoring seluruh aktifitas aparatur pemerintah yang akan memberikan masukan dan saran di dalam pemenuhan sistem akuntabilitas keuangan yang sesuai dengan mekanisme regulasi yang di tetapkan.

g. Analisis Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara persial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan $< 0,05$. Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian sesuai dengan hipotesis dan dengan pola pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Negara dikembangkan sejalan dengan teori keagenan.

h. Analisis Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil analisis jalur secara parsial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan memediasi kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan dengan signifikan positif, oleh karena itu dikatakan sebagai *part mediation*, karena kemampuan aparatur dapat mempengaruhi secara langsung akuntabilitas keuangan tanpa harus menggunakan mediasi dengan nilai signifikannya 0,000.

Setelah dimediasi kualitas laporan keuangan secara tidak langsung dapat memediasi kemampuan aparatur dengan nilai signifikannya 0,012. Hasil penelitian mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan memediasi kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini mempunyai arah yang sama dari hipotesis yaitu berpengaruh signifikan.

Berdasarkan analisis variabel kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan pada satuan kerja perangkat daerah kota Palembang menunjukkan terdapat pengaruh. Artinya kemampuan aparatur sangat di butuhkan di dalam peningkatan akuntabilitas keuangan karena berkaitan dengan teori akuntabilitas menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai mekanisme yang harus di terapkan oleh aparatur pemerintah, untuk menerapkan mekanisme tersebut di butuhkan kemampuan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya setelah di mediasi oleh kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai signifikannya menurun menjadi 0,012 dari 0,000 artinya variabel kemampuan aparatur sangat di butuhkan dalam menciptakan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas keuangan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

i. Analisis Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil analisis jalur secara parsial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan memediasi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan dengan signifikan positif, oleh karena itu dikatakan sebagai *part mediation*, karena pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat mempengaruhi secara langsung akuntabilitas keuangan tanpa harus menggunakan mediasi dengan nilai signifikannya 0,000.

Setelah dimediasi kualitas laporan keuangan secara tidak langsung dapat memediasi kemampuan aparatur dengan nilai signifikannya 0,001. Hasil penelitian mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan memediasi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan berkaitan dengan teori keagenan.

j. Analisis Pengaruh Peran Pengawas Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil analisis jalur secara parsial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan memediasi peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan dengan signifikan positif, oleh karena itu dikatakan sebagai *part mediation*, karena peran pengawas internal dapat mempengaruhi secara langsung akuntabilitas keuangan tanpa harus menggunakan mediasi dengan nilai signifikannya 0,000.

Setelah dimediasi kualitas laporan keuangan secara tidak langsung dapat memediasi peran pengawas internal dengan nilai signifikannya 0,000. Hasil penelitian mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan

memediasi peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini mempunyai arah yang sama dari hipotesis yaitu berpengaruh signifikan. Dengan demikian, hasil penelitian sesuai dengan hipotesis dan berkaitan dengan teori keagenan.

Maka dapat disimpulkan bahwa, variabel peran pengawas internal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dan menambahkan kualitas laporan keuangan sebagai mediasi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pada variabel bebas antara kemampuan aparatur, pemanfaatan SIKD, dan peran pengawas internal terbukti bahwa secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat kualitas laporan keuangan secara signifikan positif. Secara parsial antara kemampuan aparatur terhadap kualitas laporan keuangan dan peran pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan hasilnya tidak ada pengaruh. Selanjutnya pada variabel bebas antara kemampuan aparatur, pemanfaatan SIKD, dan peran pengawas internal terbukti bahwa secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat akuntabilitas keuangan secara signifikan positif. Secara parsial seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi praktisi, Berdasarkan observasi di lapangan di dapat bahwa tingkat akademisi yang ada masih dirasa kurang dari 40 sampel yang ada masih banyak yang memiliki jenjang S1 dan tugas yang

diberikan tidak sesuai dengan bidang akademis masing-masing aparatur pemerintahan. Kedepan diharapkan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan agar diberikan pelatihan yang memadai supaya proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai yang diharapkan dan mampu melaksanakan pertanggungjawaban dengan baik.

Dalam hal aksesibilitas laporan keuangan sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sistem informasi akuntansi keuangan daerah untuk lebih mempertanggungjawabkan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah sebagai informasi penting yang berhak diperoleh publik. Serta pengawas internal lebih memberikan *assurance* terhadap aparatur pemerintah di dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

2. Bagi akademisi, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan serta variabel mediasi yang berbeda. Penambahan objek SKPD juga dirasa perlu, tidak hanya dari satu wilayah SKPD saja, namun lebih baik jenis maupun wilayahnya sehingga jumlah responden penelitian dapat lebih banyak dan dapat dibandingkan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bovens, Mark. 2008, *Two Concepts of Accountability. European Law Journal, Vol 13*. No 4, PP. 447-468, Akses 8 Januari 2015, pada <http://www.researchgate.net>.
- [2] Ghazali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- [3] Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976, *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, Vol. 3, No.*

- 4, *PP*. 305-360, Akses 2 Oktober 2015, pada <http://scholar.google.co.id>.
- [4] Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2015, Melalui www.BPK.go.id.
- [5] Mardiasmo. 2006, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol 2. No 1. PP 1-17, Akses 28 Oktober 2015, pada <https://id.scribd.com>.
- [6] Nunuy. 2009, *Pengaruh Kompetensi Anggota DPR dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi*, Jurnal Risert dan Akuntansi, Vol 12, No 1, PP 44-56, Akses 10 Oktober 2016, pada <http://scholar.google.co.id>.
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Tentang Pertanggungjawaban Pimpinan Lembaga Atas Efektifitas Penyelenggaraan Sistem SPIP.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Tentang Pedoman Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [10] Roviyantie, Devi. 2011, *Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol 13, No 2 PP 68-75, Akses 15 November 2015, pada <https://www.google.co.id>.
- [11] Suwardjono. 2005, *Teori Akuntansi: Pengungkapan Pelaporan Keuangan*, BPF, Yogyakarta.
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Lebih Luas.
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah.
- [14] Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [15] Widodo, Joko. 2001, *Good Governanance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.
- [16] Yuliani, Syafrida. 2010, *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Peran Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*, Jurnal Telaah dan Risert Akuntansi, Vol 3, No 2, PP 206-220, Akses 2 Januari 2016, pada <http://scholar.google.co.id>.

Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dalam Pembayaran PPH Pasal 21 Di Kota Palembang (Studi Kasus Kantor Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)

Icha Fajriana dan Cherrya Dhia Wenny

STIE MDP

icha.fajriana@stie-mdp.ac.id

cherrya@stie-mdp.ac.id

Abstract: *The purpose of this research is to determine the effect of Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB), Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB), and Additional Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKBT) on the compliance of Individual Taxpayers of particular entrepreneur, either simultaneously or partially. The data used are Individual Taxpayers of particular entrepreneur who get the SKPKB, SKPLB, and SKPKBT in KPP Pratama Seberang Ulu in 2016. The method of analysis used is quantitative analysis, with the multiple regression models. The research shows that SKPKB, SKPLB, and SKPKBT has impact on the taxpayers' compliance simultaneously. However, partially, only SKPKB and SKPLB have a dominant influence on taxpayers' compliance, while SKPKBT is not dominant affect on the taxpayers' compliance in the payment of income tax art 21 in Palembang*

Keywords: *Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB), Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB), and Additional Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKBT), Individual Taxpayers' compliance*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang mendapatkan SKPKB, SKPLB, dan SKPKBT di KPP Pratama Seberang Ulu tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial, hanya variabel penerbitan SKPKB dan SKPLB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di Palembang.

Kata kunci: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Kepatuhan Wajib Pajak

1. LATAR BELAKANG

Penerimaan pajak bagi Negara berkembang sangat penting karena penerimaan tersebut berguna untuk membiayai pembangunan Negara dan menjadikan Negara tersebut menjadi Negara maju.

Sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan Negara khususnya dari sektor pajak. Di Indonesia dalam segi pendapatan negara berasal dari dua sektor yaitu sektor internal berasal dari pajak, sedangkan pendapatan dari sektor eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Oleh

sebab itu pemerintah daerah harus lebih berusaha keras untuk meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang untuk penerimaan pajak cukup baik

karena penerimaan pajaknya melebihi target.

Adapun target dan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Rasio
2011	390.386.790.488	418.162.074.807	107,1%
2012	527.716.645.326	574.427.264.834	108,8%
2013	764.726.619.677	609.953.627.094	79,7%
2014	707.805.553.926	746.880775.103	105,5%
2015	1.087.012.594.020	942.601.462.464	86,7%

Sumber: Kanwil DJP Sumsel Babel 2017

Dari tabel diatas menunjukkan pada tahun 2010-2012 terjadi peningkatan sebesar 93,7%-108,8%, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 79,7%. Pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar 105,5%, sementara pada tahun 2015 kembali terjadi penurunan sebesar 86,7%. Hal ini menunjukkan dalam realisasi penerimaan pajak masih berfluktuasi. Artinya, meskipun penerimaan pajak di Negara setiap tahunnya meningkat, target realisasi penerimaan pajak Negara yang ditentukan oleh pemerintah masih belum tercapai.

Tabel 2: Jumlah Penerimaan PPh 21 di KPP Palembang Seberang Ulu Tahun 2012 – 2016

Tahun	SSP	SPM
2012	13.718.619.627	7.376.311.945
2013	15.195.387.761	11.293.316.338
2014	28.040.391.369	12.945.699.696
2015	32.670.105.970	14.029.338.446
2016	29.324.889.508	12.618.365.035

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 SSP tahun 2012 sebesar 13.718.619.627 dan SPM sebesar 7.376.311.945 terus mengalami kenaikan hingga tahun 2016 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurun dari tahun-tahun sebelumnya dengan nilai penerimaan SSP sebesar 29.324.889.508 dan SPM sebesar 12.618.265.025. Ini berarti ada suatu kendala yang menyebabkan Wajib Pajak belum sepenuhnya patuh menjalankan kewajiban perpajakannya.

Di Indonesia yang telah menganut prinsip *Self Assessment System*, pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran, kejujuran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakkan keadilan hukum dan juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, Wajib Pajak akan kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar merupakan faktor penting dalam target penerimaan pajak. Semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin meningkat pula penerimaan pajak demikian sebaliknya.

Dengan menganut prinsip *Self Assessment System* pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran, kejujuran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakkan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang

Di Kota Palembang salah satunya di KPP Palembang Seberang Ulu, realisasi jumlah penerimaan pajak khususnya PPh Pasal 21 rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini dapat dibuktikan dari tabel dibawah ini:

perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar merupakan faktor penting dalam target penerimaan pajak. Semakin tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maka semakin meningkat pula penerimaan pajak demikian sebaliknya. Salah satu bentuk perwujudan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dalam hal pengawasan, yaitu melakukan pemeriksaan dengan menerbitkan sejumlah surat ketetapan pajak, baik itu lebih bayar, kurang bayar dan kurang bayar tambahan.

Dapat kita lihat tabel dibawah ini jumlah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu:

Tabel 3: Penerbitan SKPKB, SKPLB dan SKPN PPh 21 di KPP Palembang Seberang Ulu

Tahun	SKPLB	SKPKB	SKPKBT
2012	5	9	1
2013	2	10	0
2014	3	7	0
2015	0	2	0
2016	1	7	0

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa masih adanya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan pada tahun 2012 hingga 2016 oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Dari ketiga penerbitan surat ketetapan pajak tersebut yang paling banyak diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Ini membuktikan bahwa pihak fiskus yang berada di KPP Pratama Seberang Ulu konsisten dengan tugasnya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang ada di areanya.

Salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, hal tersebut menarik

perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengupayakan peningkatan penerimaan pajak dengan cara menjalankan fungsi penagihan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penagihan tersebut dapat berupa diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan untuk menyatakan pajak yang terutang masih kurang dibayar. Surat Ketetapan Pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan dari hasil proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak/penyidik pajak.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kepatuhan

Kepatuhan pajak identik dengan kesediaan seorang Wajib Pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Menurut Gunadi (2013) “Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”

Menurut Norman D. Nowank (Zain, 2014) yang dikutip Firdaus, kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban atas perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) “tindakan wajib pajak dalam pemenuhan

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”.

Dapat disimpulkan bahwa teori kepatuhan merupakan suatu sikap taat dari Wajib Pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun teori kepatuhan harus didukung oleh faktor-faktor lain seperti kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk mencari tahu apakah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dapat menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)* (Ajzen, 1991) perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu:

- (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*),
- (2) *normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), dan
- (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Niat atau intensi adalah kecenderungan atau keputusan *tax professional* untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan pajak.

2.2 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan adalah orang pribadi dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dan luar daerah, melakukan usaha jasa atau memandatkan jasa dari luar daerah. Contohnya: Pengusaha Toko Emas, Pengusaha Industri Kertas. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2000 adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Non Pengusaha Kena pajak

Menurut PP 46 Tahun 2014 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 tahun tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Dalam perhitungannya pajak penghasilan jika peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 maka dikenai PPh Final dengan tarif 1% dari jumlah peredaran bruto dari tempat usaha.

2.3 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak telah diatur dalam pasal 1 angka 25 UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor

16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Objek pemeriksaan menurut Priantara (2000), pada umumnya adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan atau SPT Masa beserta lampiran-lampirannya. SPT Tahunan adalah surat yang dipergunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak dan SPT Masa adalah surat yang digunakan Wajib Pajak/PKP untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak.

Lampiran-lampiran SPT meliputi laporan keuangan, daftar perhitungan penyusutan/amortisasi fiskal, Surat Setoran Pajak (SSP), dan lain-lain. SPT dan lampirannya akan menjadi tolak ukur kepatuhan Wajib Pajak. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, setiap pemeriksa pajak harus mengikuti tata cara pemeriksaan pajak yang sudah ditetapkan, baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun norma-norma tertentu mengenai pemeriksaan pajak.

Tujuannya adalah agar hak dan kewajiban, baik pemeriksa pajak maupun Wajib Pajak tetap dihormati karena masing-masing telah diatur, sedangkan tujuan yang lain dari pengaturan tata cara pemeriksaan pajak, yaitu untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemeriksaan, sekaligus sebagai alat pengawasan bagi atasan pemeriksa pajak.

2.4 Penagihan Pajak

Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan

merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun aparatatur pajaknya.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan dikantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Definisi penagihan pajak menurut Soemitro (2006), yaitu penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Dasar penagihan pajak antara lain:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT)
5. Surat Keputusan Pembetulan Putusan Banding
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
9. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB)
10. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar tambahan (SKBKBT)
11. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
12. Surat Ketetapan Sejenis yang memuat besarnya jumlah utang pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam

Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan.

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan.

Jika dalam jangka waktu 30 hari hutang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan melaksanakan surat paksa. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2.5 Penelitian Terdahulu

Selain menggunakan teori sebagai landasan di dalam penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus peneliti yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu.

Dedy (2014) meneliti pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah PKP dan SPT terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil pengujian membuktikan bahwa PKP Terdaftar dan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, akan tetapi STP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Sebaliknya, tidak ada pengaruh antara SPT Masa Kurang Bayar dan SKPKB terhadap penerimaan PPN.

Juniardi (2014) meneliti Pengaruh Surat

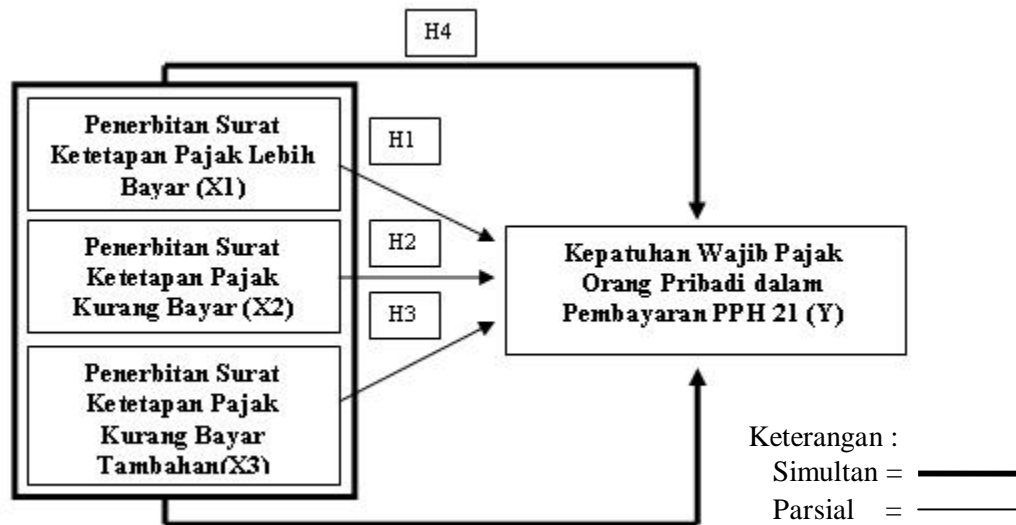
Ketetapan Pajak dan tindakan Penagihan Aktif terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan Badan. Hasil pengujian membuktikan bahwa Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan Aktif memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak penghasilan Badan.

Hidayat (2013) meneliti Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Hasil pengujian membuktikan bahwa Kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak.

Diah (2010) meneliti Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak atau penanggung pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil pengujian membuktikan bahwa Penerbitan STP yang diterbitkan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak Orang Pribadi mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh Wajib Pajak.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa konsep teori dan beberapa penelitian terdahulu, dimana Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diduga memiliki pengaruh dalam tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran PPh Pasal 21. Hubungan variabel Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan variabel tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran PPh Pasal 21. Undang-undang penagihan pajak dengan surat ketetapan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada gambar 1. berikut ini:



Sumber: Penulis , 2018

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang terlihat pada gambar 1. menunjukkan hubungan variabel Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan variabel tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran PPh Pasal 21. Undang-undang penagihan pajak dengan surat ketetapan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada penerimaan pajak.

2.7 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang

H2: Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang

H3: Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang

H4: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data tersebut dapat diperoleh baik secara langsung (data primer) maupun tidak langsung (data sekunder) yang berhubungan dengan objek penelitian. Menurut Sanusi (2011), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang

digunakan adalah berupa data Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang mendapatkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan di KPP Pratama Seberang Ulu Tahun 2016.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013).

Populasi dalam penelitian ini adalah 1020 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Selama tahun 2012 hingga 2016, Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu semakin bertambah. Hingga di tahun 2016 Wajib pajak yang terdaftar telah mencapai 1020 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4: Jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Usahawan

Tahun	Total
2012	842
2013	873
2014	847
2015	1088
2016	1028

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive*

sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dari peneliti yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam populasi (Nazir, 2011). Dalam penentuan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus slovin (Bambang Prasetyo, 2005) dari 1020 total populasi peneliti memasukkannya dalam rumus *slovin* dengan tingkat error responden sebesar 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N.(e)^2}$$

dimana:

n= Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang diteliti (Tingkat kesalahan yang diambil dalam sampling ini adalah sebesar 10%)

$$N = \frac{1020}{1+1020.(0.10)^2}$$

$$= 91,07 \text{ dibulatkan menjadi } 91$$

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 91 dari 1020 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

3.3 Definisi Variabel Operasional

Dalam Operasional Variabel, indikator pengukuran penelitian ini adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Definisi operasional variabel dependen dan independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Operasionalisasi Variabel Penelitian

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (X1)	Merupakan surat yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang .	Mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak	Skala Interval

Tabel 5: Operasionalisasi Variabel Penelitian Lanjutan

2	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (X2)	Merupakan surat yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak , beserta sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.	-Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang - Sebagai alat atau sarana mengenakan sanksi - Sebagai alat atau sarana menagih pajak	Skala Interval
3	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (X3)	Merupakan surat kurang bayar tambahan yang diterbitkan untuk menentukan ulang jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak , beserta sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.	-Sebagai koreksi ulang atas jumlah pajak yang terutang -Sebagai alat atau sarana mengenakan sanksi -Sebagai alat atau sarana menagih pajak	Skala Interval
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan	-Melaporkan pajak tepat waktu -Mengisi formulis pajak dengan benar -Menghitung pajak dengan jumlah yang benar -Membayar pajak tepat waktu	Skala Interval

Sumber: Penulis, 2017 diolah

3.4 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013), penelitian ini termasuk penelitian asosiatif (hubungan) yaitu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan yang paling tinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif.

Melalui penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Penelitian ini digolongkan kedalam hubungan kausal yaitu terdapat variabel independen. Peneliti menggunakan penelitian asosiatif karena peneliti ingin mengetahui hubungan antara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan di KPP Pratama Seberang Ulu Tahun 2016.

3.5 Model Persamaan

Untuk menguji hipotesis yang telah dikembangkan, maka penelitian ini akan menggunakan analisis regresi berganda yang bertujuan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Rumus linear berganda ditunjukkan oleh persamaan:

$$Y = \beta + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e \dots \dots$$

Dimana :

Y = Jumlah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2 \dots \dots$ = Koefisien Regresi

x1 = Penerbitan SKPLB

x2 = Penerbitan SKPKB

x_3 = Penerbitan SKPKBT
 e = variabel residual (tingkat eror)

3.6 Uji Asumsi Klasik

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan data berdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Ada tidaknya multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai matriks korelasi (*correlation matrix*) dari semua variabel adalah kurang dari 0,8.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Apabila varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Ada tidaknya

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola residual dari hasil estimasi regresi. Jika residual bergerak konstan maka tidak ada heteroskedastisitas. Akan tetapi, jika residual membentuk suatu pola tertentu, maka hal tersebut mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

3.7 Pengujian Hipotesis

3.7.1 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui bahwa variabel independen (penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21).

Uji statistik dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

Ha: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang.

Dasar pengambilan keputusan:

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak

berdasarkan nilai probabilitasnya (signifikansi) dasar pengambilan keputusannya adalah:

Jika probabilitas $> 0,10$ maka H_0 diterima

Jika probabilitas $< 0,10$ maka H_0 ditolak

3.7.2 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui bahwa variabel independen (penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

(Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21). Uji statistik dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

H1: Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang

H2: Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang

H3: Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang

H4: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang.

Dasar pengambilan keputusan:

- Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima
Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak
- Berdasarkan nilai probabilitasnya (signifikansi) dasar pengambilan keputusannya adalah:

Jika probabilitas $> 0,10$ maka H_0 diterima

Jika probabilitas $< 0,10$ maka H_0 ditolak

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini menunjukkan kemampuan garis regresi yang menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai (R^2) atau ($R^2\ adjusted$) berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin baik. (Ajija dkk, 2011).

Dalam penelitian ini koefisien determinasi (R^2) atau ($R^2\ adjusted$) berguna untuk mengukur seberapa besar peranan variabel Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, terbukti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal, bebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan masalah autokorelasi. Hasil pengujian dapat dilihat pada ringkasan tabel berikut ini:

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel Penelitian	Uji Multikolinearitas		Uji Heteroskedastisitas (Uji Park)
	Tolerance	VIF	
Penerbitan SKPKB	0,164	6,108	0,108
Penerbitan SKPLB	0,312	3,202	0,151
Penerbitan SKPKBT	0,106	9,466	0,446
Nilai Durbin-Watson	1,704		
Sign. Kolmogorov-Smirnov	0,609		

Sumber: Data Diolah Penulis, 2018

4.1.2 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, maka dilakukan uji-F dan uji-t guna mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun secara parsial. Hasil uji simultan menggunakan uji-F menyatakan bahwa keseluruhan variabel independen yang terdiri dari penerbitan SKPKB, penerbitan SKPLB, dan penerbitan SKPKBT secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun secara parsial, penerbitan SKPKBT terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hanya penerbitan SKPKB dan SKPLB yang terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7: Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Model	B	t-hitung
(Constant)	0,173	
Penerbitan SKPKB	0,623	*4,754 (sign. 0,000)
Penerbitan SKPLB	0,434	*4,778 (sign. 0,000)
Penerbitan SKPKBT	-0,078	-0,506 (sign. 0,614)
F-hitung		100,075 (sign. 0,000)
R Square		0,775

Sumber: Data diolah penulis, 2018

Dari tabel di atas juga dapat dibentuk model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,173 + 0,623X_1 + 0,434X_2 - 0,078X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 0,173 menunjukkan bahwa jika tidak ada penerbitan SKPKB, SKPLB, dan SKPKBT, maka nilai dari kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,173. Nilai kepatuhan wajib pajak ini akan meningkat sebesar 0,623 jika penerbitan SKPKB juga meningkat sebanyak 1 satuan dengan asumsi penerbitan SKPLB dan SKPKBT tetap. Jika diasumsikan penerbitan SKPKB dan SKPKBT tetap sedangkan nilai dari penerbitan SKPLB yang meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,434. Namun nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan

sebesar 0,078 jika adanya peningkatan dalam penerbitan SKPKBT sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

4.2 Pembahasan

Hasil pengujian membuktikan bahwa penerbitan SKPKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin banyak penerbitan SKPKB maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan WP tersebut untuk membayar pajak.

Undang – Undang No 6 Tahun 1983 menyebutkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Ketika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) telah diterbitkan, maka Wajib Pajak diharuskan untuk membayar sejumlah pokok pajak tanpa terkecuali. Jika Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atas pajak kurang bayar tersebut, maka akan masuk ke dalam fase penagihan, yaitu dengan diterbitkannya surat teguran, surat paksa, hingga surat penyitaan. Maka dari itu, untuk menghindari fase penagihan tersebut, Wajib Pajak akan segera membayar untuk menghindari sanksi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama diterima, yaitu penerbitan SKPKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil yang sama dibuktikan untuk mendukung hipotesis kedua, yaitu penerbitan SKPLB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah Surat Keputusan yang menentukan pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut, karena dan atau dipotong dan/atau dipungut lebih besar dari pajak yang terhutang (UU No 6 Tahun 1983). Untuk menghindari berbagai sanksi yang akan didapat oleh Wajib Pajak tersebut, maka semakin banyak surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan,

maka Wajib Pajak akan terdorong untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun, dari hasil pengujian yang telah dilakukan, hipotesis ketiga dalam penelitian ini tidak terbukti. Penerbitan SKPKBT tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor *Control Beliefs* dalam *Theory Planned of Behavior* menjelaskan bahwa pengambilan keputusan individu dipengaruhi oleh pengalaman pribadi atau orang disekitar individu. *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi perpajakan. Artinya Wajib Pajak akan mematuhi segala kewajiban perpajakannya karena ada sanksi yang mengikat.

UU No 28 tahun 2007 menjelaskan SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya). Tidak adanya sanksi yang mengikat menyebabkan Wajib Pajak tidak mematuhi segala kewajiban perpajakannya meskipun telah diterbitkan SKPKBT.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya maka didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerbitan SKPKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin banyak penerbitan SKPKB maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan WP tersebut untuk membayar pajak.
2. Penerbitan SKPLB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk menghindari berbagai sanksi yang akan didapat oleh wajib pajak tersebut, maka semakin banyak surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan, maka wajib pajak akan terdorong untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Penerbitan SKPKBT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, tinggi atau rendahnya SKPKBT yang diterbitkan tidak akan mempengaruhi wajib pajak orang pribadi usahawan untuk meningkatkan kepatuhannya dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di Kota Palembang.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan di sini adalah:

1. Bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, prosedur dalam pelaksanaan pengawasan pajak melalui Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan harus menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu pihak fiskus dapat memberikan sosialisasi perpajakan bagi Wajib Pajak agar dalam pelaksanaannya mampu dan secara efektif dapat mendeteksi upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk menambah faktor-faktor lain diluar ruang lingkup penelitian ini sehingga lebih dapat dijadikan sebagai dasar penilaian lainnya.
3. Penerbitan SKPKBT tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak adanya sanksi yang mengikat menyebabkan wajib pajak tidak mematuhi segala kewajiban perpajakannya meskipun telah diterbitkan SKPKBT.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajzen. 1991, *The Theory of Planned Behavior*, In: *Organizational Behavior and Human Decision Process*, Amherst, MA: Elseive
- [2] Diah, Rice. 2010, *Pengaruh Penerbitan Surat*

- Tagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak atau Penanggung Jawab Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*, Jurnal Akuntansi.
- [3] Diaz, Priantara. 2000, *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Jembatan, Jakarta
- [4] Gunadi. 2013, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, Bee Media, Jakarta.
- [5] Hidayat Rudi 2013, *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak*, Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1
- [6] Juniardi, P. K., S.R. Handayani, dan D.F. Azizah. 2014, *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Malang Utara*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 17, No. 1
- [7] Nazir. Muhammad, Ph.D. 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [8] Pajak. 2016, *Target Penerimaan Pajak yang Terealisasi*, Diakses 08 September 2017 dari www.m.tempo.com
- [9] Putra, Dedy. 2014, *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai*, Jurnal Akuntansi.
- [10] Rahayu, Siti Kurnia. 2010, *Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Formal)*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- [11] Sanusi, Anwar. 2001, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Erlangga, Jakarta
- [12] Soemitro, Rochmat. 2006, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT Eresco, Bandung.
- [13] Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- [14] Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [15] Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- [16] Zain, Mohammad. 2014, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta
- [17] _____. 2017, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016*, Diakses 08 September 2017 dari www.pajak.go.id

Pengaruh Rasio Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage* Dan Aktivitas Terhadap *Return Saham* (Studi Empiris Pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2016)

Raisa Pratiwi, Charisma Ayu Pramuditha

STIE Multi Data Palembang

raisapратиwi@stie-mdp.ac.id

charisma@stie-mdp.ac.id

Abstract: *The objective of this research is to examine the effect of liquidity ratio, profitability ratio, leverage ratio, and activity ratio to stock return. We use Property and Real Estate firms that listed on Indonesia Stock Exchange through periode 2011-2015 and 2012-2016 with signaling theory as a sample of the research and based on purposive sampling, we selected 40 firms as the sample of this research. Data resources on this research are secondary data. Samples used on this research which were taken by using purposive sampling technique. The research methods used on this research are multiple regression and hypotheses test using t test and F test. Based on t test, liquidity ratio, profitability ratio, leverage ratio is not significantly. Based on F test, simultaneously liquidity ratio, profitability ratio, leverage ratio, and activity ratio influence to stock return.*

Keywords: *liquidity ratio, profitability ratio, leverage ratio, activity ratio, and stock return.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan rasio aktivitas terhadap return saham. Kami menggunakan perusahaan Properti dan Real Estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan periode 2011-2015 dan 2012-2016 dengan teori pensinyalan sebagai sampel penelitian dan berdasarkan purposive sampling, kami memilih 40 perusahaan sebagai sampel dalam penelitian ini. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Sampel yang digunakan pada penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling. Metode penelitian diuji dan diuji dengan uji t dan uji F. Berdasarkan uji t, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage tidak signifikan. Berdasarkan uji F, secara simultan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan rasio aktivitas berpengaruh terhadap return saham.

Kata kunci: rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan return saham.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses pembangunan suatu Negara perlu adanya dorongan terutama dari pasar modal sebagai sarana yang efektif untuk menyalurkan dana dari masyarakat kepada sektor produktif dalam jangka panjang. Para investor lebih tertarik menanamkan dana di pasar modal berupa saham selain aktiva riil dan simpanan di bank sehingga keberadaan pasar modal sangat bermanfaat bagi para investor yang ingin melakukan penanaman modal di

pasar modal. Selambar kertas yang menunjukkan hak sebagai pemodal pada suatu perusahaan dalam menjalankan haknya disebut saham (Suad dan Enny, 2004).

Dalam mencapai tujuan investasi yang diharapkan, investor tentu saja perlu pertimbangan dan analisis terhadap informasi yang disajikan berupa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam periode waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sebelum melakukan kegiatan investasi (Harahap,

2004). Selain mengharapkan keuntungan dari hasil investasi, investor juga mengharapkan *dividen* dan *return* saham dari kegiatan investasi tersebut dengan memprediksi harga saham di periode yang akan untuk dapat memprediksi tingkat pengembalian (*return*) dan keuntungan yang akan diperoleh.

Pengembalian (*return*) terbagi menjadi *return* realisasi dan *return* ekspektasi. *Return* realisasi adalah pengembalian yang telah terjadi sedangkan *return* ekspektasi adalah pengembalian yang belum terjadi (Jogiyanto, 2010). *Return* realisasi sebagai salah satu alat ukur dalam kinerja perusahaan, serta sebagai dasar penentu *return* ekspektasi dan risiko di masa yang akan datang.

Pengembalian (*return*) dapat berupa *capital gain* ataupun *dividen* atas saham yang dimiliki serta bunga yang diperoleh dari kegiatan investasi atas surat berharga. Investor perlu melakukan pendekatan pasar yaitu pendekatan fundamental dalam menganalisis saham yang merupakan pilihan yang tepat.

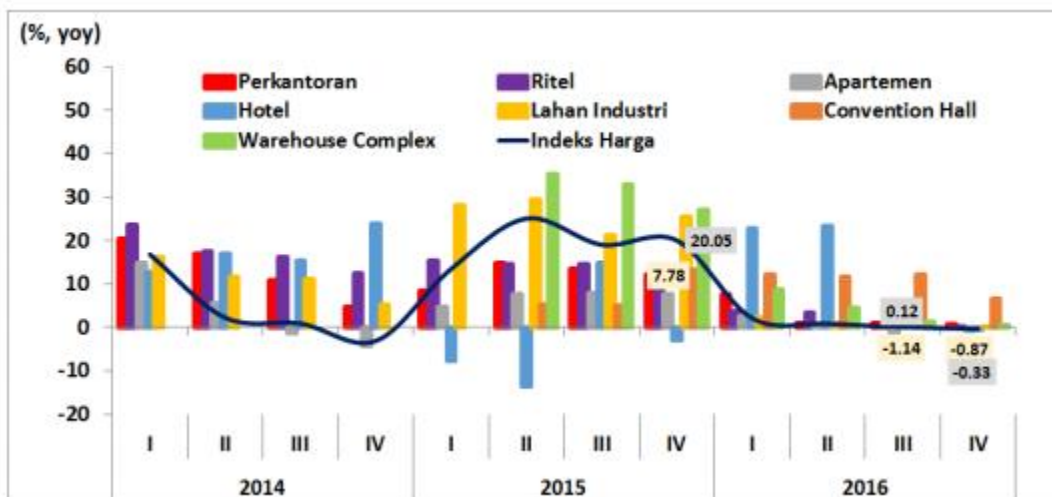
Pendekatan fundamental memperhatikan rasio keuangan yang dapat menjelaskan faktor yang akan berdampak pada harga saham di waktu yang akan datang serta kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan perusahaan dari laporan keuangan yang

disajikan perusahaan. Analisis fundamental dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam lingkup industri yang sama serta dapat membandingkan perkembangan yang terjadi pada perusahaan.

Pola *return* saham yang diterima ditentukan dari kontribusi perilaku harga saham yang akibat pola perilaku perdagangan saham di pasar modal. Dana operasional dan investasi yang dilakukan investor dan masyarakat dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan *property* dan *real estate* karena harga tanah yang cenderung akan naik terus-menerus diakibatkan penawaran tanah yang bersifat tetap tetapi permintaan yang selalu meningkat karena pertambahan jumlah penduduk sehingga membuat sektor *property* dan *real estate* menjadi daya tarik bagi investor maupun masyarakat.

Namun ternyata terdapat indeks perkembangan *property* komersil tahun 2014-2016 mengalami fluktuatif (dapat dilihat pada gambar 1) yang menunjukkan terjadi penurunan permintaan pada sektor ini, hal tersebut disebabkan oleh laporan keuangan tidak sehat yang tidak menarik bagi investor, harga yang tidak sesuai dengan keinginan dan lain-lain.

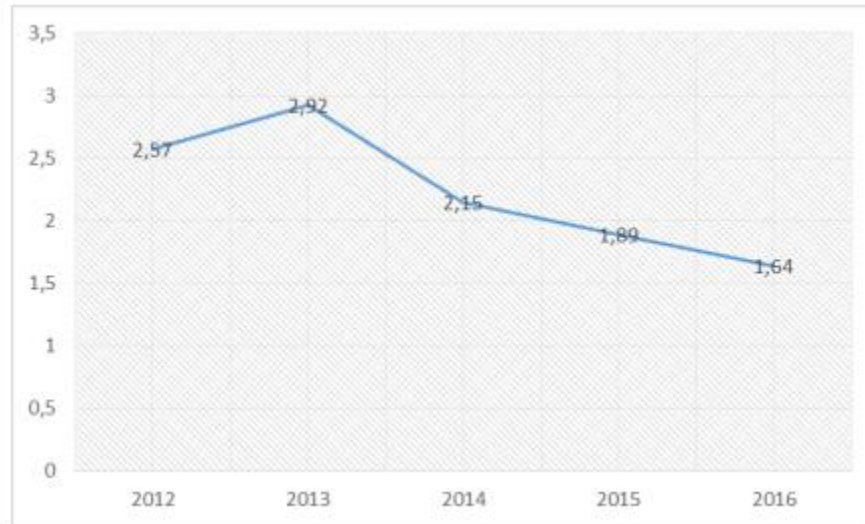


Sumber: website resmi bank Indonesia (www.bi.go.id)

Gambar 1. Indeks Perkembangan Properti Komersial

Berdasarkan laporan perkembangan properti komersial kuartal 4 tahun 2016 Bank Indonesia menunjukkan penurunan indeks harga sebesar 0,33%. Hal tersebut terjadi karena permintaan masyarakat yang terbatas dibandingkan dengan kenaikan pasokan

(Bank Indonesia, 2017). Perusahaan *property* masih belum dapat menyesuaikan harga perusahaan, sehingga permintaan tidak sesuai dengan harga, dan berimplikasi kepada penurunan harga perusahaan.



Gambar 2. Nilai Rata-rata Perusahaan Property Tahun 2012-2016

Sumber: Bloomberg, ICMD, IDX

Dari hasil grafik diatas, menunjukkan nilai perusahaan mengalami penurunan sejak tahun 2014-2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan *property* masih belum dapat menyesuaikan harga perusahaan, sehingga permintaan tidak sesuai dengan harga, dan berimplikasi kepada penurunan harga perusahaan dan juga menyebabkan nilai perusahaan menjadi menurun. Sebelum melakukan investasi, terdapat lima rasio keuangan perlu dianalisis yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio *leverage/solvabilitas*/utang, rasio profitabilitas, dan nilai pasar (Mardiyanto, 2009). Rasio tersebut menjelaskan kekuatan dan kelemahan dalam memprediksi *return* saham di pasar modal.

Penelitian mengenai rasio keuangan dan pengaruhnya terhadap *return* saham sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun terdapat hasil penelitian yang ditemukan tidak konsisten, seperti hasil penelitian mengenai rasio likuiditas terhadap *return* saham Ratna Prihantini (2009) menemukan pengaruh positif namun Ruspiondang

Rhenata Igantia Manurung (2015) tidak menemukan adanya pengaruh rasio likuiditas terhadap *return* saham. Hasil penelitian mengenai rasio *leverage* terhadap *return* saham, peneliti I Gusti Agung Ayu Siska Suandewi dan I Putu Sudana (2016) menemukan pengaruh positif tapi Ratna Prihantini (2009) menemukan adanya pengaruh negatif sedangkan Ruspiondang Rhenata Igantia Manurung (2015) tidak menemukan adanya pengaruh rasio *leverage* terhadap *return* saham.

Hasil penelitian rasio profitabilitas terhadap *return* saham, peneliti Ruspiondang Rhenata Igantia Manurung (2015) menemukan adanya pengaruh positif namun Rita Rosiana, Wulan Retnowati dan Hendro (2014) tidak menemukan adanya pengaruh rasio profitabilitas terhadap *return* saham. Serta hasil penelitian rasio aktivitas terhadap *return* saham, peneliti Widodo (2007) menemukan adanya pengaruh positif sedangkan Ruspiondang Rhenata Igantia Manurung (2015) tidak menemukan adanya pengaruh rasio aktivitas terhadap *return* saham.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan mengidentifikasi permasalahan yaitu:

1. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap *return* saham pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?
2. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap *return* saham pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?
3. Apakah rasio *leverage* berpengaruh terhadap *return* saham pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?
4. Apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap *return* saham pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh rasio likuiditas terhadap *return* saham perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh rasio profitabilitas terhadap *return* saham perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh rasio *leverage* terhadap *return* saham perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh rasio aktivitas terhadap *return* saham perusahaan

property dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Wolk, et al. (2001:375) teori sinyal menyatakan alasan perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal. Teori sinyal memaparkan mengenai bagaimana perusahaan seharusnya memberikan sinyal-sinyal terhadap pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi yang menyajikan keterangan, catatan atau gambaran mengenai keadaan masa lalu atau pun kelangsungan hidup suatu perusahaan. Informasi tersebut berguna bagi perusahaan dalam menganalisis perusahaan yang akan dilakukan investasi (Suwardjono, 2005).

Informasi dalam atau *inside information* seperti rencana manajemen, kebijakan manajemen, pengembangan produk, strategi yang dirahasiakan dan lain-lain yang tidak tersedia di publik akhirnya akan terrefleksikan dalam angka yang dipublikasikan melalui *statement* laporan keuangan. *Statement* laporan keuangan berupa salah satu sinyal dari kumpulan informasi yang ada di pasar modal. Sehingga investor berkeinginan untuk mencari informasi mengenai prediksi laba yang akan dipublishkan atas dasar data yang tersedia secara publik (Suwardjono, 2005).

Signalling theory berasumsi bahwa adanya informasi asimetris antara manajemen perusahaan dengan investor. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan mempunyai informasi yang berbeda tentang perusahaan daripada seorang investor. Manajemen perusahaan mempunyai informasi yang lebih baik mengenai perusahaan karena manajemen perusahaan mengelola perusahaan secara langsung. Untuk menangani asimetri informasi ini, manajemen perusahaan akan mengumumkan informasi mengenai perusahaan dan prospeknya kepada para masyarakat (investor). Informasi yang diumumkan oleh manajemen perusahaan yang dinyatakan dalam harga

saham akan ditanggapi oleh investor (Aditya dan Isnurhadi, 2013).

2.2 Rasio-rasio Keuangan

Brigham dan Houston (2013) menyatakan Investor melakukan peramalan masa depan dengan menganalisis laporan keuangan. Dari laporan keuangan yang dianalisis dibutuhkan beberapa rasio untuk menghasilkan gambaran tentang situasi dari perusahaan. Rasio merupakan gambaran situasi suatu perusahaan yang berada di waktu tertentu agar dapat mengetahui kecenderungan (*tren*) situasi perusahaan di masa yang akan datang melalui gerakan yang terjadi pada masa lalu hingga sekarang.

Hasil perbandingan suatu laporan keuangan dengan pos lainnya yang memiliki hubungan relevan dan signifikan disebut rasio keuangan. Dengan cara ini dapat diketahui hubungan antar pos bisa dibandingkan dengan rasio lain sehingga dapat memberikan penilaian (Mulyawan, 2015). Brigham dan Houston (2013) menjelaskan rasio keuangan dibuat untuk membantu dalam mengevaluasi laporan keuangan. Rasio keuangan yang digunakan adalah antara lain:

2.2.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas diproksikan dengan *Current Ratio* (CR) berguna untuk menunjukkan kemampuan operasional perusahaan untuk kelancaran proses produksi. Angka rasio yang besar menunjukkan perusahaan “*likuid*”, yaitu proses produksi akan lancar jika perusahaan dapat melunasi semua tagihan jangka pendek yang baik (Wira, 2011).

Hal tersebut memberikan keuntungan bagi investor karena hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat menghadapi fluktuasi bisnis. Sedangkan nilai *current ratio* yang rendah dapat mengakibatkan harga pasar saham perusahaan tersebut turun dan investor menganggap bahwa perusahaan tersebut mengalami masalah dalam hal likuidasi. Sehingga perusahaan yang memiliki nilai *current asset* yang tinggi lebih menarik investor dibanding nilai *current asset* yang rendah.

Namun dengan nilai *current asset* yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa dana perusahaan tidak berputar yang akan menyebabkan laba perusahaan menurun. Rumus *Current ratio* (CR) sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

2.2.2 Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas diproksikan dengan rasio *return on equity* mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakannya modal sendiri. Rasio profitabilitas dinilai dari besar kecilnya utang perusahaan, jika utang semakin besar maka rasio ini juga akan semakin besar. *Return on Equity* (ROE) dinyatakan dalam presentasi yang diperoleh dari laba bersih dibagi dengan rata-rata modal sendiri. Investor berpandangan bahwa ROE dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai prospek perusahaan dimasa yang akan datang dan mampu memberikan *return* yang diharapkan oleh investor. ROE yang tinggi akan meningkatkan harga saham karena menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. *Return on Equity* dirumuskan sebagai berikut (Sartono, 2010):

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Profit After Taxes}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

2.2.3 Rasio Leverage

Menurut Fahmi (2012), rasio solvabilitas atau *leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa besar kewajiban membiayai perusahaan. *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai proksi dari rasio *leverage* menggambarkan struktur modal perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha, DER digunakan untuk menilai kewajiban dengan ekuitas (modal) (Kasmir, 2012).

Rasio ini membandingkan antara seluruh kewajiban baik kewajiban lancar atau tidak lancar dengan modal/ekuitas. Analisis rasio *leverage* sangat penting karena perusahaan yang gagal dalam memenuhi utang/kewajiban jangka pendeknya akan membuat perusahaan menjadi bangkrut. Semakin tinggi rasio maka akan

menunjukkan kinerja yang buruk bagi perusahaan karena risiko yang dihadapi semakin besar, selain itu laba perusahaan digunakan untuk memenuhi kewajiban hutangnya sebelum memberikan deviden kepada investor sehingga investor kurang tertarik pada perusahaan yang memiliki nilai DER yang tinggi. Selain itu rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva (Sartono, 2010). *Debt Equity Ratio* (DER) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

2.2.4 Rasio Aktivitas

Menurut Fahmi (2012), rasio aktivitas ialah rasio yang menunjukkan sejauhmana suatu perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam membantu kelancaran aktivitas perusahaan. *Total Asset Turnover* (TATO) merupakan proksi dari rasio aktivitas. Menurut Kasmir (2012), *Total Asset Turnover* (TATO) adalah alat pengukur perputaran semua aset yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah pendapatan yang diperoleh dari tiap rupiah aset. *Total Asset Turnover* (TATO) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Total Asset Turnover} = \frac{\text{Sales}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.3 Return Saham

Hasil dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor disebut *return* saham (Hartono, 2014) yang merupakan salah satu faktor mempengaruhi investor dalam melakukan investasi. Menurut Fahmi (2013), *return* diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, institusi dan individu dari hasil kebijakan investasi yang dilaksanakannya. Terdapat dua jenis *return* yaitu *return* realisasi atau *return* ekspektasi (Hartono, 2013).

Saham dikenal dengan karakteristik *high risk high return*. Hal tersebut karena saham merupakan surat berharga yang tidak hanya memberikan peluang keuntungan tinggi tetapi memiliki potensi resiko yang tinggi juga. Saham memungkinkan pemodal untuk

mendapatkan *return* berupa *capital gain* jika harga saham sekarang (P_t) lebih tinggi dari harga saham periode sebelumnya (P_{t-1}). Namun, seiring dengan berfluktuasinya harga saham, ada kalanya pemodal harus menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari harga beli, maka hal ini disebut dengan *capital loss*. Menurut Hartono (2014), Secara matematis formulasi *return* saham dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

R_t = *Return* Saham pada periode ke-t

P_t = Harga saham pada periode t

P_{t-1} = Harga saham sebelum pada periode ke-t

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan manfaat informasi akuntansi untuk memprediksi laba atau *return* saham adalah sebagai berikut:

Ruspinondang Rhenata Igantia Manurung (2015) menganalisis tentang pengaruh rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio *leverage* dan rasio aktivitas terhadap *return* saham. Dengan tujuan untuk mengetahui bahwa apakah ada pengaruh positif rasio likuiditas, profitabilitas, rasio *leverage*, dan rasio aktivitas terhadap *return* saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2013.

Dengan menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data menggunakan data perusahaan emiten yang terdaftar di BEI, data harga dan *return* saham dalam BEI periode 2008-2013, data rasio-rasio keuangan dari perusahaan emiten dalam BEI tahun 2008-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh positif, rasio likuiditas dan rasio aktivitas tidak memiliki pengaruh positif serta rasio *leverage* tidak berpengaruh negatif terhadap *return* saham.

Bramantyo Nugroho (2012) meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap *return* saham. Dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh CR, DER, TATO, dan ROA terhadap *return* saham

yang dilakukan pada saham perusahaan otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2011 dengan jenis data adalah data sekunder bersifat kuantitatif yang diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) tahun 2005-2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan sedangkan *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Total Asset Turn Over* tidak berpengaruh terhadap *return* saham.

Ken Aditya dan Isnurhadi (2013) menganalisis pengaruh rasio lancar, rasio perputaran total aktiva, *debt to equity ratio*, *return on equity*, dan *earning per share* terhadap *return* saham. Dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh rasio lancar, rasio perputaran total aktiva, *debt to equity ratio*, *return on equity*, dan *earning per share* terhadap *return* saham yang dilakukan pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011 dengan jenis data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif signifikan sedangkan rasio lancar, rasio perputaran total aktiva, *debt to equity ratio* dan *earnings per share* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return* saham.

I Gusti Agung Ayu Siska Suandewi dan I Putu Sudana (2016) meneliti tentang rasio-rasio keuangan dan *return* saham. Dengan tujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh rasio-rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio *leverage* pada *return* saham yang dilakukan pada industri tekstil dan garment di PT BEI dengan jenis data data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio profitabilitas dan rasio *leverage* berpengaruh positif sedangkan rasio likuiditas, rasio aktivitas tidak berpengaruh terhadap *return* saham.

Rita Rosiana, Wulan Retno Wati, dan Hendro (2014) meneliti pengaruh rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio pasar, *firm size*, tingkat suku bunga dan nilai tukar terhadap *return* saham. Dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pasar, *firm size*, tingkat suku bunga dan nilai tukar terhadap *return* saham yang dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2008-2011 dengan jenis data adalah data sekunder yang bersumber dari BEI yang memuat laporan keuangan tahunan periode 2008-2011.

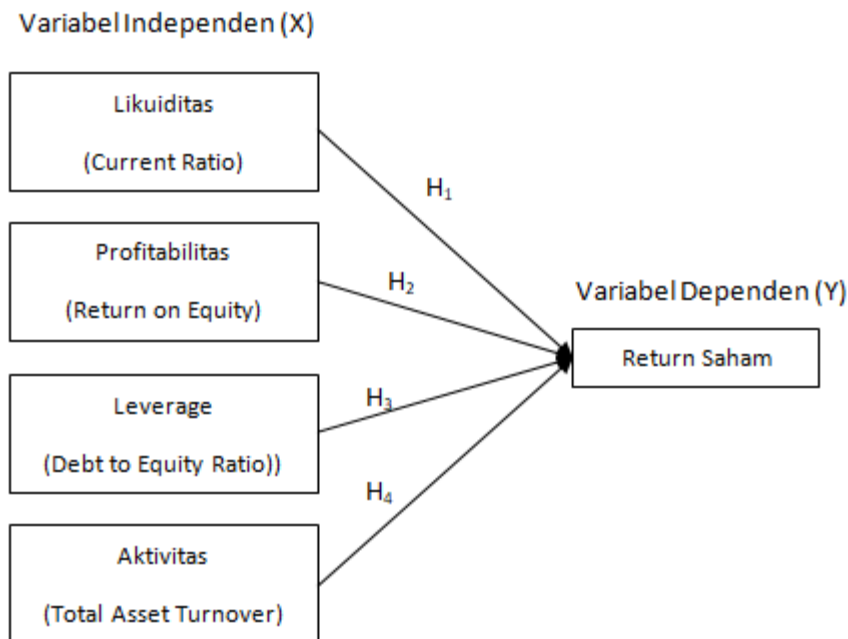
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio aktivitas (TATO) dan nilai tukar (Kurs tengah BI) berpengaruh namun rasio profitabilitas (ROE), rasio pasar (PBV), *firm size* (total aset), tingkat suku bunga (SBI) tidak berpengaruh terhadap *return*.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan *signalling theory*, laporan keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh perusahaan sebagai daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi atau penanaman modal pada perusahaan tersebut. Dan investor menanggapi laporan keuangan yang disajikan perusahaan berisi informasi perusahaan yang direfleksasikan dalam harga saham perusahaan.

Signalling theory berasumsi adanya informasi asimetris antara manajemen perusahaan dengan investor. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan memiliki informasi yang berbeda mengenai perusahaan dibandingkan investor. Manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih baik berkaitan dengan perusahaan beserta prospeknya (lebih akurat).

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dibahas sebelumnya mengenai faktor analisis rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio *leverage* dan rasio aktivitas serta *return* saham. Maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran teoritis yang memberikan gambaran pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen akan diduga sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis, 2017

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis yang akan diujikan kebenarannya. Adapun hipotesis yang di jabarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Return Saham

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek tepat pada waktunya (Sartono, 2010). Nilai likuiditas yang rendah menunjukkan masalah dalam perusahaan dan berakibat menyebabkan terjadinya penurunan harga pasar dari saham perusahaan yang bersangkutan. Semakin tinggi likuiditas menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek (Sartono, 2010).

Nilai likuiditas yang tinggi menunjukkan perusahaan dalam kondisi *liquid*, perusahaan yang *liquid* lebih menarik minat investor (Daljono et.al, 2013). Maka investor tertarik untuk membeli saham perusahaan sehingga nilai saham perusahaan naik dan mempengaruhi peningkatan *return* saham. Hasil ini

mendukung penelitian oleh Prihantini (2009) yang menemukan bahwa rasio likuiditas berpengaruh positif namun tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Subalono (2009), Aditya dan Isnurhadi (2013) dan Nugroho (2012) yang menemukan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap *return* saham.

H1: Likuiditas berpengaruh positif terhadap *return* saham

2. Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Return Saham

Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari sumber dana yang dimiliki. Semakin tinggi nilai profitabilitas menunjukkan kinerja perusahaan yang baik karena memanfaatkan aktiva yang dimilikinya untuk memperoleh laba. Investor lebih tertarik untuk memiliki saham perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang besar, dan jika banyak investor yang tertarik pada perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi dengan harapan harga saham perusahaan tersebut naik dan

return saham menjadi naik, sehingga profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *return* saham.

Hasil ini mendukung penelitian dari Aditya dan Isnurhadi (2013), Subalono (2009) serta I Gusti Agung Ayu Siska Suandewi dan I Putu Sudana (2016) yang menemukan rasio profitabilitas berpengaruh positif namun bertentangan dengan hasil penelitian Rita rosiana (2009) serta Ayu Nurhayani Aisah dan kastawan mandala (2016) menemukan rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *return* saham.

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *return* saham

3. Pengaruh Rasio *Leverage* Terhadap *Return* Saham

Hubungan yang digambarkan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset akan memberikan pengaruh negatif bagi *return* saham, karena jika total utang lebih besar dari modal maka yang terjadi perusahaan akan memperoleh tingkat pengembalian atau *return* yang rendah. karena utang yang terlalu banyak akan menjadikan perusahaan sulit untuk melunasi utang-utangnya (Asmi, 2014).

Meningkatnya utang menunjukkan sumber modal perusahaan tergantung pada pihak luar (kreditur) yang dapat mengurangi keinginan investor dalam penanaman dananya dalam perusahaan tersebut karena investor lebih memilih perusahaan yang memiliki nilai *leverage* yang rendah, karena menunjukkan kewajiban yang ditanggung perusahaan juga semakin kecil. Menurunnya minat investor yang ingin berinvestasi di perusahaan tersebut berdampak pada rendahnya harga saham yang menyebabkan *return* saham menjadi rendah.

Hasil ini mendukung penelitian oleh Prihantini (2009) yang menemukan bahwa rasio *leverage* berpengaruh negatif namun tidak sesuai dengan hasil penelitian dari I Gusti Agung Ayu Siska Suandewi dan I Putu Sudana (2016) yang menemukan rasio *leverage* berpengaruh positif serta Subalno (2009), Aditya dan Isnurhadi (2013) dan Nugroho

(2012) yang menyatakan bahwa rasio *leverage* tidak berpengaruh terhadap *return* saham.

H3: *Leverage* berpengaruh negative terhadap *return* saham

4. Pengaruh Rasio Aktivitas Terhadap *Return* Saham

Aktivitas menggambarkan kemampuan serta efisiensi dalam menghasilkan penjualan dengan mendayagunakan aktiva yang dimiliki. Efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk mendapatkan penjualan dalam memperoleh laba dapat dilihat dari perputaran total aktiva. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan aktiva tersebut.

Perusahaan yang mampu mengoptimalkan aktivanya dan meningkatkan penjualannya akan lebih menarik untuk investor, hal tersebut dapat meningkatkan *return* saham yang dapat dilihat pada peningkatan harga saham dari perusahaan tersebut (Daljono et al, 2013). Hasil ini mendukung penelitian oleh Widodo (2007) yang menemukan bahwa rasio aktivitas berpengaruh positif namun tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Subalno (2009), Aditya dan Isnurhadi (2013), Nughono (2012) yang mengatakan bahwa rasio aktivitas berpengaruh negatif terhadap *return* saham.

H4: Aktivitas berpengaruh positif terhadap *return* saham

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *expost facto*, yaitu penelitian yang meneliti peristiwa yang telah terjadi dengan kondisi tidak ada manipulasi langsung terhadap variabel atau tidak menciptakan kondisi tertentu. Penelitian ini bersifat asosiatif kausal yaitu penelitian yang mencari hubungan (pengaruh) sebab akibat, yaitu variabel independen/bebas (X) terhadap variabel dependen/terikat (Y) (Sugiyono,

2009). Dalam penelitian ini, variabel independen yang diteliti adalah Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Rasio *Leverage*, dan Rasio Aktivitas sedangkan variabel *dependennya* adalah *Return Saham*.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 merupakan subjek penelitian pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan objek penelitian laporan keuangan perusahaan *property* dan *real estate* yang go public dan *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2013), populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada wilayah generalisasi serta mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat diperoleh kesimpulannya. Saham perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016 merupakan populasi dari penelitian ini.

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu. Bila populasi berjumlah besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti hanya meneliti sebagian dari populasi tersebut. Penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* dalam penentuan *sampel*, dengan kriteria sebagai berikut:

Perusahaan bidang *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Laporan keuangan lengkap yang diterbitkan perusahaan selama periode 2014-2016. Selama periode pengamatan perusahaan memiliki data laporan keuangan lengkap yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016. Sesuai kriteria-kriteria pengambilan *sampel* diatas, maka dapat dilihat proses pemilihan sampel pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Seleksi Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan bidang <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.	43
Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang lengkap selama periode 2014-2016.	2
Selama periode pengamatan perusahaan tidak memiliki data laporan keuangan lengkap yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016.	1
Sampel yang memenuhi syarat	40

Sumber: Diolah Penulis, 2017

Berdasarkan berbagai kriteria pemilihan *sampel* dapat diperoleh jumlah Perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi *sampel* pada penelitian sebanyak 40 perusahaan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang berupa data sekunder dan termasuk dalam kategori data *time series* yang diambil selama periode 2014-2016. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan dan ringkasan kinerja yang diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi. Studi Pustaka, yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti jurnal, buku, literatur dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan dan ringkasan kinerja perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2016.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini meneliti *current ratio* (proksi dari variabel rasio likuiditas), *return on equity* (proksi dari variabel rasio profitabilitas), *debt to*

equity ratio (proksi dari variabel rasio *leverage*), *total asset turnover* (proksi dari variabel rasio aktivitas), serta variabel *return* saham. Analisis statistik deskriptif yang dilakukan untuk memberikan gambaran data dari seluruh variabel.

Tabel 2: Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Likuiditas	120	21,00	1907,00	2775,5417	305,39144
Profitabilitas	120	56,00	-15,00	9,6083	9,71467
Leverage	120	200,00	2,00	67,8500	47,16441
Aktivitas	120	82,00	1,00	21,6750	11,19136
Return Saham	120	180,29	-66,96	6,7543	37,68764

Sumber: Data diolah

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai minimum rasio likuiditas (X1) sebesar 21,00 dan maksimum sebesar 1907,00. Hal tersebut menunjukkan besarnya rasio likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang diteliti pada penelitian ini berkisar antara 21,00 sampai dengan 1907,00 dengan nilai rata-rata sebesar 277,5417 dan *standart* deviasi sebesar 305,39144. Rasio likuiditas tertinggi terjadi pada PT Metro Realty Tbk (MTSM) tahun 2016 sedangkan rasio likuiditas terendah terjadi pada PT. Bukit Darmo Property Tbk (BKDP) tahun 2016.

Pada rasio profitabilitas (X2) terdapat nilai minimum sebesar -15,00 dan maksimum sebesar 41,00. Hal tersebut menunjukkan besarnya rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *return on equity* (ROE) pada perusahaan *property* dan *real estate* yang menjadi *sampel* penelitian berkisar antara -15,00 sampai dengan 41,00 dengan nilai rata-rata sebesar 9,6083 dan *standart* deviasi sebesar 9,71467. Rasio profitabilitas tertinggi terjadi pada PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) tahun 2016 sedangkan rasio likuiditas terendah terjadi pada PT. Cowell Development Tbk (COWL) tahun 2015.

Pada rasio *leverage* (X3) terdapat nilai minimum sebesar 2,00 dan maksimum sebesar 202,00. Hal tersebut menunjukkan besarnya rasio *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* (DER) pada perusahaan *property* dan *real estate* yang

menjadi *sampel* penelitian berkisar antara 2,00 sampai dengan 202,00 dengan nilai rata-rata sebesar 67,8500 dan *standart* deviasi sebesar 47,16441. Rasio *leverage* tertinggi terjadi pada PT Cowell Development Tbk (COWL) tahun 2015 sedangkan rasio *leverage* terendah terjadi pada PT. Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA) tahun 2014.

Pada rasio aktivitas (X4) terdapat nilai minimum sebesar 1,00 dan maksimum sebesar 83,00. Hal tersebut menunjukkan besar *total asset turnover* yang merupakan proksi dari rasio aktivitas pada perusahaan *property* dan *real estate* yang menjadi *sampel* penelitian berkisar antara 1,00 sampai dengan 83,00 dengan nilai rata-rata sebesar 21,6750 dan *standart* deviasi sebesar 11,19136. Rasio aktivitas tertinggi terjadi pada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) tahun 2014 sedangkan rasio aktivitas terendah terjadi pada PT. Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA) tahun 2015.

Pada *return* saham (Y) terdapat nilai minimum sebesar -66,96 dan maksimum sebesar 113,33. Hal tersebut menunjukkan besar rasio *return* saham pada perusahaan *property* dan *real estate* yang menjadi *sampel* penelitian berkisar antara -66,96 sampai dengan 180,29 dengan nilai rata-rata sebesar 6,7543 dan *standart* deviasi sebesar 37,68764. *Return* saham tertinggi terjadi pada PT Lippo Karawaci Tbk (LPCK) tahun 2014 sedangkan *return* saham terendah pada PT. Metro Realty Tbk (MTSM) tahun 2015.

4.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi secara normal. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) variabel residual berada di atas 0,05 atau 5%.

Tabel 3: Hasil Uji Normalitas
(Uji Komogrov-Smirnov)

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig (2-tailed)	0,137

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil analisis, besarnya nilai uji Normalitas menggunakan uji Kolmogrov-smirnov (K-S) menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,137 sehingga dapat disimpulkan dari hasil tersebut bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui bahwa pada model regresi yang digunakan tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Jika dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut baik. Nilai *tolerance* serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa dalam model regresi tersebut terjadi multikolinieritas atau tidak.

Dapat disimpulkan bahwa pada model tidak terjadi multikolinieritas Jika nilai *tolerance* $\leq 0,1$ dan nilai VIF ≥ 10 maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Berdasarkan tabel 4 berikut ini menunjukkan bahwa nilai *tolerance* setiap variabel $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi dan model tersebut layak untuk digunakan pada penelitian.

Tabel 4: Uji Multikolinieritas

	Model	Tolerance	VIF
1	Likuiditas	0,738	1,355
	Profitabilitas	0,568	1,761
	Leverage	0,820	1,219
	Aktivitas	0,573	1,745

Sumber: Data diolah

4.1.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui bahwa pada model regresi linear terjadi korelasi atau tidak antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). Penelitian ini menggunakan *lagrange Multiplier* atau *Breusch Godfrey Test* dalam uji autokorelasi.

Tabel 5.: Hasil Uji Autokorelasi
(Lagrange Multiplier)

	Model	Sig.
1	Lagrange Residual persamaan 1	0.020

Sumber: Data diolah

Pada uji *Langrange multiplier* untuk pengujian normalitas menyatakan bahwa jika *lagrange* residual berpengaruh terhadap residual secara signifikan (Sig. < 0,05) menunjukkan bahwa terjadi autokorelasi, sedangkan data dikatakan bagus jika tidak terjadi autokorelasi (Sig. > 0,05).

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa Sig. lagrange residual terhadap residual sebesar 0,020 (Sig. < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi linier tidak terjadi autokorelasi karena *lagrange residual* tidak berpengaruh signifikan terhadap *residual*.

4.1.4 Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui bahwa spesifikasi model yang digunakan pada penelitian ini sudah benar atau belum. Pada penelitian ini untuk melakukan uji linearitas menggunakan uji *lagrange multiplier*.

Tabel 6: Uji Linearitas
(Uji Lagrange Multiplier)

Model	R Square
1	0,002

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan nilai R² sebesar 0,002 dengan jumlah observasi 120, maka besarnya nilai $c^2_{hitung} = 120 \times 0,002 = 0,24$ dan tingkat signifikansi 0,05 didapat dilai c^2_{tabel} sebesar 141,03. Oleh karena nilai c^2_{hitung} lebih kecil dari c^2_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa model yang benar adalah model linear.

4.1.5 Uji Heteroskedatisitas

Dalam Uji Heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji bahwa dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual atau tidak dari satu pengamatan yang lain ke pengamatan lainnya. Penelitian ini menggunakan uji *white* dalam menguji heteroskedatisitas.

Tabel 7: Uji Heteroskedatisitas (Uji *White*)

Model	R Square
1	0,100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 7 dengan nilai R square sebesar 0,100 dengan jumlah observasi sebanyak 120, maka besarnya nilai $c^2_{hitung} = 120 \times 0,100 = 12$. Nilai ini dibandingkan dengan c^2_{tabel} dengan $df = (n - k) = 120 - 10 = 110$. Dan tingkat signifikan 0,05 didapat nilai c^2_{tabel} sebesar 135,48. Oleh karena nilai c^2_{hitung} lebih kecil dari c^2_{tabel} . Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedatisitas dan model regresi layak digunakan untuk memprediksi *return* saham.

4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui bahwa hubungan antara variabel-variabel baik variabel bebas dan terikat secara simultan maupun secara parsial.

Tabel 8: Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Keterangan	Unstandardized Coefficients (Beta)
1	(constant)	-18,406
	Rasio Likuiditas	-0,001
	Rasio Profitabilitas	0,657
	Rasio Leverage	0,058
	Rasio Aktivitas	0,705

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 8 dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -18,406 - 0,001 X_1 + 0,657 X_2 + 0,058 X_3 + 0,705 X_4$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat menunjukkan arah tiap variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Nilai konstanta sebesar -18,406 yang mempunyai arti apabila semua variabel *independen* sama dengan nol, maka *return* saham perusahaan *property* dan *real estate* bernilai sebesar -18,406.

Rasio likuiditas mempunyai koefisien regresi sebesar -0,001 mempunyai arti bahwa setiap kenaikan *current rasio* (proksi dari rasio likuiditas) sebesar 1 satuan maka *return* saham perusahaan *property* dan *real estate* turun sebesar 0,001 dengan asumsi *ceteris paribus* atau faktor-faktor yang lain tetap.

Rasio *leverage* mempunyai koefisien regresi sebesar 0,058 yang berarti bahwa setiap kenaikan *debt to equity ratio* (proksi dari rasio *leverage*) sebesar 1 satuan maka *return* saham perusahaan *property* dan *real estate* naik sebesar 0,058 dengan asumsi faktor-faktor yang lain tetap atau *ceteris paribus*. Rasio aktivitas mempunyai koefisien regresi sebesar 0,705 yang berarti bahwa setiap kenaikan rasio aktivitas sebesar 1 satuan maka *return* saham perusahaan *property* dan *real estate* naik sebesar 0,705 dengan asumsi *ceteris paribus*.

4.2.1 Uji f

Uji F menguji signifikan model regresi dengan tujuan untuk membuktikan secara statistik keseluruhan koefisien regresi yang digunakan dalam analisis ini signifikan, dengan nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05.

Tabel 9: Uji F

Model	F	Sig
Regresion Residual Total	4,133	0,004

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan nilai F hitung sebesar 4,133 dan signifikansi sebesar 0,004, menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari yang diharapkan yaitu sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas, profitabilitas, *leverage* dan aktivitas berpengaruh simultan terhadap *return* saham perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.

4.2.2 Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antar variabel *independen* dengan variabel *dependen* yang pada dasarnya pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana variabel *dependen* dipengaruhi oleh variabel penjelas/*independen* (Ghozali, 2011).

Tabel 10:

Pengaruh Rasio Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage*, dan Aktivitas Terhadap *Return* Saham

	t	Sig
(Constant)	-1,991	0,49
Rasio Likuiditas	-0,116	0,908
Rasio Profitabilitas	1,463	0,146
Rasio <i>Leverage</i>	0,760	0,449
Rasio Aktivitas	1,818	0,072

Sumber: Data diolah

Jika t hitung > t tabel, sehingga hipotesis diterima dan sebaliknya jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Besarnya angka t tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-2)$ atau $(120 - 5) = 115$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 1,66.

Berdasarkan tabel 10 variabel rasio likuiditas mempunyai nilai t hitung -0,116 dengan profitabilitas sebesar 0,908. Nilai signifikansi $0,908 > 0,05$ dan nilai - t hitung > - t tabel yaitu sebesar $-0,116 > -1,66$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *return* saham perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016, jadi hipotesis pertama ditolak.

Hasil ini tidak mendukung penelitian oleh Prihantini (2009) yang menemukan rasio likuiditas berpengaruh positif namun mendukung hasil penelitian dari Subalono (2009), Aditya dan Isnurhadi (2013) dan Nugroho (2012) yang menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *return* saham. *Current ratio* (CR) sebagai alat ukur rasio likuiditas tidak mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. *Current ratio* (CR) menunjukkan nilai yang tinggi, artinya kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva lancar kurang begitu baik dan efisien, perusahaan tidak mengoptimalkan aktiva lancar yang dimilikinya. Hal ini terjadi karena adanya aktiva yang tidak dioptimalkan menimbulkan beban tetap yang justru akan mengurangi keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan menyebabkan *current ratio* sebagai alat ukur likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap *return* saham dari perusahaan.

Jika aktiva lancar dapat dikelola oleh perusahaan secara optimal maka *current ratio* mungkin akan berpengaruh signifikan terhadap *return* saham. Sublono (2009) tidak menemukan adanya pengaruh rasio likuiditas dikarenakan investor dalam melakukan investasi mungkin tidak memperhatikan rasio perusahaan. *Current ratio* dengan membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar yang dimiliki perusahaan mungkin dipandang investor memiliki beberapa keterbatasan.

Variabel rasio profitabilitas mempunyai nilai t hitung 1,463 dengan profitabilitas sebesar 0,146. Nilai signifikansi $0,146 > 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel yaitu sebesar $1,463 < 1,66$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rasio profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *return* saham perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016, jadi hipotesis kedua ditolak. Hasil ini tidak mendukung penelitian dari Aditya dan Isnurhadi (2013), Subalono (2009) serta I Gusti Agung.

Ayu Siska Suandewi dan I Putu Sudana (2016) yang menemukan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh positif namun mendukung hasil penelitian Rita rosiana (2009) serta Ayu Nurhayani Aisah dan Kastawan Mandala (2016) yang sama-sama menemukan bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *return* saham.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Return On Equity* (ROE) tidak berpengaruh terhadap *return* saham, hal tersebut berarti tinggi rendahnya ROE tidak akan mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi, karena apabila perusahaan mampu mengelola modalnya dengan baik maka akan mampu menghasilkan profit.

Maka tidak semua perusahaan yang modalnya menurun akan berpengaruh pada *return* saham perusahaan tersebut. Variabel rasio *leverage* mempunyai nilai t hitung 0,760 dengan profitabilitas sebesar 0,449. Nilai signifikansi $0,449 > 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel yaitu sebesar $0,760 < 1,66$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel rasio *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return* saham perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016, jadi hipotesis ketiga ditolak.

Hasil ini tidak mendukung penelitian oleh Prihantini (2009) yang menemukan rasio *leverage* berpengaruh negatif dan hasil penelitian dari I Gusti Agung Ayu Siska Suandewi dan I Putu Sudana (2016) yang menemukan bahwa rasio *leverage* berpengaruh positif. Namun hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Subalno (2009), Aditya dan Isnurhadi

(2013) dan Nugroho (2012) yang juga menemukan bahwa rasio *leverage* tidak berpengaruh terhadap *return* saham.

Debt to Equity Ratio (DER) sebagai alat ukur *leverage* mencerminkan proporsi antara total hutang dan total modal sendiri Investor dalam melakukan investasi mungkin tidak memandang penting penggunaan hutang maupun pengambilan bunga dan pokok bunga yang pada akhirnya tidak mempengaruhi pendapat investor terhadap keuntungan di masa yang akan datang, sehingga menyebabkan rasio *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return* saham (Subalno, 2009).

Variabel rasio aktivitas mempunyai nilai t hitung 1,818 dengan profitabilitas sebesar 0,072. Nilai signifikansi $0,072 > 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu sebesar $1,818 > 1,66$ serta nilai positif pada koefisien *unstandardize* (B), maka dapat disimpulkan bahwa variabel rasio aktivitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *return* saham perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016, jadi hipotesis keempat ditolak.

Hasil ini mendukung penelitian oleh Widodo (2007) yang menemukan bahwa rasio aktivitas berpengaruh positif namun tidak mendukung hasil penelitian dari Subalno (2009), Aditya dan Isnurhadi (2013), Nugroho (2012) yang menemukan rasio aktivitas berpengaruh negatif terhadap *return* saham.

Perusahaan yang mampu mengelola aktivitya secara optimal dan dapat meningkatkan penjualannya akan lebih menarik untuk investor, karena hal tersebut akan meningkatkan *return* saham perusahaan tersebut serta meningkatnya harga saham perusahaan (Daljono et al, 2013).

4.2.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (Adjusted R²) mengukur persentase variasi total dalam variabel dependen yang dijelaskan dari seluruh variabel independen dalam persamaan regresi linier berganda.

Tabel 11.
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	Adjusted R Square
1	0.095

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan nilai Adjusted R² adalah sebesar 0,095, menunjukkan bahwa 9,5% *return* saham dipengaruhi oleh rasio likuiditas, profitabilitas, *leverage* dan aktivitas, sedangkan 90,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Rasio likuiditas yang diukur dengan *Current Ratio* tidak berpengaruh terhadap *return* saham. Rasio profitabilitas yang diukur dengan *return on equity* tidak berpengaruh terhadap *return* saham. Rasio *leverage* diukur dengan *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap *return* saham. Rasio aktivitas diukur dengan *total asset turnover* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *return* saham.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memiliki beberapa saran yang diajukan yaitu bagi investor atau calon investor sebaiknya lebih memperhatikan rasio aktivitas perusahaan yang diukur dengan *total asset turnover* karena pada hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio tersebut memiliki hubungan positif terhadap *return* saham walau tidak signifikan. Bagi investor dan manajer investasi sebaiknya juga melakukan pendekatan lain seperti faktor di luar kebijakan perusahaan seperti keadaan pasar dan faktor eksternal lain selain analisis rasio sebelum memutuskan kegiatan investasi dalam menilai *return* saham yang akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Bagi peneliti

selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian ini atau melakukan penelitian dengan topik yang sama disarankan untuk menggunakan objek yang lebih luas, menambah periode penelitian yang lebih panjang serta menambah variabel penelitian seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan faktor eksternal lainnya agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas pada *return* saham.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus, Sartono. 2010, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, BPF, Yogyakarta.
- [2] Aisah, Ayu Nurhayani dan Kastawan Mandala. 2016, *Pengaruh Return On Equity, Earning Per Share, Firm Size dan Operating Cash Flow Terhadap Return Saham*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 11, 2016: 6907- 6936, Bali, Jurnal Diakses 25 Oktober 2017 dari unud.ac.id.
- [3] Aditya, Ken dan Isnurhadi. 2013, *Analisis Pengaruh Rasio Lancar, Rasio Perputaran Total Aktiva, Debt to Equity Ratio, Return On Equity dan Earnings Per Share Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di BEI periode 2007-2011*, Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol 11: ISSN 1412-4521, Universitas Sriwijaya, Palembang, Jurnal Diakses 7 November 2017 dari unsri.ac.id.
- [4] Asmi, T., L. 2014, *Current Ratio, Debt to Equity, Total Asset Turnover, Return on Asset, Price to Book Value sebagai Faktor Penentu Return Saham*, Management Analysis Journal 3(2).
- [5] Brigham, Eugene F dan Joel F Houston. 2013, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi Sebelas*, Salemba Empat, Jakarta.
- [6] Fahmi, Irham. 2012, *Analisis Kinerja Keuangan*, Alfabeta, Bandung.
- [7] Harahap, S.S. 2004, *Analisis Kritis Atas*

- Laporan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [8] Jogiyanto. 2010, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE UGM, Yogyakarta, Diakses dari www.bi.go.id.
- [9] Hartono, Jogiyanto. 201, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Kedepalan, BPFE, Yogyakarta.
- [10] Hartono, Jogiyanto. 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis (Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman)*, BPFE, Yogyakarta.
- [11] I Gusti Agung Ayu Siska Suandewi dan I Putu Sudana. 2016, *Rasio-rasio Keuangan dan Return Saham*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.16.1.Juli 2016: 756-780, Jurnal Diakses 7 November 2017 dari unud.ac.id.
- [12] Igantia Manurung. Ruspiondang Rhenata. 2015, *Analisis Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage dan Aktivitas Terhadap Return Saham Studi Empiris di Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2008 sampai Tahun 2013*, Skripsi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Jurnal Diakses 25 Oktober 2017 dari repository.usd.ac.id
- [13] Imam Ghozali. 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, Edisi Kelima*, Universitas Diponegoro, Yogyakarta.
- [14] Kasmir. 2012, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [15] Nugroho, B. and Daljono, D. 2012, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham (Studi Empiris Perusahaan Automotive and Component yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2011) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis)*, Jurnal Diakses 6 November 2017 dari undip.ac.id
- [16] Nugroho, B., Daljono. 2013, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham (Studi Empiris Perusahaan Automotive and Component yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2011)*. Diponegoro Journal of Accounting, 2(1), pp.1-11. Jurnal Diakses 6 November 2017 dari eprints.undip.ac.id
- [17] Parwati, R.R.A. and Sudiarta, G.M. 2016, *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Penilaian Pasar Terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur*, E-Jurnal Manajemen Unud, 5(1), pp.385-413, Jurnal Diakses 7 November 2017 dari unud.ac.id.
- [18] Rosiana, R., Retnowati, W. and Hendro, H. 2014, *Pengaruh Rasio Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio Pasar, Firm Size, Tingkat Suku Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Return Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011)*. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 4 (1), Jurnal Diakses 7 November 2017 dari uinjkt.ac.id.
- [19] Saud. H, dan Pudjiastuti, E. 2004, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- [20] Subalno, S. 2009, *Analisis Pengaruh Faktor Fundamental dan Kondisi Ekonomi Terhadap Return Saham (Study Kasus pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2007)* (Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro), Jurnal Diakses 7 November 2017 dari undip.ac.id.
- [21] Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- [22] Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung.
- [23] Suwarjono. 2005, *Teori Akuntansi Perekayasaan*

Pelaporan Keuangan, Edisi Ketiga, BPFE
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- [24] White, Gerald I., et al. 2002, *The Analysis and Use of Financial Statement*, Third Edition, USA, John Wiley & Sons.Inc
- [25] Widodo, S. 2007, *Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Pasar; Terhadap Return Saham Syariah Dalam Kelompok Jakarta Islamic Index (jii) Tahun 2003–2005 (Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro)*, Jurnal Diakses 28 Oktober 2017 dari undip.ac.id
- [26] Wira Desmond. 2011, *Analisis Fundamental Saham*, Exceed, Jakarta.
- [27] Wolk, et al. 2001, *Signaling, Agency Theory, Accounting Policy Choice*. Accounting and Business Research. Vol. 18. No 69:47-56
- [28] BI 2017; *Indeks Perkembangan Properti Komersial Tahun 2014-2016*, <http://www.bi.go.id/id/Default.aspx>, Diakses Bulan Desember 2017
- [29] IDX 2017; *Rasio Keuangan*, <http://www.idx.co.id>, Diakses Bulan Desember 2017

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Kain Songket Di Kota Palembang

Usnia Wati Keristin

STIE Multi Data Palembang

tityn123@gmail.com

Abstrack: *This study aims to determine the factors that affect the use of accounting information in the small and medium enterprises of Songket in Palembang. This study focuses to test empirically the effect of owner/ manager education, firm age, business scale and adherence to the Act and Government Regulation on the use of accounting information on the small and medium enterprises of Songket in Palembang. The data used is primary data of respondents in which the respondents give written responses as the feedback on the questions given. The method of analysis used in this study is quantitative method through multiple regression analysis. The variables used in this study firm age (X1), business scale (X2), government regulation that is related to small and medium enterprises (UKM) (X3), and accounting information (Y). The results show that firm's age (X1), partially, is found to be negative and insignificant. Meanwhile, the business scale (X2) partially has positive and insignificant in affecting the use of accounting information. Government regulation that is related to small and medium enterprises (X3) is also found to be positive and significant.*

Keywords: *Business Scale and Adherence to The Act And Government Regulation, The Use of Accounting Information.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kain Songket di Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh pendidikan pemilik/ Manajer, umur perusahaan, skala usaha, dan Ketaatan terhadap Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kain Songket di Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan data responden, dimana responden akan memberikan respon tertulis sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diberikan (angket). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan analisis regresi berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendidikan pemilik/Manajer (X1), umur perusahaan (X2), skala usaha (X3), kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang (UU) yang berhubungan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) (X4), dan Informasi akuntansi (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel umur perusahaan (X1) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan, untuk variabel skala usaha (X2) secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan, dan variabel kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang (UU) yang berhubungan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) (X3) berpengaruh positif dan sangat signifikan.

Kata kunci: Umur Perusahaan, Skala Usaha, Kepatuhan Terhadap Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang (UU) yang Berhubungan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Informasi Akuntansi.

1. PENDAHULUAN

Setiap daerah memiliki kebudayaan yang

berbeda-beda dari makanan, pakaian, tarian dan masih banyak lagi. Salah satunya kota Palembang. Sejarah kota Palembang dimulai dari Kerajaan

Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang, salah satunya budaya warisan (kain) tenun yang indah yaitu Kain Songket (Ariska, Windi, 2015). Pada zaman dahulu kain songket hanya digunakan oleh golongan bangsawan dan keluarga kerajaan. Kedudukan dan martabat seseorang tercermin dari motif dan warna kain tenun songket yang dipakai (Iwenk, 2013). Dengan semakin berkembangnya zaman, kain songket tidak hanya dipakai untuk keluarga bangsawan, tetapi dapat dipakai oleh setiap golongan dan menjadi *fashion*.

Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) meningkat cukup besar ditunjukkan dengan besarnya pertumbuhan UKM dan kontribusi UKM terhadap pendapatan Nasional (Kementerian Perdagangan RI, 2013). Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 99% perusahaan di Indonesia adalah UKM. Mereka memberikan kontribusi terhadap GDP sebesar 59% dan kontribusi terhadap lapangan pekerjaan sebesar 97%," (Kementerian Perdagangan RI, 2013).

Pada 2011-2012, UKM tumbuh 2,41% dari total lebih dari 55 juta unit UKM. UKM juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia. Misalnya pada tahun 2011, UKM menciptakan 97,24% pekerjaan atau setara dengan 101 juta orang, dan berkontribusi sebesar 57,94% dari PDB Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2012 kontribusi UKM terhadap lapangan pekerjaan meningkat sebesar 9,16% atau setara dengan 107 juta orang, dan berkontribusi 59,08% dari PDB Nasional (Kementerian Perdagangan RI, 2013). Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan usaha yang padat karya dan tidak membutuhkan persyaratan seperti pendidikan yang tinggi, tidak membutuhkan keahlian yang tinggi, dan masih menggunakan teknologi yang sederhana (Darwanto, 2013).

Umur Perusahaan menentukan cara pandang dan tindakan yang harus diambil dalam upaya mengembangkan usaha yang telah turun temurun. Pemilik usaha harus memiliki pola pikir yang luas dalam menggunakan dan menyediakan informasi akuntansi yang baik (Chandra, 2010). Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peluang yang sangat

besar untuk memperoleh kredit sebagai suntikan modal. Banyak program pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dan perbankan yang bertujuan untuk mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga harus didukung dengan modal yang cukup baik. Modal yang digunakan oleh Usaha Kecil Menengah sebagian besar menggunakan modal pribadi. Pertumbuhan UKM tidak selamanya berjalan dengan baik ada hambatan-hambatan yang muncul dari segi permodalan dan segi manajerial (kemampuan manajemen, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia) (Hamid, 2010). Selain modal pribadi Usaha Kecil Menengah memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya (Kemendag, 2013).

Dalam mengajukan pinjaman, pihak perbankan memerlukan informasi akuntansi yang berkaitan dengan kondisi Usaha Kecil Menengah (UKM). Sistem informasi akuntansi yang kurang memadai mengakibatkan informasi yang kurang memadai (Purnamasari, 2009). Informasi akuntansi sangat diperlukan dalam pertanggung-jawaban, manajemen keuangan, pengelolaan usaha, dan pengambilan keputusan manajerial. Kekurangan informasi akuntansi dalam manajemen perusahaan sangat membahayakan perusahaan kecil, ketika kondisi keuangan yang memburuk dan pencatatan yang kurang baik akan membatasi akses dalam memperoleh informasi (Holmes dan Nicholls, 1989).

Lungu, Caraiani, Dascalu (2007) dan Morris (2007) menyatakan bahwa salah satu sistem informasi yang sangat dibutuhkan adalah sistem informasi akuntansi. Keterbatasan UKM dalam menggunakan dan menghasilkan informasi akuntansi mengakibatkan kegagalan dalam pengembangan usaha. Pemerintah telah menegaskan pentingnya pencatatan dan penyelenggaraan informasi akuntansi pada UKM (Fuad, 2013).

Informasi akuntansi sangat berpengaruh terhadap kinerja usaha, karena dari informasi akuntansi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sangat

bermanfaat untuk mengetahui informasi akuntansi sangat berpengaruh terhadap kinerja usaha, karena dari informasi akuntansi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sangat bermanfaat untuk mengetahui struktur modal dan keuntungan dalam satu periode (Pacter, 2007). Schiebel (2006) menyatakan, informasi akuntansi sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan-pilihan dari alternatif-alternatif yang telah disusun oleh pengusaha. Penggunaan informasi akuntansi digunakan untuk perencanaan strategis, pengawasan manajemen dan pengawasan operasional. Informasi akuntansi yang digunakan dalam perusahaan kecil dan menengah secara garis besar adalah (Holmes dan Nicholls, 1989):

1. *Statutory Information*, yaitu informasi yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia,
2. *Budget Information*, adalah informasi yang berkaitan dengan anggaran perusahaan, dimana anggaran merupakan sistem pengendali dan perencanaan manajemen dalam suatu organisasi (Welch, Hilton dan Gordon, 1996) dan strategi yang akan digunakan dalam jangka pendek (Hansen dan Mowen, 2003), dan
3. *Additional information*, adalah informasi yang digunakan dalam pengelolaan perusahaan dalam mengambil keputusan.

Sistem informasi akuntansi yang kurang memadai mengakibatkan informasi yang kurang memadai (Purnamasari, 2009). Informasi akuntansi sangat diperlukan dalam pertanggungjawaban, manajemen keuangan, pengelolaan usaha, dan pengambilan keputusan manajerial. Kekurangan informasi akuntansi dalam manajemen perusahaan sangat membahayakan perusahaan kecil, ketika kondisi keuangan yang memburuk dan pencatatan yang kurang baik akan membatasi akses dalam memperoleh informasi (Holmes dan Nicholls, 1989).

Dalam perkembangannya, pencatatan keuangan yang dilakukan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak sistematis dan belum ada pemisahan

antara uang pribadi dan uang perusahaan. Masih banyak UKM yang belum melakukan pembukuan dengan baik karena keterbatasan pengetahuan dalam melakukan pembukuan. Hal ini berakibat pada pemanfaatan kredit yang diterima tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal karena keterbatasan akses dari UKM dan sulitnya UKM memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (KEMENDAG, 2013).

Umur perusahaan berpengaruh terhadap penyediaan informasi akuntansi. Semakin lama usaha berdiri, maka semakin banyak informasi akuntansi statutori, informasi akuntansi anggaran dan informasi tambahan akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil terhadap manajemen keuangan dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan perusahaan (Solovina, 2003). Umur usaha menentukan cara pandang dan tindakan yang harus diambil dalam upaya mengembangkan usaha yang telah turun temurun. Pemilik usaha harus memiliki pola pikir yang luas dalam menggunakan dan menyediakan informasi akuntansi yang baik (Chandra, 2010).

Skala usaha berhubungan positif terhadap tingkat penyediaan informasi (Holmes dan Nicholls, 1989). Menurut Holmes dan Nicholls (1989) tingkat informasi akuntansi yang disediakan tergantung pada skala usaha yang diukur dengan perputaran dan jumlah karyawan. Hasil penelitian Holmes dan Nicholls (1989:3) menyatakan: "... apabila skala meningkat, maka proporsi perusahaan dalam menyediakan informasi akuntansi statutori, anggaran, informasi tambahan juga meningkat...".

Besarnya jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh oleh UKM menunjukkan perputaran modal yang dimiliki oleh UKM. Semakin besar pendapatan atau penjualan yang dilakukan oleh UKM maka semakin kompleksitas informasi akuntansi yang dibutuhkan (Kristian, 2010).

Dalam mendirikan usaha secara legal diperlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang.

Pemilik Usaha Kecil Menengah dapat memperoleh SIUP setelah pemilik usaha menanda tangani dokumen dan persyaratan yang terdapat pada Lampiran II Permendag Nomor 36 Tahun 2007, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Izin Gangguan (Pasal 1 angka 3 Permendagri 27/2009), dan kelengkapan lainnya.

Di kota Palembang banyak sekali terdapat Usaha Kecil Menengah (UKM). Salah satu UKM yang terdapat di kota Palembang adalah UKM Kain Songket. Usaha Kecil Menengah (UKM) kain songket tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga turun temurun.

Umur perusahaan UKM songket tergolong lama membuat usaha kain songket harus dapat bersaing dengan perkembangan zaman. Dalam praktek dilapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya perusahaan kecil dan menengah yang tidak membuat laporan keuangan, seperti neraca, laporan rugi laba, biaya produksi, perubahan ekuitas, arus kas (Fuad, 2013).

Hal yang terjadi bahwa perusahaan hanya berdasarkan transaksi yang dilakukan dilapangan, tanpa mengetahui seberapa besar keuntungan atau kerugian yang diterima tiap bulan/tahun, seberapa besar harga per-unit dengan mengambil keuntungan berapa persen, dan masih banyak yang lainnya. Hal tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kontijensi

Pendekatan teori kontijensi mengidentifikasi bentuk-bentuk optimal pengendalian organisasi di bawah kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang baik, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan dalam mengambil keputusan. Pendekatan akuntansi pada akuntansi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi manajemen secara universal selalu tepat

untuk dapat diterapkan pada setiap organisasi, tetapi hal ini tergantung pada faktor kondisi atau situasi yang ada dalam organisasi.

Menurut Otley (1980) pendekatan kontinjensi diguna untuk menganalisis dan mendesain sistem kontrol, khususnya di bidang sistem akuntansi manajemen.

Beberapa peneliti dalam bidang akuntansi manajemen melakukan pengujian untuk melihat hubungan variabel-variabel kontekstual seperti ketidakpastian lingkungan, ketidakpastian tugas, struktur dan kultur organisasional, ketidakpastian strategi dengan desain sistem akuntansi manajemen. Tingkat kebutuhan para pengguna informasi akuntansi dipertimbangkan dalam penyajian informasi akuntansi. Kegunaan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya.

Secara umum teori ini menyatakan bahwa perancangan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen tergantung karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan dimana sistem tersebut akan diterapkan (Fisher, 1995). Teori ini merespon pendekatan *universalistic* yang menyatakan bahwa suatu sistem pengendalian bisa diterapkan dalam karakteristik perusahaan apapun dan kondisi lingkungan dimana saja. Pendekatan *universalistic* tersebut mendasarkan pada *scientific management theory* (Hidayati, 2002).

2.2 Informasi Akuntansi

Informasi akuntansi sangat berguna bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang dinamis dan kompetitif karena informasi akuntansi membantu para Manajer dalam mengintegrasikan inisiatif operasional dalam perencanaan strategi jangka panjang (Ismail and King, 2005). Agar data keuangan dapat dimanfaatkan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan, maka data tersebut harus disusun dengan baik.

Holmes dan Nicholls (1989) dalam Astuti (2007) mengklasifikasikan informasi akuntansi dalam tiga jenis yang berbeda-beda menurut manfaatnya bagi para pemakai, yaitu:

1. Informasi Akuntansi Statutori (*Statutory Accounting Information*) merupakan informasi yang harus disiapkan sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Informasi Anggaran (*Budgetary Information*) merupakan informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk anggaran yang berguna bagi pihak internal dalam perencanaan, penilaian, dan pengambilan keputusan.
3. Informasi Tambahan merupakan informasi akuntansi lain yang disiapkan perusahaan guna meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, seperti laporan gaji karyawan, laporan jumlah produksi dan laporan biaya produksi.

2.3 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) tidak lepas dari Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sistem informasi manajemen adalah sistem yang merekam, menyimpan dan memutakhirkan data dalam suatu organisasi sehingga dapat menyesuaikan informasi yang relevan dan tepat waktu dalam mengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dalam proses bisnis, karena sistem informasi akuntansi mengidentifikasi, mengukur, dan mencatat proses bisnis dalam suatu model sehingga informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan (Diana, 2011).

2.4 Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil Menengah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 telah di definisikan tentang apa itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UKM.

2.4.1 Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)

Usaha Kecil Menengah adalah peluang usaha produktif yang berdiri sendiri milik orang perorangan

atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU ini.

2.4.2 Kriteria UKM Berdasarkan Pendapatan Tahun

- a. Peluang usaha mikro memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omsetnya maksimal Rp 300 juta/tahun.
- b. Peluang usaha kecil memiliki aset > Rp 50 juta- Rp 500 juta dengan omset > Rp 300 juta-Rp 2,5 miliar/tahun
- c. Peluang usaha menengah memiliki aset > Rp 500 juta-Rp 10 miliar dengan omset > Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar/tahun.

2.4.3 Kriteria UKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

- a. Usaha mikro memiliki jumlah tenaga kerja < 5 orang
- b. Usaha kecil memiliki tenaga kerja 5 s.d 19 orang
- c. Usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang
- d. Usaha besar diatas 100 orang.

2.4.4 Kriteria UKM Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2008

- a. Usaha mikro memiliki tenaga kerja lebih kecil dari 4 (empat) orang dan sudah termasuk dengan tenaga kerja yang tidak dibayar
- b. Usaha kecil memiliki tenaga kerja 5-19 orang tenaga kerja
- c. Usaha menengah memiliki tenaga kerja 20-99 orang tenaga kerja.

2.5 Skala Perusahaan

Skala usaha dalam UMK dapat dilihat dari jumlah karyawan yang dipekerjakan dan besarnya pendapatan yang diperoleh oleh UKM dalam satu periode akuntansi (Nicholl and Holmes, 1989). Besarnya jumlah pendapatan atau penjualan yang

diperoleh oleh UKM menunjukkan perputaran modal yang dimiliki oleh UKM. Semakin besar pendapatan atau penjualan pertahun yang dilakukan oleh UKM maka semakin kompleksitas informasi akuntansi yang dibutuhkan (Kristian, 2010).

2.6 Umur Perusahaan

Usaha Kecil Menengah (UKM) songket tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga turun temurun. Umur usaha songket yang tergolong lama membuat usaha songket sulit bersaing jika tidak disesuaikan dengan perkembangan jaman. Umur usaha menentukan cara pandang dan tindakan yang harus diambil dalam upaya mengembangkan usaha yang telah turun temurun. Pemilik usaha harus memiliki pola pikir yang luas dalam menggunakan dan menyediakan informasi akuntansi yang baik (Chandra, 2010).

Keterbatasan SDM dalam mengadopsi perkembangan teknologi baru menyebabkan produk yang dihasilkan sulit untuk bersaing (Hafsah, 2004). Dalam mengembangkan usaha pemimpin usaha akan memperoleh banyak pengalaman baik dari dalam usaha maupun diluar usaha sesuai dengan jenjang jabatan yang dimiliki oleh karyawan. Semakin lama seorang pemimpin usaha, maka semakin besar pengalaman yang akan diperoleh (Astuti, 2007).

2.7 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan telah di teliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologi dan sosiologi yang menekankan pada proses sosialisasi yang mempengaruhi perilaku ketaatan seorang individu (Septiana, 2005). Menurut Tyler (Septiana, 2005) terdapat dua perspektif instrumen mengenai kepatuhan pada hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumen mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seorang individu akan mematuhi hukum yang sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moral personal (*normative commitment through legitimacy*) diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan karena otoritas penyusunan hukum memiliki hak untuk mendikte perilaku. Dalam perspektif normatif, teori kepatuhan dapat diterapkan dalam bidang akuntansi (Septiana, 2005).

Dalam penelitian ini teori kepatuhan terhadap ketaatan pada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) tentang Usaha Kecil (UU No. 9 tahun 1995), tentang Ketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003), dan tentang Usaha Kecil dan Menengah (UU No. 20 Tahun 2008).

2.8 Kepatuhan Terhadap Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang Berhubungan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu bertahan di tengah ancaman krisis ekonomi. Saat ini, banyak sekali berdiri UKM dari berbagai bidang, mulai kuliner hingga kerajinan. Di Indonesia, UKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasal 6 ayat 2 dan 3 berbunyi:”usaha kecil memiliki kekayaan bersih Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih Rp 500 juta hingga Rp10 miliar”.....

Setelah memperoleh akta pendirian usaha, pengusaha membutuhkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), penanggung jawab dan surat keterangan dari Kelurahan setempat untuk urus legalitas. Dokumen-dokumen diatas dibutuhkan untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditujukan ke Dinas Perdagangan masing-masing. Setelah mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), perusahaan harus mengurus surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP merupakan sebuah catatan resmi perusahaan dan jenis usahanya. Surat ini bisa diurus di kantor pendaftaran perusahaan di Dinas Perdagangan setempat. TDP berlaku selama 5 tahun. Pelaku UKM harus mengurus surat izin tempat

usaha. Perizinan UKM diatur dalam Peraturan Presiden No. 98 tahun 2014.

Surat izin usaha memberikan kekuatan dan legalitas bagi pelaku UKM dan memberikan kepercayaan kepada konsumen. Surat izin usaha merupakan wujud kepatuhan terhadap hukum usaha yang ada di negara kita. Selain perizinan para pelaku UKM harus mematuhi peraturan/hukum dalam hal ini menyangkut melaksanakan kewajiban standar terhadap konsumen dengan memberikan produk dan layanan yang bermutu, terhadap pekerja dengan memberikan hak-haknya seperti membayar upah, memberikan upah lembur, memberikan waktu istirahat dsb (UU No.13 Tahun 2003).

Demikian juga dalam melakukan kewajiban membayar pajak dan melakukan pengelolaan limbah atau sampah dari proses produksi (Gomulia, 2014).

2.9 Penelitian Terdahulu

Holmes dan Nichols (1988), menganalisis penggunaan informasi akuntansi perusahaan kecil di Australia. Penelitian menunjukkan bahwa penyiapan informasi akuntansi hanya untuk laporan pajak dan laporan tambahan secara *statutory*. Penggunaan informasi non- *statutory* sangat kecil digunakan dalam pelaporan. Penyiapan informasi akuntansi oleh pihak eksternal dan internal terdapat perbedaan.

Holmes dan Nichols membagi informasi akuntansi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *statutory*, *budget*, dan *additional*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran usaha, masa memimpin Manajer, sektor industri, dan pendidikan pemilik/Manajer berpengaruh terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi.

Holmes dan Nichols (1989), menganalisis tingkat penyiapan/penggunaan informasi oleh pemilik/Manajer perusahaan kecil dalam mengambil keputusan. Variabel yang digunakan skala usaha, masa memimpin Manajer, sektor industri, dan pendidikan Manajer/pemilik. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan

pada penyiapan informasi akuntansi untuk pihak eksternal dan internal. Selain itu terdapat permintaan informasi akuntansi yang sangat besar dari pemilik/Manajer kepada pihak eksternal dari pada pihak internal perusahaan. Pihak internal perusahaan hanya menyiapkan informasi tambahan.

Murniati (2002), menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil dan menengah di Semarang. Penelitian ini menggunakan 238 perusahaan. Variabel yang digunakan masa memimpin, pendidikan pemilik, pelatihan akuntansi, sektor industri, umur perusahaan, dan skala usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa memimpin, pelatihan akuntansi, umur perusahaan, skala usaha, kecuali sektor industri berpengaruh signifikan terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil dan menengah.

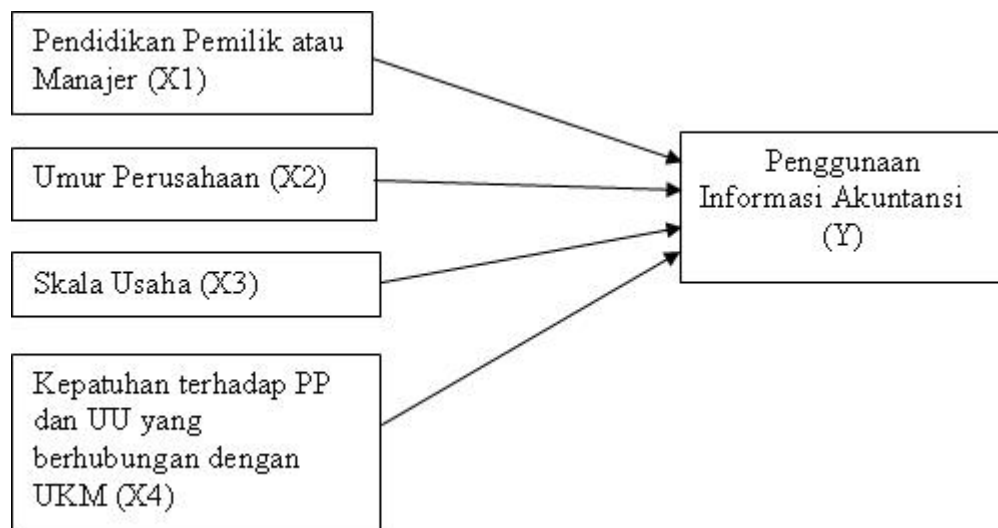
St. Vena Purnamasari, Agnes Advensia Chrismastuti, dan Stephana Dyah Ayu R. (2009), menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi perusahaan kecil dan menengah (studi di Jawa Tengah). Penelitian ini menggunakan variabel masa memimpin, pendidikan pemilik/manajer, pelatihan akuntansi, sektor industri, umur perusahaan, skala usaha, status wajib pajak, struktur organisasi, status binaan perusahaan, bidang pendidikan Manajer perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat penyiapan informasi akuntansi UKM di Jawa Tengah masih rendah (jarang). Penyiapan informasi akuntansi di Jawa Tengah dipengaruhi oleh masa jabatan manajer/pemilik, tingkat pendidikan Manajer/pemilik perusahaan, dan penggunaan informasi akuntansi oleh perusahaan. Sedangkan untuk informasi akuntansi dipengaruhi oleh faktor masa jabatan Manajer/pemilik perusahaan, sektor industri, usia perusahaan, skala usaha, status wajib pajak, dan pendelegasian wewenang.

Hariyadi (2013), menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi

akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang jenis usaha makanan di kota Tanjungpinang. Variabel yang digunakan pendidikan pemilik/ Manajer perusahaan, umur perusahaan, skala usaha, dan masa memimpin pendidikan pemilik/ Manajer perusahaan, umur perusahaan, skala usaha, dan masa memimpin. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang negatif variabel independen secara sendiri-sendiri yakni pendidikan pemilik/Manajer perusahaan, umur perusahaan dan skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sedangkan masa memimpin perusahaan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Linear Diah Sitoresmi dan Fuad (2013), menganalisis faktor-faktorm yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Kub Sido Rukun Semarang). Variabel yang digunakan dalam Pendidikan pemilik, skala usaha, umur perusahaan dan pelatihan akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan pemilik, skala usaha, umur perusahaan dan pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sedangkan ketidak-pastian lingkungan terbukti tidak memoderasi pengaruh pendidikan pemilik, skala usaha, umur perusahaan dan pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Informasi merupakan sumber daya yang penting dalam proses pengelolaan perusahaan guna kelangsungan usaha perusahaan. Informasi tersebut dapat berupa informasi akuntansi keuangan dan informasi manajemen. Keduanya merupakan *output* dari akuntansi yang notabeneanya merupakan sebuah sistem. Informasi-informasi tersebut dapat digunakan oleh berbagai pihak, diantaranya oleh pihak internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Penggunaan informasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu skala usaha, umur perusahaan, dan pendidikan Manajer.

Menurut Reeve (2009) informasi yang khusus ditujukan untuk kepentingan manajemen disebut dengan informasi manajemen, yaitu:

- (1) perencanaan;
- (2) implementasi; dan
- (3) pengendalian.

Holmes dan Nicholls (1989) mengklasifikasikan informasi berdasarkan manfaat bagi pemakainya ke dalam tiga jenis, yaitu :

- (1) *Tatutory accounting information*, merupakan informasi yang harus disiapkan sesuai dengan peraturan yang ada;
- (2) *Budgetary information*, yaitu informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk anggaran yang berguna bagi pihak internal perusahaan dalam perencanaan, penilaian dan pengambilan suatu keputusan;

(3) *additional accounting information*, yaitu informasi akuntansi lainnya yang disiapkan perusahaan guna meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan Manajer.

UKM sebagai salah satu entitas bisnis yang tumbuh pesat di kalangan masyarakat dan mampu menunjukkan peran yang sangat berarti dalam perekonomian Indonesia. Namun, dalam pengembangannya UKM menghadapi suatu permasalahan yaitu kurangnya kemampuan untuk berkembang dari sebuah perusahaan kecil menjadi perusahaan besar. Selain itu, tidak sedikitnya UKM yang gulung tikar karena tidak mampu menghadapi kerasnya persaingan dunia bisnis, bahkan tidak sedikit pula UKM yang bangkrut karena imbas dari krisis ekonomi global.

Peterson, Kometsky dan Ridgway (1993); Mook (2000), mengungkapkan bahwa kelemahan manajemen keuangan adalah merupakan salah satu alasan utama kegagalan UKM. Kemampuan akuntansi seorang Manajer/ pemilik merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan UKM (Wichman, 1983).

Berdasarkan penelitian Holmes dan Nichols (1989) skala usaha berpengaruh positif terhadap tingkat penggunaan informasi akuntansi. Hasil penelitian Holmes dan Nichols (1989) menyatakan bahwa tingkat informasi akuntansi yang disediakan tergantung pada skala usaha, yang diukur dengan jumlah pendapatan atau hasil penjualan dan jumlah karyawan. Apabila skala usaha meningkat, makaproporsi perusahaan dalam penggunaan informasi akuntansi statutori, anggaran dan informasi tambahan juga meningkat.

Hal tersebut dikarenakan, semakin meningkatnya jumlah karyawan dengan klasifikasi yang sudah ada, maka kebutuhan akan informasi akuntansi akan semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan perusahaan, tentunya karyawan membutuhkan informasi untuk mengetahui hak-haknya, iklim atau atmosfer yang terjadi dalam perusahaan, jaminan sosial yang dapat dinikmati, dan sebagainya (Sofyan Safri, 2001).

Holmes dan Nicholls (1989) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penggunaan dan penyiapan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang berdiri selama 10 tahun atau kurang akan menyediakan lebih banyak informasi akuntansi statutori, informasi akuntansi anggaran dan informasi akuntansi tambahan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, berbeda dengan perusahaan yang berdiri selama 11-20 tahun.

Hal ini dikarenakan, pertumbuhan perusahaan selain dipengaruhi oleh ukuran usaha, juga dipengaruhi oleh umur perusahaan, yang notabenehnya semakin muda usia perusahaan terdapat kecenderungan untuk menggunakan informasi akuntansi yang ekstensif untuk tujuan pembuatan keputusan dibandingkan perusahaan yang lebih tua. Kemampuan dan keahlian pemilik atau Manajer perusahaan kecil dan menengah sangat ditentukan oleh pendidikan formal yang pernah ditempuh (Murniati, 2002).

Tingkat pendidikan formal yang rendah (tingkatan pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Umum) pemilik atau Manajer akan rendah penggunaan informasi akuntansi dibandingkan dengan tingkatan pendidikan formal yang tinggi (perguruan tinggi) pemilik atau Manajer.

2.10 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendidikan Manajer/pemilik usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi Usaha Kecil dan Menengah Kain Songket di kota Palembang.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara umur perusahaan terhadap penggunaan informasi akuntansi Usaha Kecil dan Menengah kain songket di kota Palembang.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara skala usaha terhadap penggunaan informasi

akuntansi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kain songket di kota Palembang.

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kepatuhan terhadap Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang berhubungan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap penggunaan informasi akuntansi Usaha Kecil dan Menengah kain songket di kota Palembang.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi dengan menggunakan variabel-variabel pendidikan Manajer/pemilik, umur perusahaan, skala usaha, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) terhadap informasi akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kain songket di kota Palembang.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Penelitian

kausal adalah penelitian-penelitian sebab akibat yang bertujuan untuk membuktikan hubungan sebab akibat, sehingga dapat mengetahui variabel yang mempengaruhi dan mana variabel yang dipengaruhi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik. Sumber data yang digunakan adalah data primer.

3.3 Metode Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data responden, dimana responden akan memberikan respons tertulis sebagai tanggapan atas pertanyaan yang di berikan. Dalam penelitian ini kuesioner dibagikan langsung kepada responden (UKM kain songket)

3.4 Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dan diuji dengan pengujian statistik yang terdiri dari statistik deskriptif dan uji statistik untuk menguji hipotesis. Menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik

3.5 Definisi Variabel Operasional

Definisi variabel operasional pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1:
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel	Ukuran
Informasi Akuntansi (Y)	Penggunaan Informasi akuntansi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kebutuhan keuangan dimasa yang akan datang, biaya yang harus dikeluarkan dalam produksi, mengukur produktifitas. Informasi akuntansi yang diperlukan dapat dilihat dari: - Penggunaan Informasi Operasional - Penggunaan Informasi	Variabel informasi akuntansi skala nominal yaitu: -Poin 1 Tidak Pernah Menggunakan Informasi Akuntansi, -Poin 2 Sangat Jarang Menggunakan Informasi Akuntansi, -Nilai 3 Kadang-kadang Menggunakan Informasi akuntansi, -Nilai 4 Sering Menggunakan	Nominal

Tabel 1:
Operasionalisasi Variabel Penelitian (Lanjutan)

	<p>Akuntansi Manajemen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Informasi Keuangan - Penggunaan Informasi <i>Statutory Accounting</i> - Penggunaan Informasi <i>Budgetary</i> - Penggunaan Informasi <i>Additional Accounting</i>. <p>(Wibowo, 2015)</p>	<p>Informasi Akuntansi,</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nilai 5 Sangat Sering Menggunakan Informasi Akuntansi. 	
Skala Usaha (X1)	<p>Variabel skala usaha dilihat dari tenaga kerja <i>full time</i> yang bertambah seiring dengan perkembangan usaha.</p>	<p>1. Jumlah tenaga kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nilai 1 untuk tenaga kerja < 5 -Nilai 2 untuk tenaga kerja 5 s.d 19 -Nilai 3 untuk tenaga kerja 20 s.d 99 -Nilai 4 untuk tenaga kerja = 100 -Nilai 5 untuk tenaga kerja lebih dari 100 <p>2. Jumlah pendapatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai 1 untuk <50 s.d 99 Juta Pertahun - Nilai 2 untuk 100 s.d 199 Juta Pertahun - Nilai 3 untuk 200 s.d 299 Juta Pertahun - Nilai 4 untuk 300 s.d 399 Juta Pertahun - Niali 5 untuk = 500 Juta Pertahun 	Nominal
Umur Usaha (X2)	<p>Usia atau lamanya perusahaan beroperasi dari mulai berdiri s.d penelitian ini dilakukan.</p>	<p>Umur perusahaan berdasarkan tahun sejak pendirian perusahaan sampai penelitian ini dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nilai 1 untuk < 5 Tahun -Nilai 2 untuk 5 s.d 9 Tahun -Nilai 3 untuk 10 s.d 14 Tahun -Nilai 4 untuk 15 s.d 19 	Nominal

Tabel 1:
Operasionalisasi Variabel Penelitian (Lanjutan)

Kepatuhan Terhadap Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) (X4)	Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden dan peraturan lainnya yang berhubungna dengan UKM, seperti: -Surat izin usaha -Pembayaran gaji/upah Karyawan -Pembayaran pajak -Pengolahan Limbah dan sampah	Tahun -Nilai 4 untuk 15 s.d 19 Tahun -Nilai 5 untuk > 20 Tahun -Nilai 1 untuk Sangat Tidak Diperlu, -Nilai 2 untuk Tidak Diperlu, -Nilai 3 untuk Kurang Diperlu, -Nilai 4 untuk Diperlu, -Nilai 5 untuk Sangat Diperlukan.	Nominal
--	--	---	---------

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pendidikan Pemilik/Manajer

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilik atau manajer memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kain songket di kota Palembang. Hal ini menunjukkan perbedaan hasil penelitian Murniati (2002); Solovina (2003); Purnamasari, Christmastuti, dan Ayu (2009); dan Mandala (2012) yang berpengaruh positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini mengarah pada Teori Kontijensi, dimana lingkungan usaha yang turun temurun membuat sudut pandang pemilik yang masih menggunakan cara berfikir dari pemilik sebelumnya, hal ini dikarenakan usaha yang didirikan diwariskan dari pemilik sebelumnya kepada anak-anak mereka yang meniru cara pandang orang tua mereka dan merasa nyaman dengan cara pikir yang lama. Umur perusahaan menentukan cara pandang dan tindakan yang harus diambil dalam upaya mengembangkan usaha yang telah turun temurun. Dalam teori kontijensi, ketidakpastian lingkungan akan mempengaruhi sudut pandang pemilik usaha lebih

muda untuk memiliki pola pikir yang luas dalam menggunakan dan menyediakan informasi akuntansi yang baik.

Walaupun umur perusahaan lebih tua, pemilik usaha telah menjalankan usaha dari usia muda dan lebih berpengalaman dalam menjalankan bisnis, tetapi lebih kaku dan tidak bisa menerima perubahan pada kondisi lingkungan sekitar usaha yang dapat menyebabkan usaha tidak dapat mengikuti perkembangan jaman. Sedangkan untuk umur perusahaan yang lebih muda lebih cenderung mempunyai struktur organisasi yang lebih fleksibel dan reaktif dibandingkan dengan perusahaan yang lebih tua, dan juga lebih memiliki sifat kewirausahaan yang lebih tinggi dimana dapat menerima perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar dan dapat menerima perubahan kondisi lingkungan dengan menerima perubahan-perubahan yang ada menjadi masukan dalam mengembangkan suatu usaha.

Semakin muda usia usaha justru akan membuat persepsi yang semakin baik terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan usaha dan semakin lama usaha itu berdiri cenderung persepsi penting tersebut justru akan berpengaruh semakin kecil. Perkembangan teknologi adalah faktor eksternal

yang berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Dengan berkembangnya suatu usaha dari tahun ke tahun maka usaha tersebut harus mengikuti perkembangan jaman dan tren yang sedang berjalan, sehingga produk yang dihasilkan akan sesuai dengan keinginan konsumen. Teknologi yang semakin berkembang memaksa suatu usaha yang bersifat tradisional untuk dapat mengikuti sehingga usaha yang dibangun dapat bersaing dengan baik. Kebanyakan usaha yang turun temurun akan menggunakan metode yang sama dengan pemilik yang sebelumnya karena merasa nyaman dengan cara yang lama dan agak sulit menerima cara yang lebih moderen seperti alat yang di gunakan dalam membuat kain songket. Sedangkan untuk usaha yang baru dirintis pasti akan langsung mengikuti perkembangan teknologi dan tren baik dalam hal pemasaran, alat-alat produksi, bahan baku, dan lain-lain

4.2 Skala Usaha

Hasil penelitian untuk skala usaha, berdasarkan hasil responden yang diukur menggunakan jumlah tenaga kerja dan berdasarkan jumlah pendapatan pertahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skala usaha memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kain songket di kota Palembang. Hal ini menunjukkan perbedaan dengan hasil penelitian Nicholl dan Holmes (1989); Murniati (2002); Solovina (2003); Purnamasari, Christmastuti, dan Ayu (2009); dan Mandala (2012) yang berpengaruh positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini mengarah pada teori kontijensi. Dalam teori kontijensi, pengendalian melalui anggaran tergantung pada bermacam-macam aspek seperti tingkat desentralisasi dan sentralisasi dan sampai sejauhmana kegiatan-kegiatan yang ada terstruktur. Hubungan kontijensi antar aspek-aspek perusahaan (ukuran perusahaan, jenis produk dan desain organisasi) dengan penggunaan informasi akuntansi. Dalam penelitian ini variabel kontijensi lebih mengarah pada pendekatan universal dimana pengendalian terletak pada karakteristik perusahaan dan kondisi lingkungan dimana usaha dibangun.

Tujuan dari pengendalian variabel kontijensi adalah merancang dan mengendalikan sistem pengendalian manajemen yang baik. Dalam penelitian ini pengendalian strategi yang berbeda bergantung pada skala usaha pada UKM baik skala mikro maupun skala makro. Ketika UKM mengalami tingkat pendapatan yang lebih besar maka UKM akan menambah jumlah tenaga kerja lebih banyak untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar lagi.

Dimana semakin besar permintaan maka semakin banyak jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dan semakin besar permintaan suatu barang maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh UKM. Sedangkan dalam pengolahan keuangan belum ada pemisah antara uang pribadi dan uang untuk usaha. Hal ini menunjukkan kondisi pencatatan keuangan yang sederhana, hanya sebatas stok *opname*, stok barang, uang keluar dan uang masuk yang dicatat seadanya dan diluar standar akuntansi. Ada juga UKM yang tidak melakukan pencatatan sama sekali yang penting ia tahu modal yang ada dan berapa untung yang diterima perbulan.

4.3 Kepatuhan Terhadap Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang (UU) yang Berhubungan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang (UU) yang berhubungan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kain songket di kota Palembang.

Dalam membangun suatu usaha yang pemilik usaha yang baik harus membangun usaha sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dimana usaha tersebut dibangun. Setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda. Hal ini juga berlaku untuk para pengusaha dan pekerja yang dipekerjakan. Hal ini dapat terlihat dari pemberian upah, pemberian tunjangan, dan lain-lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat memotivasi kerja karyawan bekerja lebih baik.

Dalam teori kepatuhan, faktor lingkungan sangatlah berpengaruh. Dimana pemilik usaha dituntut untuk sadar hukum dan peraturan yang berlaku yang disesuaikan dengan usaha yang dibangun. Manfaat dan fungsi hukum perusahaan. Perusahaan diharapkan bertindak dengan cara-cara yang baik dan benar (bertanggungjawab) yaitu:

- (1) bekerja secara efektif-efisien sehingga akan diperoleh nilai tambah-keuntungan bagi pemiliknya,
- (2) melayani dan memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan sehingga perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan
- (3) mempertimbangkan kelestarian alam karena ada hubungannya dengan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Keberlanjutan perusahaan (secara ekonomi) berimplikasi pada keberlanjutan sosial dan alam.

Ketika perusahaan melakukan kewajibannya kepada konsumen, pekerja dan masyarakat, perusahaan dapat mengharapkan: pertama terjadi kelancaran usaha, usahanya didukung semua pihak termasuk pemerintah (menjaga kepastian hukum). Berarti dengan mematuhi hukum yang ada, perusahaan dapat memperoleh: litigasi sekaligus legitimasi. Hal itu menentukan kelancaran dari kegiatan usaha. Keuntungan pemilik diperoleh ketika hak berbagai pihak (konsumen, pekerja dan masyarakat) bersamaan dipenuhi.

Dari hukum yang harus dipatuhi, perusahaan mendapatkan patokan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Upaya penegakan hukum (sosialisasi, pengawasan, sanksi dan sebagainya) seharusnya akan menyebabkan semua perusahaan bertindak sama; perusahaan mematuhi hukum/peraturan sebagai tindakan tertib hukum (motif deskriptif). Dengan demikian perusahaan mengikuti peraturan yang ada karena rasa takut pada penegakan peraturan dan sanksi (didorong oleh faktor luar).

Kemungkinan yang ke dua, perusahaan dapat memperhitungkan tindakan mematuhi hukum untuk mendapat keuntungan jangka pendek atau jangka panjang. Dalam hal ini perusahaan dapat

memperhitungkan manfaat yang diperolehnya. Menjalankan hukum sebagai cara dan strategi perusahaan (motif instrumental). Ada kemungkinan lain, perusahaan mematuhi hukum/peraturan sebagai tindakan tulus, yang memperhatikan kepentingan-kebaikan semua pihak (pihak selain dirinya), walaupun mungkin saja untuk dirinya tidak menguntungkan. Tindakan itu lebih didorong oleh kebutuhan untuk kebahagiaan yang nilainya lebih tinggi. Dorongan semacam ini mungkin ada hubungan dengan nilai religius atau keagamaan yang dianut oleh perusahaan (motif normatif).

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada Usaha Kecil Menengah (UKM) kain songket di kota Palembang, maka dapat disimpulkan umur perusahaan yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan, dimana lingkungan usaha yang turun temurun membuat sudut pandang pemilik yang masih menggunakan cara berfikir dari pemilik sebelumnya, hal ini dikarenakan usaha yang didirikan diwariskan dari pemilik sebelumnya kepada anak-anak mereka yang meniru cara pandang orang tua mereka dan merasa nyaman dengan cara pikir yang lama. Umur perusahaan menentukan cara pandang dan tindakan yang harus diambil dalam upaya mengembangkan usaha yang telah turun temurun.

Dalam teori kontinjensi, ketidakpastian lingkungan akan mempengaruhi sudut pandang pemilik usaha lebih muda untuk memiliki pola pikir yang luas dalam menggunakan dan menyediakan informasi akuntansi yang baik. Dengan berkembangnya suatu usaha dari tahun ke tahun maka usaha tersebut harus mengikuti perkembangan jaman dan tren yang sedang berjalan, sehingga produk yang dihasilkan akan sesuai dengan keinginan konsumen.

Variabel skala usaha secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan, dengan hasil

dari responden berdasarkan pendapatan dan jumlah tenaga kerja. Berdasarkan dari hasil responden penelitian, teori kontijensi lebih mempengaruhi. Hal ini mengarah pada pengendalian melalui anggaran tergantung pada bermacam-macam aspek seperti tingkat desentralisasi dan sentralisasi dan sampai sejauhmana kegiatan-kegiatan yang ada terstruktur.

Hubungan kontijensi antar aspek-aspek perusahaan (ukuran perusahaan, jenis produk dan desain organisasi) dengan penggunaan informasi akuntansi. Dalam penelitian ini variabel kontijensi lebih mengarah pada pendekatan universal dimana pengendalian terletak pada karakteristik perusahaan dan kondisi lingkungan dimana usaha dibangun.

Tujuan dari pengendalian variabel kontijensi adalah merancang dan mengendalikan sistem pengendalian manajemen yang baik. Dalam penelitian ini pengendalian strategi yang berbeda bergantung pada skala usaha pada UKM baik skala mikro maupun skala makro. Ketika UKM mengalami tingkat pendapatan yang lebih besar maka UKM akan menambah jumlah tenaga kerja lebih banyak untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar lagi. Dimana semakin besar permintaan maka semakin banyak jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dan semakin besar permintaan suatu barang maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh UKM.

Variabel kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang (UU) yang berhubungan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) berpengaruh positif dan sangat signifikan. Setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda. Ketaatan terhadap peraturan yang ada akan menciptakan lingkungan usaha yang baik dan membuat sudut pandang dari pelanggan/pembeli merasa nyaman dalam membeli suatu produk baik itu barang maupun jasa.

Dalam teori kepatuhan, faktor lingkungan sangatlah berpengaruh. Dimana pemilik usaha dituntut untuk sadar hukum dan peraturan yang berlaku yang disesuaikan dengan usaha yang dibangun. Hukum/peraturan sebagai lingkungan

usaha atau faktor eksternal yang akan mempengaruhi keputusan dan tindakan perusahaan. Hukum usaha merupakan bagian dari hukum yang lebih luas, yang secara khusus mengatur bentuk perusahaan dan kegiatan perusahaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astuti, Era 2007, *Pengaruh Karakteristik Internal Perusahaan Terhadap Penyimpanan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Perusahaan Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, Diakses 12 April 2016 dari <http://eprints.undip.ac.id>
- [2] Ardy Mandala, Edy Raharja 2012, *Peran Pendidikan, Pengalaman, dan Inovasi Terhadap Produktivitas Usaha Kecil Menengah*. Diponegoro Journal of Management, Volume 1, Nomor 4, Diakses 12 April 2016 <http://ejournal-s1.undip.ac.id>.
- [3] Ariska, Windi 2015, *Sejarah dan Perkembangan Kain Songket*, Diakses 12 April 2016 dari <http://www.kompasiana.com>.
- [4] Badan Pusat Statistik (BPS) 2008, *Kriteria Usaha Kecil Menengah*, Diakses 27 Oktober 2015, dari <https://infoukm.wordpress.com>.
- [5] Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati 2011, *Sistem Informasi Akuntansi Perancangan, Proses, dan Penerapan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- [6] Darwanto 2013, *Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi dan Kreativitas (Strategi Penguatan Property Right Terhadap Inovasi Kreativitas)*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Hal. 142 – 149 Vol. 20, No. 2, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, Diakses 16 September 2016 dari <https://media.neliti.com>.
- [7] Fisher J 1995, *Contingency-Based Research on*

- Management Control Systems*, Categorization by Level of Complexity, *Journal of Accounting Literatur*, 14: 24-53, Diakses 16 September 2016 dari <https://link.springer.com>.
- [8] Fuad dan Linear Diah Sitoresmi 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Kub Sido Rukun Semarang)*, *Journal of Accounting*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2013, pp. 1-13. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, Diakses 16 September 2016 dari <http://portalgaruda.org>.
- [9] Gomulia, Budiana; Catharina Ria Budiningsih, dan Vera Intanie 2014, *Perusahaan Bertanggung Jawab: Motivasi Kepatuhan UKM Terhadap Peraturan*, LPPM Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Diakses 16 September 2016 dari <https://media.neliti.com>.
- [10] Holmes, S., and Nicholls, D 1988, *An Analysis of The Use of Accounting Information by Australian Small Busines*, *Journal of Small Business Management*, Vol.26, Editie. 2 April, pp 57-68, Diakses 16 September 2016 dari <https://www.econbiz.de>.
- [11] Holmes, S., and Nicholls, D 1989, *Modelling The Accounting Information Requirements of Small Businesses*, *Journal Accounting and Business Research*, Vol.19, Issue 74 March 1989, pp 143-150, Diakses 16 September 2016 dari <https://scholar.google.com>.
- [12] Hidayati, Ataina 2002, *Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan: Berbagai Teori dan Pendekatan yang Melandasi*, *JAAI* Vol. 6, No. 2. Diakses 20 Maret 2016 dari <http://journal.uui.ac.id/index.php/JAAI/>.
- [13] Hafisah, M.J. 2004, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, *Jurnal Infokop* Nomor 25 Tahun XX, Diakses 16 September 2013 dari www.smecca.com/jurnal/index.php/infokop/article/
- [14] Hansen, Don R. and Marynne M. Mowen 2003, *Management Accounting, 6th ed*, Thomson South Western, United States of America.
- [15] Hamid, E.S. 2010, *Pengembangan UMKM untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, <http://dppm.uui.ac.id>, Diakses 16 September 2013.
- [16] Hariyadi 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Bergerak Dibidang Jenis Usaha Makanan di Kota Tanjungpinang*, *Jurnal Akuntansi, Umrah Tanjungpinang* 2012. pp 1-18, Diakses 16 September 2016 <http://jurnal.umrah.ac.id>
- [17] Ismail, N.A. and King, M 2005, *The Alignment of Accounting and Information Systems in SMEs in Malaysia*, *Journal of Global Information Technology Management*, 9(3), pp. 24-42, Diakses 16 September 2016, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/>
- [18] Iwenk, Zafra 2013, *Sejarah Perkembangan Kain Songket*, Diakses 20 Maret 2016 dari <http://advertisingfashionfurniture.blogspot.co.id>.
- [19] Kristian, Candra 2010, *Pengaruh Skala Usaha, Umur Perusahaan, Pendidikan Pemilik Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Blora*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Diakses 20 Maret 2016 dari <http://lib.unnes.ac.id>.
- [20] Kementerian Keuangan 2012, *Laporan Tim Kajian Kebijakan Antisipasi Krisis Tahun 2012 Melalui KUR*.
- [21] Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan 2013, *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan dalam*

- Pengembangan UMKM*, Diakses 20 Maret 2016 dari http://bppp.kemendag.go.id/media_content
- [22] Laurie Mook, John R. Whitman, Jack 2000, *Understanding The Social Economy of The United States*, Toronto Press, London.
- [23] Lungu C, Caraiani C, Dascalu C and Morris 2007, *New Directions of Financial Reporting Within Global Accounting Standards for Small and Medium-Sized Entities*, Journal of Accounting Research, 40 (1). pp 1-15, Diakses 20 Maret 2016 dari <https://www.researchgate.net>.
- [24] Murniati 2002, *Investigasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Perusahaan Kecil dan Menengah*, Semarang, SNA V 5-6 September 2002, Diakses 20 Maret 2016 dari <http://pdeb.fe.ui.ac.id>.
- [25] Meuthia, Reno Fithri dan Endrawati 2008, *Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman Kerja, dan Penguasaan Komputer Staf Bagian Akuntansi Terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi (Studi Pada Kantor Cabang Bank Nagari)*, Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol. 3 No.1, Juni Hal 1-15, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, Diakses 20 Maret 2016 dari <http://repo.polinpdg.ac.id>.
- [26] Otley David T 1980, *The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and Prognosis*, Accounting, Organization and Society, Vol. 5, No. 4, pp. 413-428. Diakses 20 Maret 2016 dari <http://econpapers.repec.org>
- [27] Reeve, James M 2009, *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia Buku*, Salemba Empat, Jakarta.
- [28] Solovina, Grace Tianna 2003, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Perusahaan Kecil dan Menengah di Jawa Tengah*, Tesis, Universitas Diponegoro, Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Akuntansi, Semarang, Diakses 20 Maret 2016 dari <http://eprints.undip.ac.id>.
- [29] Septiani, Aditya 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang: Perspektif Teori Pengungkapan*. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, Diakses 20 Maret 2016 dari <http://eprints.undip.ac.id>.
- [30] Schiebel, Alexanser 2006, *To What Extent Would the Proposed IFRS for Small and Medium-Sized Entities ('IFRS for SMEs') be Independent of the Full IFRS System*, Social Science Research Network 6 Desember 2006, Diakses dari <http://papers.ssrn.com>.
- [31] *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil*, Diakses 20 Maret 2016 dari www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1995/9TAHUN~1995UU
- [32] *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Diakses 20 Maret 2016 dari www.eodb.ekon.go.id/download/peraturan/undangundang/UU_13_2003
- [33] *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Diakses 20 Maret 2016 dari www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile
- [34] Peterson, R.A; Kozmetsky, G; dan N.M. Ridgway 1983, *Perceived Cause of Small Business Failure: A. Research Note*, American Journal of Small Business, Vol. 8, No.1, July-Sept, Diakses 20 Maret 2016 dari <https://www.researchgate.net>.
- [35] Pacter, P 2007, *Should U.S. Private Companies Use IFRS for SMEs?*, Financial

Executive International, Diakses 20 Maret 2016 dari <https://www.thefreelibrary.com>.

- [36] Purnamasari, St, Vena; Agnes Advensia Christmastuti; dan Stephana Dyah Ayu R 2009, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Perusahaan Kecil dan Menengah (Studi di Jawa Tengah), Kekuatan Lokal sebagai Roh Pembangunan Jawa Tengah: Sumbang Pikir Universitas Khatolik Soegijapranata*, Skripsi, Universitas Khatolik Soegijapranata. Semarang. pp 89-113, Diakses 20 Maret 2016 dari <http://repository.unika.ac.id>.
- [37] *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil*, Diakses 20 Maret 2016 dari https://www.eodb.ekon.go.id/download/peraturan/perpres/Perpres_98_2014
- [38] Wichman, I.S and Williams, F.A 1983, *A Simplified Model of Flame Spread in An Opposed Flow Along A Flat Along A Flat Surfaces of Solid Fuels, Nineteenth Symp. (Int'l) on Combustion*, The Combustion Institute Pittsburgh, PA, pp 835-845. Diakses 20 Maret 2016 dari <https://www.combustioninstitute.org>.
- [39] Welch, Hilton, Gordon 1996, *Anggaran: Perencanaan dan Pengendalian Laba, Terjemahan, Buku 1 Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta.
- [40] Wibowo, Alex dan Elisabeth Penti Kurniawati 2015, *Pengaruh Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah (Studi pada Sentra Konveksi di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. XVIII, No. 2, Agustus 2015, Hal.107-126. Diakses 20 Maret 2016 dari ejournal.uksw.edu.

Evaluasi Sistem Pengendalian Persediaan Material Pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya

Oza Putri Laraswati dan Nurussama

PalComTech Palembang
ozapranataa56@gmail.com
nurussama@palcomtech.ac.id

Abstract: Supply is one of the important asset had by company. Because supply represent asset of hence must be done internal control which is good to taking care of the supply from ugly things is which is possible happened the. System of internal control of stock to control and manage the stock. Especial target from operation to the supply is protect the supply and report it precisely in financial statement. Method used by is approach method qualitative that is, descriptive analysis. The research result at PT Buluh Cawang Plantations Suka Mulya represent a peripatetic company is area of cultivation oil palm plantations. System evaluation, internal control to the supply have effective, where existence of duty dissociation of between functions of related to revenue and expenditure goods. System of inventory control of merchandise at PT Buluh Cawang Plantations Suka Mulya have walked better.

Keywords: evaluate, internal control system, supply.

Abstrak: Persediaan adalah salah satu aktiva penting yang dimiliki oleh perusahaan. Karena persediaan merupakan suatu aktiva maka harus dilakukan pengendalian intern yang baik untuk menjaga persediaan tersebut dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Sistem pengendalian intern persediaan barang bertujuan untuk mengendalikan dan mengelola persediaan barang. Tujuan utama dari pengendalian atas persediaan adalah mengamankan persediaan dan melaporkannya secara tepat dalam laporan keuangan. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif yaitu, analisis deskriptif. Hasil penelitian pada PT Buluh Cawang Plantations Suka Mulya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang budidaya sawit. Evaluasi sistem, pengendalian intern atas persediaan sudah efektif, dimana adanya pemisahan tugas antara fungsi – fungsi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran barang. Sistem pengendalian persediaan barang dagangan pada PT Buluh Cawang Plantations Suka Mulya berjalan dengan baik.

Kata kunci: evaluasi, sistem pengendalian intern, persediaan.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian di Indonesia yang sedang berkembang, ditandai dengan persaingan sengit disetiap sektor bisnis. Dalam menghadapi persaingan tersebut maka, suatu perusahaan berusaha untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan bisnis mereka. Pada dasarnya, tujuan utama setiap perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah baik yang bergerak di bidang jasa, perdagangan ataupun industri cenderung untuk mendapatkan laba

sehingga dapat mengembangkan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran setiap perusahaan di tuntut untuk memiliki suatu sistem pengendalian yang baik.

Sistem pengendalian yang dimaksud adalah suatu cara atau sistem yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan. Pengendalian internal pada suatu perusahaan dapat meliputi struktur perusahaan dan semua cara serta alat yang digunakan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta perusahaan,

meningkatkan efisiensi dalam operasional kegiatan perusahaan. Salah satu yang harus dikendalikan oleh perusahaan yaitu persediaan. Karena persediaan merupakan aset yang memegang peranan penting pada perusahaan. Sehingga jika tidak ada pengendalian maka kegiatan operasional perusahaan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dengan adanya sistem pengendalian intern pada persediaan material maka akan mempermudah sistem otorisasi oleh perusahaan terutama dalam pengambilan keputusan dan dalam menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh perusahaan terutama dalam persediaan material agar dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu perusahaan perlu mengadakan evaluasi pengendalian persediaan material.

Persediaan merupakan aktiva lancar yang terbesar dalam operasi perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Persediaan material yang dimiliki merupakan bagian yang signifikan. Pihak gudang harus jeli dalam mengendalikan sejumlah prosedur agar pengendalian persediaan material berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Luayyi (2013) dalam suatu perusahaan, persediaan material merupakan faktor pemegang peran penting. Persediaan material selalu dibutuhkan, baik didalam perusahaan kecil, menengah maupun dalam perusahaan besar. Material merupakan faktor utama yang dapat menunjang kelangsungan proses produksi dalam suatu perusahaan. Dengan adanya persediaan material yang cukup diharapkan kemacetan dalam proses produksi di perusahaan tersebut dapat teratasi.

Perusahaan akan berusaha untuk memenuhi persediaan material guna kelangsungan produksinya. Jenis persediaan material pada gudang PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya meliputi cat, kuas, tiner, glisat, pupuk, semen padang, lem fox, *braket*, *bushing*, *plate sub assy*, *glass sub assy*, *oil seal*, *yamato regulator*, *grinding wheel*, ban serta bahan penunjang untuk memperbaiki alat maupun kendaraan.

PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya merupakan anak perusahaan dari Wilmar Internasional. PT Buluh Cawang *Plantations* hanya mengelola dari tahap penanaman sampai pemanenan, kemudian dari hasil panen tersebut di berikan kepada PKS untuk di produksi lebih lanjut. Persediaan material yang cukup menjadi penunjang dalam kegiatan perkebunan. Perusahaan ini mengelola sendiri persediaan material yang dibutuhkan dan melakukan pembelian atau pengadaan material pendukung produksi perusahaan.

Sistem pengendalian persediaan material di gudang pada PT Buluh Cawang *Plantation* Suka Mulya sudah menggunakan metode FIFO dan metode LIFO. Sistem pengendalian material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya masih kurang baik dikarenakan adanya perangkapan tugas dan kurang otorisasi dari pihak yang berwenang. Maka dari itu, sebaiknya pihak perusahaan harus dapat merancang dan membuat suatu sistem pengendalian persediaan material yang lebih terstruktur dan terkendali guna meminimalisir segala kesalahan yang terjadi.

Penelitian yang mendukung dalam penelitian ini dilakukan oleh Wahyuni (2013) dengan judul Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang pada UD. Dwi Jaya Sentosa Surabaya. Hasil penelitian ini adalah adanya adanya perangkapan fungsi yang dilakukan oleh bagian penerimaan barang dengan bagian penyimpanan barang (gudang) disebabkan tidak adanya pemisahan fungsi secara tegas dalam bagian ini. Adanya kesalahan dalam hal permintaan penerimaan dan pengeluaran barang disebabkan karena masih banyak permintaan atau perintah yang dilakukan secara lisan serta kurangnya formulir dan pendistribusian atas formulir tersebut kepada bagian-bagian yang bersangkutan. Selain itu terdapat suatu kesulitan dalam melakukan pengendalian atas persediaan yang ada di dalam perusahaan.

Penelitian lain yang mendukung dalam penelitian ini dilakukan oleh Mardania (2013) dengan judul Tinjauan atas Sistem Pengendalian Intern Persediaan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa didalam sistem pengendalian intern persediaan sudah cukup baik namun masih ada kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya sumber daya manusia dan kegunaan dari program aplikasi yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Persediaan Material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah yaitu apakah sistem pengendalian persediaan material yang diterapkan pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya sudah efisien dan efektif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pengendalian persediaan material yang diterapkan pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya sudah efisien dan efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui sistem pengendalian persediaan material yang diterapkan pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya sudah efisien dan efektif, supaya manajemen perusahaan dapat memperbaiki sistem menjadi lebih baik lagi.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sunyoto (2013), data primer adalah

data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer dalam penelitian ini adalah data SOP material gudang serta data yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala gudang dan data pengamatan secara langsung proses pengendalian persediaan material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya.

2. Data Sekunder

Menurut Sunyoto (2013), data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Adapun data yang peneliti dapatkan dari PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya, yaitu berupa kartu stok (kartu persediaan), kartu bin, bukti barang masuk dan keluar, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi serta pembagian tugas, tanggung jawab dan peraturan PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya.

1.6 Definisi Operasional Variabel

1.6.1 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Mulyadi (2008), sistem informasi akuntansi merupakan suatu bentuk sistem informasi yang memiliki tujuan untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada sebelumnya, memperbaiki pengendalian akuntansi dan juga pengecekan internal, serta membantu memperbaiki biaya klerikal dalam pemeliharaan catatan akuntansi.

Menurut Krismiaji (2015), sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dari transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. Menurut Azhar Susanto (2008), Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari sub sistem/ komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerjasama satu sama lain secara

harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

1.6.2 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Anggreini (2012), Pengendalian internal merupakan metode yang berguna bagi manajemen untuk menjaga kekayaan organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Menurut Chung (2015), Pada umumnya perusahaan menggunakan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem dan membantu operasional perusahaan agar dapat terarah dengan baik.

Sedangkan Menurut Mulyadi (2014), sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengendalian internal tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.

1.6.3 Unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016), unsur pokok pengendalian internal dalam perusahaan adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan fungsi operasi yang memilih wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan harus terpisah dari fungsi akuntansi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:

- a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
- b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*). Hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau satu organisasi lain.
- d. Perputaran jabatan (*job rotation*). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.
- e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk sementara oleh pejabat ini, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkapkan oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut.
- f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi

antara kekayaan secara fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan tersebut.

- g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain. Unit organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staf pemeriksaan intern. Adanya satuan pengawas intern dalam perusahaan akan menjamin efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern, sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi akan terjamin ketelitian dan keandalannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

1.6.4 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016), tujuan dari sistem pengendalian internal ialah sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi. Manajemen memerlukan informasi yang teliti dapat dipercaya dan tepat pada waktunya untuk mengolah kegiatan-kegiatan perusahaan.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengawasan yang memadai diperlukan untuk melindungi barang-barang atau harta milik perusahaan yang mungkin hilang karena dicuri, disalahgunakan, rusak karena kecelakaan atau musibah dan sebab-sebab lain yang dapat merugikan perusahaan.
3. Mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan. Mekanisme pengawasan atau pengendalian intern yang diasosiasikan dengan para personil dan kegiatannya, dimaksudkan untuk mencegah atau menghindari terjadinya berbagai peristiwa dan keadaan yang berakibat timbulnya

ketidakefisiensian dari operasi manajemen perusahaan.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Kebijaksanaan peraturan dan prosedur-prosedur pelaksanaan itu ditetapkan oleh manajemen sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah dirancang. Sistem pengendalian intern beserta mekanismenya diciptakan untuk manajemen bahwa semua kebijakan, peraturan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan itu selalu dipatuhi oleh perusahaan.

1.6.5 Pengertian dan Jenis Persediaan

Menurut Mulyadi (2014), yang dimaksud dengan persediaan adalah barang-barang yang dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual lagi (barang dagangan), atau masih dalam proses produksi yang akan diolah lebih lanjut menjadi barang jadi kemudian dijual (barang dalam proses) atau akan dipergunakan dalam proses produksi barang jadi yang kemudian dijual (bahan baku/ pembantu).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2011), persediaan adalah aset:

- a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa
- b. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau
- c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Menurut La Midjan dan Susanto (2011), didalam perusahaan dagang, perusahaan industri dan perusahaan jasa persediaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Persediaan bahan baku atau persediaan material merupakan bahan baku atau bahan tambahan yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam aktivitas proses produksi persediaan material menjadi komponen utama dari suatu produk.
2. Persediaan barang dalam proses adalah barang-barang yang sedang dikerjakan (diproses) tetapi pada tanggal neraca barang-barang tersebut belum selesai dikerjakan untuk dapat dijual masih diperlukan pengerjaan lebih lanjut.

3. Persediaan hasil jadi yaitu barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain.
4. Persediaan suku cadang merupakan persediaan barang yang akan digunakan untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak dari peralatan maupun mesin.
5. Persediaan bahan bakar merupakan persediaan yang harus ada dalam perusahaan terutama bagi perusahaan industri yang menggunakan mesin disel sebagai pembangkit listrik.
6. Persediaan barang cetakan dan alat tulis merupakan persediaan untuk kebutuhan kantor untuk memperlancar kegiatan tata usaha.
7. Persediaan barang dagangan merupakan persediaan yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dagang.

1.6.6 Sistem Pengendalian Persediaan

Pengertian pengendalian persediaan material adalah langkah-langkah kebijaksanaan yang dilakukan dalam mengatur suatu persediaan material tanpa mengurangi kelancaran tugas-tugas operasional, sehingga persediaan material itu dalam batas-batas yang normal dan wajar sesuai kebutuhan, jadi tidak kelebihan atau kekurangan. Sasaran utama pengendalian persediaan material adalah:

- a. Selalu tersedia material yang jenis jumlahnya melebihi kebutuhan.
- b. Menghindari adanya jenis barang yang jumlahnya kurang dari kebutuhan.
- c. Menghilangkan kemungkinan timbulnya kerugian karena material hilang atau rusak.

Untuk menyimpan persediaan material diperlukan biaya-biaya yang terdiri dari unsur-unsur seperti modal, bunga modal, sewa tempat, biaya pemeliharaan, resiko hilang dan resiko rusak. Karena itu wajar bila persediaan material diusahakan serendah mungkin tanpa mengganggu kelancaran operasi perusahaan.

1.6.7 Tujuan Sistem Pengendalian Persediaan

Menurut Assauri (2014), tujuan pengendalian

secara terinci dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi.
2. Memberikan informasi mengenai persediaan mulai dari pengakuan sampai proses penerimaannya dengan prosedur yang baku.
3. Menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan, sehingga biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak terlalu besar.
4. Pengendalian terhadap persediaan agar dapat diperhitungkan secara ekonomis keberadaannya.
5. Menjaga agar pembelian kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan memperbesar biaya pemesanan.
6. Memberikan informasi mengenai alur persediaan yang ada sehingga perusahaan dapat memperhitungkan tingkat pengendalian yang diperlukan.

1.6.8 Fungsi yang Terkait Dalam Permintaan dan Pengeluaran Barang Gudang

Menurut Mulyadi (2014), fungsi yang terkait pada elemen pengendalian internal dalam prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang yaitu:

- a. Fungsi Produksi
Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada dibawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi.
- b. Fungsi Gudang
Fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong dan barang yang lain yang digudangkan.
- c. Fungsi Kartu Persediaan
Fungsi ini bertanggungjawab mencatat pengeluaran bahan baku dalam kartu persediaan.
- d. Fungsi Kartu Biaya
Fungsi ini bertanggungjawab mencatat harga pokok produk pada kartu harga pokok produk.
- e. Fungsi Jurnal
Fungsi ini bertanggungjawab membuat jurnal penyesuaian.

1.7 Dokumen yang Terkait Dalam Permintaan dan Pengeluaran Barang Gudang

Menurut Mulyadi (2014), dokumen yang terkait pada elemen pengendalian internal dalam prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang ialah dokumen yang digunakan dalam sistem permintaan dan pengeluaran barang gudang yaitu bukti pengeluaran barang gudang.

1.8 Catatan Akuntansi yang Terkait Dalam Permintaan dan Pengeluaran Barang Gudang

Menurut Mulyadi (2014), catatan yang terkait pada elemen pengendalian internal dalam prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang yaitu:

a. Kartu Gudang

Catatan ini digunakan untuk mencatat *adjustment* terhadap data persediaan (kuantitas) yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang.

b. Kartu Persediaan

Digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena barang digunakan untuk proses produksi.

c. Kartu Harga Pokok Produk

Untuk mengetahui harga pokok produk per satuan.

d. Jurnal Pemakaian Bahan Baku

Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi.

1.9 Gambaran Umum Perusahaan Sejarah Perusahaan

Wilmar Internasional didirikan pada tahun 1991 sebagai perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan merupakan salah satu perusahaan agribisnis terbesar di Asia. Selain itu, Wilmar Internasional juga mengolah minyak sawit dan biodiesel berbasis kelapa sawit terbesar di dunia. Wilmar juga memiliki lahan tebu yang luas dan fasilitas pemrosesan minyak nabati di seluruh dunia. Wilmar juga memiliki banyak anak

perusahaan yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya Sumatera Selatan. PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Wilmar yang berlokasi di Jl. Lintas Timur KM 170 Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

PT Buluh Cawang Plantation didirikan pada tahun 1988, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini terbagi menjadi 3 kebun yaitu, Bumi Arjo, Suka Mulya, dan Dabuk Rejo. Masing-masing perusahaan memiliki peranan, ada yang sebagai tempat buah, tempat pembibitan buah, dan juga pabrik. PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya merupakan perusahaan yang hanya mengelola dari tahap penanaman sampai pemanenan, kemudian dari hasil panen tersebut di berikan kepada PKS untuk di produksi lebih lanjut. Hasil panen 4 tahun belakangan ini tidak sebanyak tahun-tahun kemarin dikarenakan sudah banyak pohon yang tidak produktif lagi karena sudah tua, maka dari itu perusahaan menebang sebagian pohon yang tidak produktif untuk penanaman kembali, dengan bibit-bibit unggulan dengan waktu tumbuh dan produksi hanya jangka waktu 5 tahun saja. Dan maka dari itu, perusahaan menambah sumber daya manusia untuk bagian perawatan sawit, dan pertumbuhan sawit.

2. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Menurut Sunyoto (2013), metode observasi (pengamatan) adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Metode ini dipilih karena bisa mengumpulkan informasi secara akurat.

Observasi (pengamatan) yang dilakukan yaitu pada Bagian Gudang PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya, untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian persediaan material.

2. Metode Wawancara

Menurut Sugiyono (2011), metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan bapak Khoirul Anwar, selaku Kepala Gudang, mengenai bagaimana alur pengendalian persediaan material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya.

3. Metode Dokumentasi

Menurut Arriesanti, Yusuf dan Marcelina (2014), dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan (seperti kutipan-kutipan dari surat kabar dan gambar-gambar).

Dokumentasi yang diperoleh untuk laporan ini diantaranya adalah SOP material gudang, kartu persediaan, bukti masuk dan keluarnya material gudang, struktur organisasi, visi dan misi, dan profil PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun data penelitian yang diperoleh berupa dokumen yang berkaitan dengan sistem pengendalian persediaan material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya. Data penelitian adalah berupa data primer, diantaranya data SOP gudang, struktur organisasi, prosedur pengendalian persediaan material serta data yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala gudang.

a. Mendengarkan pengarahannya dari Bapak Ronald H. Tambunan. SP selaku Sr. AM (*Assistant Manager*) di PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya mengenai gambaran umum perusahaan dan prosedur pengendalian persediaan material.

b. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Khoirul Anwar, selaku Kepala Gudang, mengenai bagaimana alur pengendalian persediaan material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya.

c. Mengambil data dari pihak perusahaan mengenai pengendalian persediaan material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya.

3.1 Fungsi yang Terkait Dalam Sistem Pengendalian Atas Permintaan dan Pengeluaran Material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya

Fungsi terkait dalam sistem pengendalian atas permintaan dan pengeluaran material yang berjalan pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya adalah:

a. Fungsi Kerani Gudang

Fungsi kerani gudang bertanggung jawab untuk menerima permintaan dan pengeluaran material, memeriksa kelengkapan dari Bukti Pengeluaran Barang Gudang, memeriksa persediaan material pada kartu stok, membuat permintaan pembelian material, menginstruksikan untuk mengeluarkan material dan mencatat pengeluaran material.

b. Fungsi Kerani Produksi

Fungsi Kerani Produksi bertanggung jawab untuk membuat *Purchase Request* (PR) pada program *System Application and Product in data Processing* (SAP).

c. Fungsi *Accounting Officer*

Fungsi *Accounting Officer* bertanggung jawab untuk melakukan proses pembelian, pembuatan Surat Pengantar Barang (SPB) serta mengirimkan material yang diminta.

3.2 Dokumen yang Digunakan Dalam Sistem Pengendalian Atas Permintaan dan Pengeluaran Material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya

Beberapa dokumen yang digunakan dalam sistem pengendalian atas permintaan dan pengeluaran material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka

Mulya adalah:

- a. Bukti Pengeluaran Barang Gudang (BPBG)
Dokumen Bukti Pengeluaran Barang Gudang (BPBG) ini merupakan bukti yang digunakan oleh karyawan di PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya untuk meminta persediaan material yang dibutuhkan.
- b. Surat Pengantar Barang (SPB)
Dokumen ini berfungsi sebagai tanda terima penyerahan barang kepada pihak yang meminta persediaan material.
- c. *Purchase Request* (PR)
Purchase Request (PR) digunakan untuk mencatat permintaan pembelian persediaan material dari kerani gudang.

3.3 Catatan Akuntansi yang Digunakan Dalam Sistem Pengendalian Atas Permintaan dan Pengeluaran Material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pengendalian atas permintaan dan pengeluaran material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya adalah Kartu persediaan (*Stock Card*). Kartu persediaan (*Stock Card*) digunakan untuk mencatat persediaan material.

Pencatatan persediaan material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya masih dilakukan secara manual, sehingga untuk mengecek data persediaannya dapat dilihat melalui kertas persediaan, hal ini akan menyebabkan aktivitas terhambat karena harus mengecek terlebih dahulu persediaan yang ada di kartu persediaan, selain itu hal ini juga bisa mengakibatkan semakin besarnya peluang *human error*.

3.4 Prosedur Sistem Pengendalian Atas Permintaan dan Pengeluaran Material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Gudang, pelaksanaan sistem dan prosedur pengendalian persediaan atas permintaan dan

pengeluaran material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya adalah sebagai berikut:

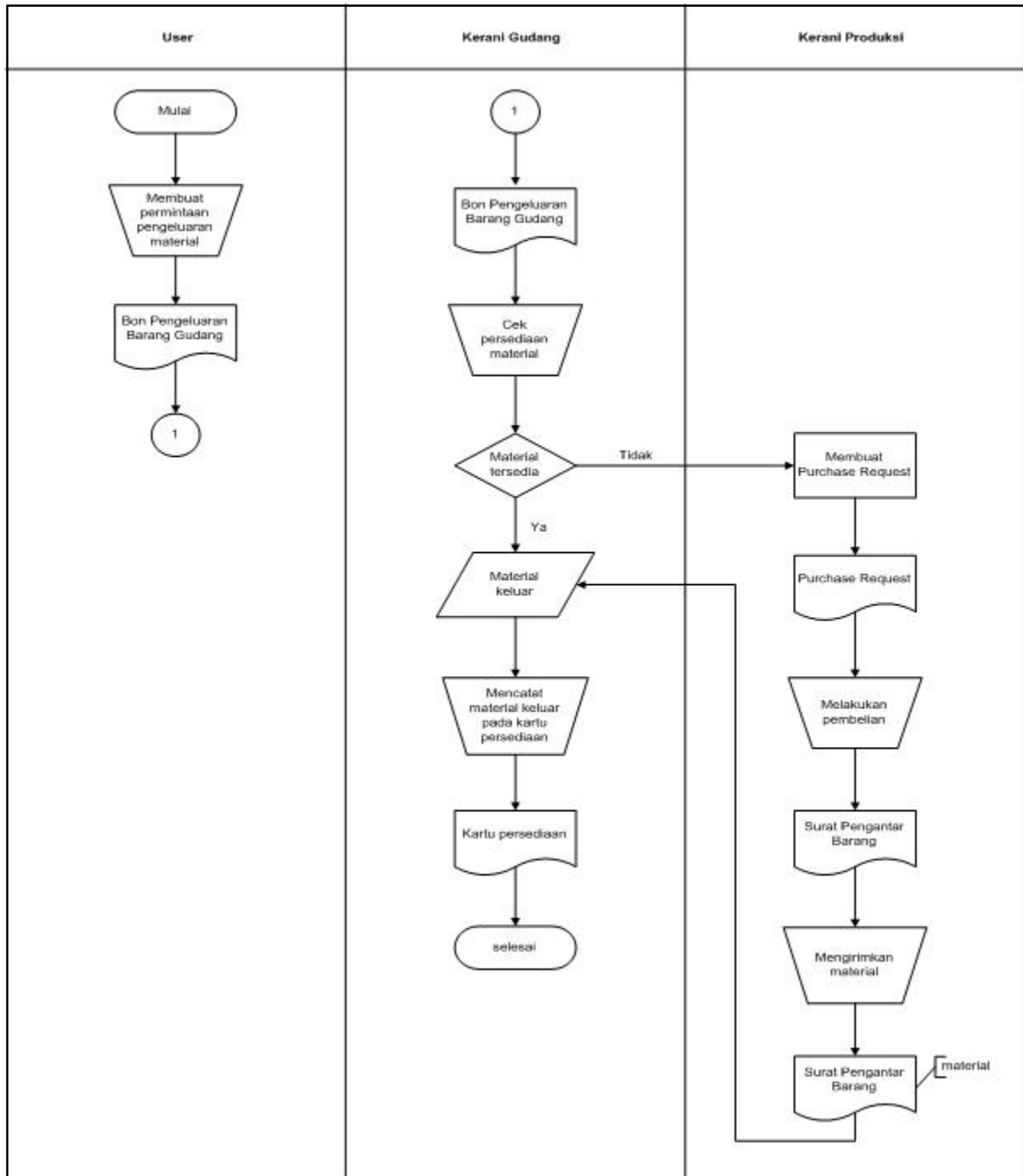
- a. Prosedur Permintaan Barang
 1. Kerani gudang mengisi buku data permintaan pada program *System Application and Product in data Processing* SAP. Kemudian buku data permintaan diserahkan ke bagian kerani produksi.
 2. Kerani produksi membuat *Purchase Request* (PR) dari buku data permintaan kemudian disimpan dalam database.
 3. Kerani produksi memeriksa *Purchase Request* (PR) jika ya, kerani produksi akan mencetak *Purchase Request* (PR) dan jika tidak, maka kerani produksi akan mengembalikannya ke bagian kerani gudang.
 4. Selanjutnya kerani produksi akan menyerahkan *Purchase Request* (PR) ke bagian *Accounting Officer*.
 5. *Accounting Officer* akan melakukan pembelian dan membuat Surat Pengantar Barang (SPB).
 6. *Accounting Officer* mengirimkan barang dan Surat Pengantar Barang (SPB) ke bagian kerani gudang.
 7. Kerani gudang akan memeriksa barang yang telah dikirim dari *Accounting Officer* jika telah sesuai, kerani gudang akan membuat laporan penerimaan barang dan jika tidak, maka kerani gudang akan mengembalikannya ke bagian *Accounting Officer*.

b. Prosedur Pengeluaran Barang

1. *User* membuat permintaan pengeluaran material berupa Bon Pengeluaran Barang Gudang (BPBG). Kemudian Bon Pengeluaran Barang Gudang (BPBG) tersebut diserahkan ke bagian kerani gudang.
2. Kerani gudang memeriksa persediaan material dari Bon Pengeluaran Barang Gudang (BPBG) apabila material tersedia, kerani gudang akan mengeluarkan material dan jika tidak, maka kerani gudang akan membuat *Purchase Request* (PR) yang kemudian diserahkan ke bagian kerani produksi.
3. Kemudian kerani produksi akan melakukan pembelian dari *Purchase Request* (PR).

4. Kerani produksi mengirimkan barang beserta Surat Pengantar Barang (SPB) ke bagian kerani gudang.

3.5 Flowchart Sistem Pengendalian Atas Permintaan dan Pengeluaran Persediaan Material yang Berjalan



Gambar 1. Flowchart Sistem Pengendalian Pengeluaran Material yang Sedang Berjalan pada PT Buluh Cawang Plantations Suka Mulya

Berdasarkan hasil pengamatan dari prosedur sistem pengendalian atas permintaan dan pengeluaran persediaan material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya, bahwa ditemukan adanya kesalahan prosedur seperti kurangnya otorisasi dari pihak yang berwenang dan mengakibatkan adanya perangkapan tugas yang mengakibatkan sistem pengendalian persediaan pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya masih kurang efektif dan efisien.

Berdasarkan kesalahan yang terjadi pada sistem pengendalian atas permintaan dan pengeluaran persediaan material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya, terdapat dibawah ini cara menanggulangnya:

1. Tugas dan wewenang harus sesuai dengan fungsi tanggung jawab masing-masing.
2. Pimpinan harus mengecek setiap proses laporan yang dikeluarkan oleh divisi yang bersangkutan dalam bentuk penandatanganan laporan *Purchase Request* dan Surat Pengantar Barang.

3.6 Rekomendasi *Flowchart* Sistem Pengendalian Atas Permintaan dan Pengeluaran Material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya

Berdasarkan hasil pengamatan dari prosedur sistem pengendalian atas permintaan dan pengeluaran persediaan material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya sudah cukup baik karena sudah memiliki dokumen Bon Pengeluaran Barang Gudang, *Purchase Request* dan Surat Pengantar Barang yang masing-masing rangkap 2 dan telah bernomor urut cetak serta proses pencatatannya pun sesuai dengan nomor urut cetak.

Akan tetapi hal tersebut tidak digambarkan didalam *flowchart* dan kurangnya otorisasi dari pihak yang berwenang atas laporan *Purchase Request* dan Surat Pengantar Barang menjadi acuan peneliti untuk memberikan rekomendasi prosedur *flowchart* agar sistem pengendalian atas permintaan dan pengeluaran persediaan pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka

Mulya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Berikut ini rekomendasi prosedur sistem pengendalian atas permintaan dan pengeluaran material yang diusulkan pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya:

a. Prosedur Permintaan Barang

1. Kerani gudang mengisi buku data permintaan pada program *System Application and Product in data Processing* SAP. Kemudian buku data permintaan diserahkan ke bagian kerani produksi.
2. Kerani produksi membuat *Purchase Request* (PR) dari buku data permintaan kemudia disimpan dalam database.
3. Kerani produksi memeriksa *Purchase Request* (PR) jika ya, kerani produksi akan mencetak *Purchase Request* (PR) 2 rangkap dan jika tidak, maka kerani produksi akan mengembalikannya ke bagian kerani gudang.
4. Selanjutnya kerani produksi akan menyerahkan *Purchase Request* (PR) ke bagian *Accounting Officer*.
5. *Accounting Officer* akan menandatangani *Purchase Request* (PR) sebanyak 2 rangkap dan memberikannya ke bagian Sr. AM (*Assistant Manager*) untuk ditanda tangani. Setelah *Purchase Request* (PR) sudah ditanda tangani maka diserahkan kembali ke bagian *Accounting Officer*.
6. Selanjutnya *Accounting Officer* melakukan pembelian dan membuat Surat Pengantar Barang (SPB) 2 rangkap yang telah ditanda tangani oleh bagian *Accounting Officer* dan Sr. AM (*Assistant Manager*).
7. *Accounting Officer* mengirimkan barang dan Surat Pengantar Barang (SPB) kepada kerani gudang.
8. Kerani gudang akan memeriksa barang yang telah

dikirim dari *Accounting Officer* jika telah sesuai, kerani gudang akan membuat laporan penerimaan barang dan jika tidak, maka kerani gudang akan mengembalikannya ke bagian *Accounting Officer*.

9. Selanjutnya jika material yang dikirim dari bagian *Accounting Officer* telah sesuai maka kerani gudang akan membuat laporan penerimaan barang.

b. Prosedur Pengeluaran Barang

1. *User* membuat permintaan pengeluaran material berupa Bon Pengeluaran Barang Gudang (BPBG) 2 rangkap. Kemudian Bon Pengeluaran Barang Gudang (BPBG) tersebut diserahkan kepada kerani gudang.

2. Kerani gudang menerima Bon Pengeluaran Barang Gudang (BPBG) 2 rangkap kemudian akan diberikan kepada *Accounting Officer* dan Sr. AM (*Assistant Manager*) untuk ditanda tangani.

3. Bon Pengeluaran Barang Gudang (BPBG) yang sudah ditanda tangani kemudian dikembalikan lagi ke bagian kerani gudang. selanjutnya kerani gudang memeriksa persediaan material dari Bon Pengeluaran Barang Gudang (BPBG) apabila material tersedia, kerani gudang akan mengeluarkan material dan jika tidak, maka kerani gudang akan membuat *Purchase Request* (PR) 2 rangkap yang akan diberikan ke bagian kerani produksi.

4. Kerani produksi memberikan *Purchase Request* (PR) kepada *Accounting Officer* dan Sr. AM (*Assistant Manager*) untuk ditanda tangani. *Purchase Request* (PR) yang sudah ditanda tangani kemudian dikembalikan ke bagian kerani produksi untuk melakukan pembelian.

5. Selanjutnya kerani produksi akan melakukan pembelian dari *Purchase Request* (PR).

6. Setelah kerani produksi melakukan pembelian maka akan keluar Surat Pengantar Barang. Surat Pengantar Barang diberikan kepada *Accounting Officer* dan Sr. AM (*Assistant Manager*) untuk

ditanda tangani. Surat Pengantar Barang yang sudah di tanda tangani dikembalikan ke bagian kerani produksi.

7. Kerani produksi mengirimkan barang beserta Surat Pengantar Barang (SPB) ke bagian kerani gudang.

8. Surat pengantar Barang dan material telah sampai di bagian kerani gudang maka kerani gudang akan mengeluarkan material kemudian akan mencatatnya pada kartu persediaan sesuai dengan nomor urut yang tercetak.

Berdasarkan evaluasi sistem pengendalian atas permintaan dan pengeluaran persediaan material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya dapat ditemukan beberapa kelebihan dan kelemahan yaitu sebagai berikut:

Kelebihan:

1. Dokumen Bukti pengeluaran barang gudang telah bernomor urut cetak dan pemakaiannya dapat dipertanggungjawabkan.

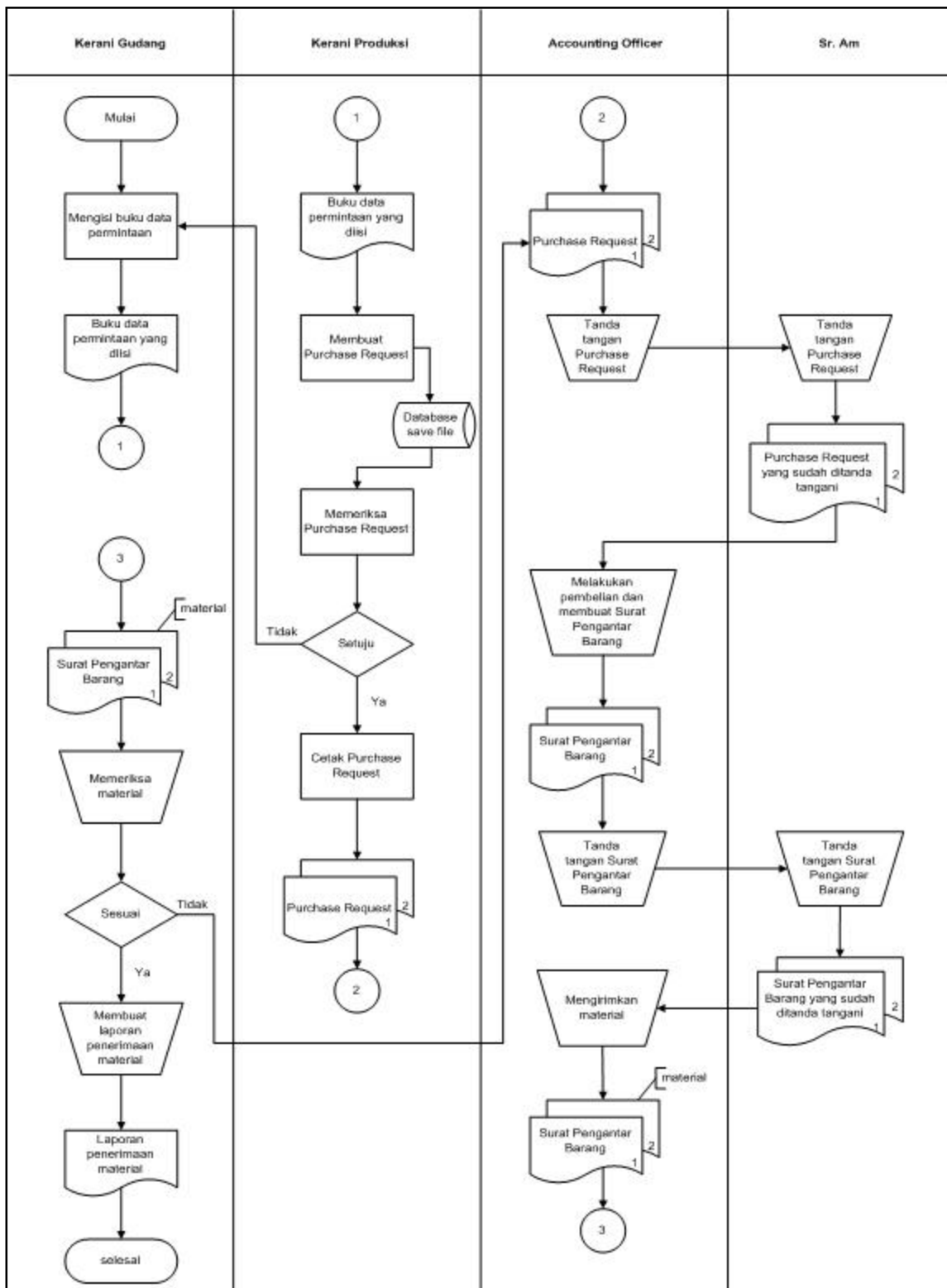
2. Pencatatan pengeluaran persediaan material sudah berdasarkan nomor urut yang telah tercetak oleh pihak gudang.

Kelemahan:

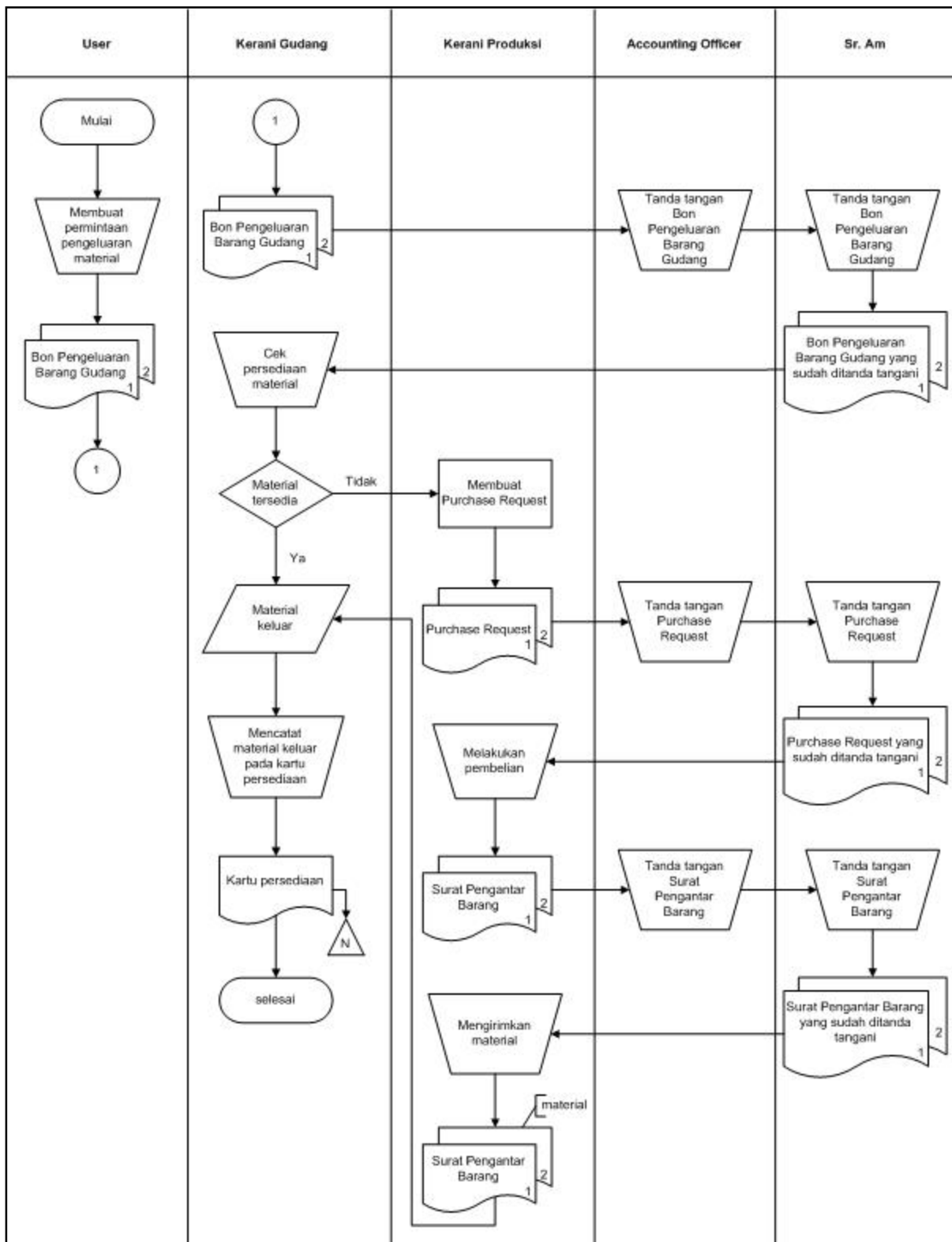
1. Pencatatan kartu persediaan masih menggunakan sistem manual sehingga hal ini dapat memicu terjadinya *human error* dan adanya kecurangan dari pihak gudang.

2. Prosedur sistem pengendalian atas permintaan dan pengeluaran persediaan material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya masih belum efektif dan efisien karena adanya perangkapan fungsi tugas dan kurangnya otorisasi dari pihak yang berwenang.

Akan lebih baik jika prosedur sistem pengendalian atas permintaan dan pengeluaran persediaan material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya dapat mengikutsertakan fungsi-fungsi yang berkaitan.



Gambar 2. Rekomendasi *Flowchart* Sistem Pengendalian Atas Permintaan Persediaan Material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya



Gambar 3. Rekomendasi Flowchart Sistem Pengendalian Atas Pengeluaran Persediaan Material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya

5. Simpulan dan Saran

5.1. Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan hasil pembahasan mengenai evaluasi sistem pengendalian persediaan material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya mengenai prosedur permintaan dan pengeluaran persediaan material di gudang masih belum efektif dan efisien karena adanya perangkapan fungsi tugas dan kurangnya otorisasi dari pihak yang berwenang.

Untuk menghasilkan sistem pengendalian yang baik maka perlu dibuat suatu struktur organisasi yang didalamnya bukan hanya terdapat wewenang dan tanggung jawab yang jelas tetapi juga harus terdapat pemisahan fungsi kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pengendalian internal. Dokumen-dokumen yang digunakan untuk transaksi telah bernomor urut cetak sehingga memudahkan pengendalian terhadap persediaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya yaitu dengan merancang atau membuat suatu sistem pengendalian internal atas persediaan material yang mengatur pembagian tugas dan wewenang untuk setiap pengeluaran persediaan material guna meminimalisir adanya kesalahan dan kecurangan. Untuk membuat suatu sistem pengendalian persediaan material yang baik bisa dengan melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan melihat latarbelakang pendidikan karyawan yang sesuai agar bisa mendorong praktik yang sehat pada proses pengendalian persediaan material pada PT Buluh Cawang *Plantations* Suka Mulya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arriesanti Dewi Hani, Yusup Muhammad, Marcelina Ceria. 2014, *Penerapan Multimedia Audio Galery Ilearning Community And Services (Magics) Sebagai Media Penyimpanan*, Journal CCIT Vol.7 No.2 – Januari 2014. Perguruan Tinggi Raharja, Tangerang.
- [2] Assauri, S. 2014, *Manajemen Pemasaran*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [3] Chung, Sunghun, Kyung Young lee, dan Jinho Choi. 2015, *Exploring Digital Creativity in The Workspace: The Role of Enterprisemobile Applications on Perceived Job Performance and Creativity*, Computers in Human Behavior 42 (2015) 93–109, ELSEVIER.
- [4] Danang, Sunyoto. 2011, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Cetakan Pertama*, CAPS, Yogyakarta.
- [5] Danang, Sunyoto. 2013, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, PT. Refika, Bandung.
- [6] IAI. 2011, *Standar Profesional Akuntansi Publik*, Salemba Empat, Jakarta
- [7] Krismiaji. 2015, *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 4, UPP STIM YKPN*, Yogyakarta.
- [8] Luayyi, S. 2013, *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Persediaan Bahan Baku untuk Memperlancar Proses Produksi (Studi Kasus pada Pr. Kn Jaya Sentosa Kediri)*. Dosen Jurusan Akuntansi Fak. Ekonomi UNISKA Kediri (Vol. 1 No. 1 – Januari 2013)
- [9] Mulyadi. 2008, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.
- [10] Midjan La dan Susanto. 2011, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Kedelapan, Linggajaya, Bandung
- [11] Mardania, Mirna. 2013, *Tinjauan Atas Sistem Pengendalian Intern Persediaan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat*, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)l, Bandung.
- [12] Mulyadi. 2014, *Sistem Akuntansi*, Salemba

Empat, Yogyakarta.

- [13] Mulyadi. 2016, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- [14] Susanto, Azhar. 2008, *Sistem Informasi Akuntansi*, Gramedia, Jakarta.
- [15] Sugiyono 2011, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung
- [16] Wahyuni, Sri. 2013, *Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang pada UD. Dwi Jaya Sentosa Surabaya*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya.

Pengaruh Moralitas Aparatur Pemerintah Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah

Muhsin

Universitas Tanjungpura
muhsin@ekonomi.untan.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze and obtain empirical evidence about the morality of government apparatus to government accounting fraud exams. The population used is a student majoring in Accounting and Business Pontianak University Tanjungpura, as many as 128 questionnaires. The type of data used is primary data. Data method used is questionnaire. Analytical tool used is WarpPLS 6.0. The results of examination of the morality of the government apparatus have a significant effect on the level of government accounting fraud.*

Keywords: *morality of government apparatus, government accounting fraud, GONE theory, and attribution theory.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang moralitas aparatur pemerintah terhadap ujian penipuan akuntansi pemerintah. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa jurusan Akuntansi dan Bisnis Universitas Pontianak Tanjungpura, sebanyak 128 kuesioner. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode data yang digunakan adalah kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah WarpPLS 6.0. Hasil pemeriksaan terhadap moralitas aparat pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kecurangan akuntansi pemerintah.

Kata kunci: moralitas aparat pemerintah, kecurangan akuntansi pemerintah, teori GONE, dan teori atribusi.

1. PENDAHULUAN

Kasus korupsi banyak terjadi di negara yang sedang berkembang, jumlah kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dari 2014-2015 sebanyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, mengungkap 803 kasus menjerat 967 terdakwa korupsi. Jika dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga 2015, kasus korupsi yang telah diputus MA pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 kasus. Di lain pihak, jumlah koruptor yang dihukum pada periode itu mencapai 3.109. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibanding dengan data pada 2001-2009. Pada saat itu, kasus korupsi yang tercatat berjumlah 549 dengan 831 terpidana. Namun,

“Update di tahun 2014 seringkali berisi peningkatan putusan-putusan untuk tahun sebelumnya (Maula, 2017).

Adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut biasa disebut dengan *fraud* (kecurangan). *Fraud* merupakan penipuan yang disengaja dilakukan baik perorangan maupun sekelompok pihak yang tidak diketahui oleh pihak yang dirugikan namun memberikan keuntungan bagi pihak yang melakukan *fraud* (Bologna, 1993). *Fraud* dapat disebabkan oleh tiga penyebab yaitu: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiga elemen tersebut biasanya disebut sebagai *fraud triangle*. Biasanya *fraud* akan muncul ketika ketiga elemen tersebut muncul secara bersamaan. Dalam perkembangannya Wolfe dan Hermanson (2004) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan selain adanya *fraud*

triangle perlu mempertimbangkan elemen keempat yaitu *individual's capability* (kemampuan individu).

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, secara umum BPK mengungkapkan 5.810 temuan yang memuat 7.594 permasalahan, meliputi 1.393 (18%) kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 6.201 (82%) permasalahan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 triliun. Temua BPK tersebut jelas membuat kita harus bekerja keras bagaimana individu/aparatur dapat bekerja sesuai dengan etika moral yang tinggi.

Semakin tinggi keterlibatan individu dalam hal ini adalah manajer tingkat bawah, maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan bersama tersebut. Namun, keterlibatan manajer tingkat bawah dalam penyusunan anggaran terkadang menimbulkan masalah lain yaitu kecurangan akuntansi atau yang lebih dikenal dengan *fraud* (Aranta, (2013).

Wilopo (2006) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMN dan perusahaan terbuka lainnya yang diukur dengan variabel bebas: sistem pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, ketaatan akuntansi, asimetri informasi dan moralitas manajemen terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi sebagai variable independen.

Menurut Wilopo, (2006), kecurangan akuntansi yang terjadi di pemerintahan menyebabkan data dan informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah sangat tidak objektif dan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja atau bahkan dalam membuat keputusan. Hal tersebut akan menghambat tercapainya tujuan dari akuntansi pemerintahan, yaitu

(a) menjaga keuangan publik dengan mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi dan tindakan untuk mencari keuntungan secara tidak beretika,

(b) memfasilitasi pengelolaan keuangan pemerintahan secara sehat,

(c) membantu pemerintah dalam memberikan akuntabilitas kepada masyarakat.

Sumiati, (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Padang, memperoleh hasil ketaatan akuntansi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, moralitas berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMN di Kota Padang.

Sebuah study CFE (*certified fraud examiner*) dalam Hall, 2001 seorang individu dengan tingkat integritas tinggi dan tekanan (kebutuhan) serta kesempatan terbatas untuk melakukan *fraud* cenderung bersifat jujur, sebaliknya individu yang integritas pribadinya kurang, ketika ditempatkan dalam situasi tekanan kebutuhan meningkat dan diberikan kesempatan cenderung melakukan *fraud* asalkan kebutuhannya terpenuhi.

Dalam Widjaja (1992) alasan yang melatar belakangi kecurangan manajemen adalah manajer tidak mengindahkan moral (*unscrupulous*) mungkin membantu kepentingan yang bertentangan. Dengan mengetahui sifat dan karakteristik manusia yang paling mungkin melakukan kecurangan, pemerintahan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian Aranta, (2013) menunjukkan hubungan negatif moralitas aparat terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin rendah moral aparat, maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin tinggi, demikian juga sebaliknya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Aranta, (2013), dengan menghilangkan variabel asimetris informasi dengan alasan bahwa sektor publik belum familiar dengan variabel asimetris informasi kecuali untuk sektor swasta. Perbedaan riset ini dengan riset Aranta, (2013) adalah pertama pada sampel. Sampel yang digunakan Aranta, (2013) adalah Kepala dan Staf Sub. Bagian Akuntansi/Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sawahlunto, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel Mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB UNTAN.

Penulis menggunakan mahasiswa sebagai sampel berdasarkan riset Houghton dan Hronsky (1993) menyimpulkan bahwa tidak ditemukan perbedaan signifikan antara struktur faktor individual grup mahasiswa dengan grup praktisi, kesesuaian mahasiswa sebagai surogat untuk praktisi akuntansi pada tugas-tugas yang melibatkan pengukuran sebuah makna. Mereka menyatakan bahwa mahasiswa yang tidak berpengalaman namun terdidik dan kolega praktisi akuntansi memiliki struktur kognitif yang serupa sehubungan dengan konsep akuntansi. Kedua pada alat analisis. Alat analisis riset Aranta, (2013) menggunakan software SPSS, sedangkan riset ini menggunakan WarpPLS 6.0. Ketiga teori. Aranta, (2013), menggunakan teori GONE dan teori agensi, sedangkan teori dalam riset ini adalah menggunakan teori GONE dan menambah teori baru yaitu teori atribusi.

1.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut, Apakah ada pengaruh moralitas aparatur pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori GONE

Kecenderungan kecurangan akuntansi juga dapat dipicu dan dipengaruhi oleh faktor perusahaan

(eksternal) dan faktor dalam diri individu (internal) sebagai pelaku kecurangan itu sendiri, menurut teori GONE dalam Simanjuntak (2008) terdapat empat faktor seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu: *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). *Opportunity* dan *Exposure* berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum).

Faktor generik berhubungan dengan organisasi yang berbuat kecurangan dapat dipengaruhi asimetri informasi. Sedangkan *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut dengan faktor individual). Faktor individual berhubungan dengan perilaku yang melekat dari individu itu sendiri, dalam kaitannya faktor individu ini berhubungan dengan moralitas untuk melakukan kecurangan.

Menurut Teori GONE, Wahyudi (2006) kecenderungan *fraud* juga berasal dari dalam diri individu itu sendiri, salah satunya moralitas. Menurut Bertens (1993), moralitas berasal dari kata sifat lain "moralis" mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan dengan moral. Moralitas yaitu suatu perbuatan atau perilaku baik ataupun buruk. Berdasarkan teori GONE diatas, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *Greed* (keserakahan). Dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang, sifat pribadi yang rakus, sudah punya satu bukit, masih ingin bukit yang lainnya, ketikaharta menjadi jembatan menuju kekuasaan, orang terdorong untuk melakukan apa saja untuk menggapainya, termasuk dengan cara melakukan kecurangan (*fraud*).

2.2 Teori Atribusi

Teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider ini mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Perilaku seseorang oleh kombinasi antara kekuatan internal dan eksternal. Dalam membuat penilaian terhadap orang lain, persepsi akan dikaitkan dengan teori atribusi. Hal yang sama

dikemukakan Robbins (2003) dalam Maula, (2017) bahwa teori atribusi merupakan dari penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seseorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal.

Perilaku seseorang dalam organisasi seperti perilaku pimpinan dan perilaku bawahan tidak terlepas dari teori ini. Tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin ataupun orang yang diberikan wewenang disebabkan oleh atribut penyebab. Faktor-faktor seperti pengendalian internal dan kompensasi merupakan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan tersebut.

3. KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah

Singleton dan Singleton (2010) mendefinisikan kecurangan pertama sebagai suatu kejahatan, dimana kecurangan merupakan istilah umum yang mencakup berbagai kelihaihan manusia dimana satu individu mengambil keuntungan dari yang lain melalui gambaran yang salah. Kemudian, kecurangan sebagai suatu kesalahan, dimana kecurangan adalah tindakan yang disengaja dalam memberikan laporan tentang fakta-fakta material yang salah, sehingga seseorang salah dalam mengambil keputusan karena menganggap fakta-fakta itu benar. Terdapat dua jenis kejahatan, yakni:

- (1)Kecurangan sebagai suatu kejahatan. Kecurangan merupakan istilah umum yang mencakup berbagai kelihaihan manusia dimana satu individu mengambil keuntungan dari yang lain melalui gambaran yang salah.
- (2)Kecurangan sebagai suatu kesalahan. Kecurangan adalah tindakan yang disengaja dalam memberikan laporan tentang fakta-fakta

material yang salah, sehingga seseorang salah dalam mengambil keputusan karena menganggap fakta-fakta itu benar.

Sawyer et al. (2006) menyebutkan kecurangan adalah serangkaian tindakan-tindakan tidakwajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu, kecurangan dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan uang. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mengelompokkan kecurangan dalam tiga kelompok.

Kelompok pertama yaitu kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

Kelompok kedua adalah penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), yaitu penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk kecurangan yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur/dihitung (*defined value*).

Sedangkan kelompok ketiga adalah korupsi, yaitu jenis kecurangan ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain. Kecurangan jenis ini yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan.

Bentuk-bentuk korupsi bisa berupa penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*). Secara rinci, dapat dibagi menjadi;

- (1)Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk

menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

- (2) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) yaitu penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk kecurangan yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur/dihitung (*defined value*).
- (3) Korupsi, yaitu jenis kecurangan ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain. Kecurangan jenis ini yang terbanyak terjadi di negara negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Bentuk bentuk korupsi bisa berupa penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

3.2 Moralitas Aparatur Pemerintah

Model Kohlberg merupakan salah satu teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam penelitian etika. Kohlberg (1969) menyatakan bahwa ada tiga tahapan dalam perkembangan moral, yaitu tahapan pra-konvensional, tahapan konvensional dan tahapan pasca-konvensional. Liyanarachi (2009) memaparkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka.

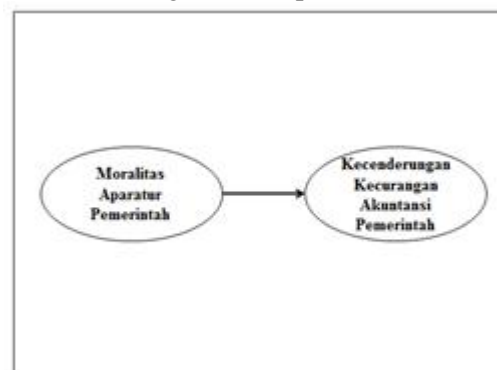
Orang yang mempunyai level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi di saat mereka menghadapi dilema etika. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, maka individu tersebut semakin mungkin untuk melakukan 'hal yang benar'. Individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada jika berada pada tahapan yang paling rendah (prakonvensional). Selain itu individu pada level

moral ini juga akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan.

Pada tahap kedua (konvensional), individu akan mendasarkan tindakannya pada persetujuan teman-teman dan keluarganya dan juga pada norma-norma yang ada di masyarakat. Pada tahap tertinggi (pasca-konvensional), individu mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan tindakannya pada hukum-hukum universal. Menurut Rest (2000), semakin tinggi level moral seseorang maka semakin besar kemungkinan mereka melakukan 'hal yang benar'.

3.3 Kerangka Model Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas yang berkaitan dengan moralitas aparatur pemerintah dan kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah, kerangka model penelitian berikut:



Sumber: Dikembangkan untuk Penelitian ini, 2018.

Gambar 1. Model Penelitian

3.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel moralitas aparatur pemerintah dan kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah. Penelitian Moroney dan McDevitt (2008) menyatakan individu dengan level penalaran moral tinggi dalam perbuatannya akan lebih mengedepankan prinsip-prinsip moral yang universal. Sementara itu menurut Puspasari (2012) ada interaksi antara moralitas individu dan pengendalian internal dalam mempengaruhi

kecenderungan akuntansi. Interaksi yang dimaksud merupakan perubahan pada satu level faktor moral atau pada kondisi pengendalian internal akan menyebabkan perubahan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi.

Individu dengan moralitas rendah cenderung untuk memanfaatkan kondisi yang tidak terdapat elemen pengendalian internal dalam suatu organisasi untuk kepentingan pribadinya (*self-interest*), seperti tindakan yang berhubungan dengan kecurangan akuntansi. Kondisi tersebut sesuai dengan tingkatan *level pre-conventional* Kohlberg. Individu dengan moralitas tinggi dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal di organisasi tetap tidak akan melakukan kecurangan akuntansi yang tidak etis dan akan merugikan banyak pihak.

Pada *level moral pre-conventional*, Kohlberg menyatakan bahwa individu yang hanya taat kepada peraturan yang ada karena menghindari sanksi tertentu termasuk dalam tahap yang rendah. Individu dengan moralitas rendah cenderung tidak akan melakukan kecurangan akuntansi dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal karena takut perbuatannya akan terdeteksi oleh pengendalian internal organisasi karena dia takut mendapat sanksi hukum. Hal ini sesuai dengan temuan dari Moroney dan McDevitt (2008) yang menemukan bahwa individu dengan level penalaran moral rendah lebih berorientasi pada peraturan dan sanksi hukum yang mungkin didapatkan.

Penelitian Mazar et al. (2008) tentang kecurangan individu menyatakan bahwa setelah mereka melakukan beberapa percobaan, mereka menyimpulkan ketika seseorang punya kesempatan untuk berbuat curang, mereka akan melakukannya, tetapi tingkat ketidakjujuran perorang relatif rendah. Sejalan dengan Ariely (2013) menyatakan bahwa ketikapartisipan dihadapkan dengan kondisi di mana bisa melakukan kecurangan, partisipan melakukannya pada batas dimana si partisipan merasa nyaman melakukan kecurangan.

Seseorang berani melakukan kecurangan, jika menurut rasionalisasinya tindakan curangnya

tidak akan melukai harga dirinya. Penelitian yang dilakukan oleh Ayal dan Gino (2011) dan Gino et al.(2009) menyimpulkan bahwa ketika orang memiliki kesempatan untuk curang saat probabilitas untuk tertangkapdan biaya reputasional bisa diminimumkan, maka sebagian besar orang akan berlaku curang. Namun, perbuatan mereka tersebut hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan finansial, tidak sedemikian rupa bisa menciptakan citra negatif bagi diri mereka (Mazar dan dan Ariely, 2006).

Ketika seseorang mengalami dilema etis seringkali akan muncul konflik antara apakah akan berperilaku etis sehingga tetap bisa mempertahankan citra positif diri, atau berperilaku tidak etis agar tetap bisa mendahulukan kepentingan pribadi (Gino et al., 2011). Ketika berhadapan dengan dilema etis seperti itu, orang seringkali memecahkan konflik dengan penilaian-ulang yang kreatif (*creative reassessment*) dan rasionalisasi mau-menang-sendiri (*self-serving rationalization*) (Gino dan Ariely, 2012). Dengan cara ini, orang bisa bertindak dengan tidak jujur demi keuntungan tak etis, namun masih cukup jujur untuk mempertahankan konsep diri yang positif mereka (Gino et al., 2009, Mazar et al., 2008).

Riset Mazar et al. (2008) mengindikasikan bahwa jika seseorang diingatkan pada suatu nilai moral yang seharusnya ia miliki, maka ia tidak akan melakukan kecurangan jika kesempatan untuk melakukan kecurangan itu ada karena pada saat itu ia berada pada level moral yang tinggi. Implisit di dalam simpulan mereka adalah bahwa seseorang yang berada pada level moralitas yang tinggi tidak akan berlaku curang.

Menurut Magnis-Susono dalam Aranta (2013), moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebajikannya sebagai manusia. Magnis-Suseno dalam Aranta, (2013) mengatakan bahwa sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas. Ia mengatakan moralitas sebagai sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.

Menurut Amin (2009), kecurangan dapat disebabkan oleh tingkah laku rasionalisasi. Sedangkan menurut Sawyer (2006), salah satu penyebab kecurangan ialah kepribadian yang menggerogoti integritas seseorang. Beberapa orang memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan yang tidak jujur. Ketika orang lain melihat tidak adanya halangan dalam jalan tersebut, maka mereka akan cenderung untuk ikut melakukan kecurangan. Moral atau tingkah laku juga akan menjadi faktor pemicu kecurangan terhadap laporan keuangan. Adanya perubahan tingkah laku atau moral bias menjadikan seseorang menyalahgunakan kas/aktiva yang ada. Penyalahgunaan ini nantinya akan berusaha ditutupi melalui manipulasi terhadap laporan keuangan.

Menurut Bertens (1993), moralitas berasal dari kata sifat latin “moralis” mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Moralitas yaitu suatu perbuatan/prilaku baik ataupun buruk. Berdasarkan penelitian Wilopo (2006), moralitas manajemen memberikan pengaruh yang signifikan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin tinggi moralitas manajemen semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi atau semakin tinggi tahapan moralitas manajemen semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari pada kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadi.

Menurut Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE*, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *greed* (keserakahan). Keserakahan merupakan bentuk moral seseorang yang jelek. Semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Jadi kecurangan muncul karena keserakahan dalam diri seseorang. Selain itu, menurut Koletar (2003), penyalahgunaan jabatan merupakan prilaku/moral yang tidak sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan adanya kebiasaan berjudi merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan seseorang, dimana faktor ini secara langsung berkaitan dengan moral (perbuatan).

Berdasarkan penelitian Sumiati, (2010) moralitas memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Apabila moral manajemen atau pegawai rendah, mereka akan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, dan nantinya untuk menutupi hal tersebut, mereka akan melakukan tindakan seperti memanipulasi data yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Hasil penelitian Aranta, (2013) menunjukkan hubungan negatif moralitas aparat terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin rendah moral aparat, maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin tinggi, demikian juga sebaliknya. Berdasarkan kerangka model penelitian yang telah dikemukakan diatas dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis: Moralitas Aparatur Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah.

4. METODE PENELITIAN

4.1 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sekaran (2006) adalah mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi FEB UNTAN Pontianak, Kalimantan Barat.

Sampel menurut Sekaran (2006) adalah sebagian dari populasi, sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi, dengan kata lain, sejumlah, tapi tidak semua, elemen populasi akan membentuk sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah auditing FEB UNTAN Pontianak, Kalimantan Barat.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara nonprobabilitas atau secara tidak acak dengan jenis (*purposive sampling*) yaitu

pemilihan sampel bertujuan atau target tertentu dalam memilih sampel tidak acak. Dimana salah satu jenis dari (*purposive sampling*) yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*) dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang dikembangkan karena peneliti menyadari bahwa yang memiliki informasi baik dan benar mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah.

4.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

4.3 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah

Menurut Aranta (2013), kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) adalah serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu, kecurangan dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan uang, kekayaan, atau jasa untuk kepentingan sendiri dan merugikan pemerintah. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah terdiri dari 14 (empat belas) item pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti Aranta (2013) dengan skala Likert 1-5.

4.4 Moralitas Aparatur Pemerintah

Menurut Aranta (2013) moralitas yang mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adat istiadat sosial yang membedakan antara benar dan salah, sehingga moralitas pada seorang aparat sangat berperan penting sebagai pemegang komitmen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan konstitusi, berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, akuntabel dan tidak korup. Instrumen yang digunakan untuk mengukur moralitas aparat pemerintah 6 (enam) item pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti Aranta (2013) dengan skala Likert 1-5.

4.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini

adalah model persamaan struktural dengan pendekatan varians atau berbasis komponen atau yang dikenal dengan *Partial Least Squares*. Metode ini digunakan karena cukup kuat karena tidak didasarkan banyak asumsi, data tidak harus berdistribusi normal, dan juga data dengan skala kategorial, ordinal, interval hingga rasio dapat digunakan dalam model serta sampel tidak harus besar. Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data penelitian untuk menguji hipotesis yaitu Warp PLS 6.0.

4.6 Tahapan Analisis Model Penelitian

Dalam analisis statistik menggunakan SEM (*Structural Equation Model*), sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian atas model yang diusulkan. Tahapan persamaan struktural yang dilakukan adalah sebagai berikut:

4.6.1 Pengembangan Model Berbasis Teoritis

Pada bagian terdahulu telah didiskusikan teori yang digunakan sebagai dasar membangun model teoritis pengaruh moralitas aparat pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah.

Model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri dari tiga set hubungan:

- (1) *inner model* yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten (*structural model*),
- (2) *outer model* yang menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel manifestnya (*measurement model*), dan
- (3) *weight relation* dimana nilai kasus dari variabel laten dapat diestimasi.

Tanpa kehilangan generalisasi, dapat diasumsikan bahwa variabel laten dan indikator atau manifest variabel di skala *zero means* dan *unit variance* (nilai standardized) sehingga parameter lokasi (parameter konstanta) dapat dihilangkan dalam model.

4.6.2 Outer Model

Outer model sering juga disebut (*outer relation* atau *measurement model*) mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya.

4.6.3 Inner Model

Inner model yang kadang disebut juga dengan (*inner relation*, *structural model*, dan *substantive theory*) menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan *substantive theory*.

4.6.4 Weight Relation

Inner atau *outer model* memberikan spesifikasi yang diikuti dalam estimasi algoritma PLS. Kita memerlukan definisi *weight relation*. Nilai kasus untuk setiap variabel laten diestimasi dalam PLS.

4.6.5 Evaluasi Model

PLS tidak mengasumsikan adanya distribusi tertentu untuk estimasi parameter, maka teknik parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan (Chin, 1998).

Model evaluasi PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi yang mempunyai sifat nonparametrik. Model pengukuran atau *outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composite reliability* untuk blok indikator. Sedangkan *outer model* dengan formatif indikator dievaluasi berdasarkan pada *substantive content*-nya yaitu dengan membandingkan besarnya relatif *weight* dan melihat signifikansi dari ukuran *weight* tersebut (Chin, 1998).

5. PEMBAHASAN

5.1 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan menggunakan program WarpPLS 6.0.

Tabel 1: Latent Variabel Coefficient

Keterangan	MOAP	KKAP
<i>R-squared</i>		0.040
<i>Adj. R-squared</i>		0.032
<i>Composite reliab.</i>	0.534	0.771
<i>Cronbach's alpha</i>	0.557	0.600
<i>Avg. Var. Extrac.</i>	0.479	0.514
<i>Full collin. VIF</i>	1.041	1.041
<i>Q-squared</i>		0.045

Sumber: Output Olah Data WarpPLS 6.0. (2018).

Tabel 1 di atas menunjukkan *Ajusted R-squared* untuk kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah (KKAP) sebesar 0.040, artinya untuk variabel kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah (KKAP) dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel moralitas aparatur pemerintah (MOAP) dalam menjelaskan variasi variabel kriteria adalah sebesar 40% dan sisanya 60% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Nilai *Ajusted R-squared* dalam penelitian ini masuk pada kategori menengah (Ghozali dan Latan, 2014).

Sedangkan *Ajusted R-squared* untuk moralitas aparatur pemerintah (MOAP) sebesar 0.032, artinya untuk variabel kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah (KKAP) dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel moralitas aparatur pemerintah (MOAP) dalam menjelaskan variasi variabel kriteria adalah sebesar 32% dan sisanya 68% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Nilai *Ajusted R-squared* dalam penelitian ini masuk pada kategori kuat (Ghozali dan Latan, 2014).

Kedua variabel dalam model penelitian ini mempunyai nilai reliabilitas yang sedang.. Hal ini dapat dilihat dari nilai *cronbach alpha* yang terdapat pada tabel 1, memiliki nilai di atas > 0.50-> 0.70, (Ghozali, 2009). Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi tingkat reliabilitas konsisten internal.

Berikutnya, nilai *full colinearity variance inflation factor* (VIF) untuk setiap konstruk/variabel juga sangat baik yaitu < 3.3 sehingga tidak terdapat problem vertikal maupun *lateral collinearity* di dalam model penelitian ini. Terakhir koefisien *Q-squared* dalam penelitian ini menghasilkan nilai di atas/lebih

besar dari nol yaitu untuk variabel kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah (KKAP) sebesar 0.045, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memiliki nilai validitas *predictive relevance* yang layak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2:
 Deskripsi Pengukuran Model Fit

No	Hasil Uji/Parameter	Nilai Hitung	Cut-Off Value	Kriteria/ Kesimpulan
1	<i>Average Path Coefficient</i> (APC)	0.199, P = 0.001	P < 0,05	Model Fit
2	<i>Average R-Squared</i> (ARS)	0.040, P < 0.143	P < 0,05	Model Fit
3	<i>Average adjusted R-squared</i> (AARS)	0.032, P < 0.162	P < 0,05	Model Fit
4	<i>Average full collinearity VIF</i> (AFVIF)	1.041	<i>acceptable if < 5, ideally < 3.3</i>	Model Fit
5	<i>Tenenhaus GoF</i> (GoF)	0.140	<i>Small > 0.1, Medium > 0.25, large > 0.36</i>	Model Fit

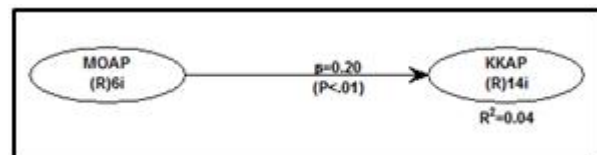
Sumber: Hasil WarpPLS 6.0 (2018)

5.2 Hasil Dan Pembahasan

5.2.1 Statistik Deskriptif

Penelitian ini dilakukan di Pontianak engan objek penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAN. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa jurusan akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah auditing. Kuesioner yang didistribusikan sejumlah 155 eksemplar, setelah batas waktu terkumpul kuesioner 150 eksemplar. 150 eksemplar kuesioner kemudian di *screening*, dan terdapat 22 kuesioner yang jawaban tidak lengkap sehingga kuesioner yang bisa diolah selanjutnya adalah 128 eksemplar. Responden *rate* penelitian ini adalah sebesar 82.58% persen, responden *rate* penelitian ini diatas responden rata-rata untuk penelitian sosial di Indonesia yang hanya 10-20% (Indriantoro & Supomo, 2007).

Mahasiswa yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari 44 mahasiswa berjenis kelamin pria, dan 84 mahasiswa berjenis kelamin perempuan, mayoritas angkatan 2014 yaitu berjumlah 124 mahasiswa, sisanya 4 orang mahasiswa angkatan tahun 2013.



Sumber: Hasil Olah Data WarpPLS 6.0 (2017).

Gambar 2. Model Hasil Penelitian

Hasil *output General SEM analysis results* yang tersaji pada Tabel 1 dan Gambar 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi tingkat validitas

dan reliabilitas konsisten internal dan model yang digunakan dalam penelitian ini, dengan demikian

bahwa model riset yang digunakan dalam riset ini adalah *fit/baik*.

Tabel 3: Hasil Riset

Hipotesis	Uraian Hipotesis	Hasil
H	Moralitas Aparatur Pemerintah (MOAP) berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah (KKAP).	Diterima

Sumber: Data Primer diolah (2018).

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa Moralitas Aparatur Pemerintah (MOAP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah (KKAP). dengan estimasi = 0,20 dan $p < 0,01$, diterima.

Dengan demikian bahwa semakin tinggi moralitas aparat yang dimiliki aparat maka kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah juga akan semakin menurun. Hasil penelitian ini konsisten dengan Amrizal (2004;24), moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan, jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.

Amrizal (2004) juga mengemukakan kepedulian positif dari lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral menyuburkan tindakan kecurangan yang pada akhirnya dapat merusak bahkan menghancurkan organisasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan semakin tinggi moralitas aparat maka semakin kecil kecenderungannya untuk melakukan kecurangan akuntansi.

Menurut teori *GONE* terdapat empat faktor seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu: *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). *Opportunity* dan *Exposure* berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum).

Faktor umum berhubungan dengan organisasi yang berbuat kecurangan dapat dipengaruhi moralitas aparat pemerintah. Sedangkan *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut dengan faktor individual). Faktor individual berhubungan dengan perilaku yang melekat dari individu itu sendiri, dalam kaitannya faktor individu ini berhubungan dengan moralitas untuk melakukan kecurangan.

Teori *GONE* kecendrungan *fraud* juga berasal dari dalam diri individu itu sendiri, salah satunya moralitas. Moralitas yaitu suatu perbuatan atau perilaku baik ataupun buruk. Berdasarkan teori *Gone* diatas, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *Greed* (keserakahan). Dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang, sifat pribadi yang rakus, sudah punya satu bukit, masih ingin bukit yang lainnya, ketika harta menjadi jembatan menuju kekuasaan, orang terdorong untuk melakukan apa saja untuk menggapainya, termasuk dengan cara melakukan kecurangan (*fraud*).

Hasil penelitian ini konsisten dengan Wilopo (2006) moralitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, serta penelitian yang dilakukan Anggraini (2008), moralitas signifikan negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider ini mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan, atau

sebab perilakunya. Perilaku seseorang oleh kombinasi antara kekuatan internal dan eksternal. teori atribusi merupakan dari penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seseorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal.

Terakhir hasil penelitian ini konsisten dengan riset Aranta (2013) yang menguji pengaruh moralitas aparat terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini mempunyai makna bahwa moralitas aparat pemerintah yang tinggi akan mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah. Moralitas aparat pemerintah perlu dijaga dan ditingkatkan supaya kecurangan akuntansi pemerintah semakin menurun dan bahkan tidak terjadi kecurangan akuntansi.

6. SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif moralitas aparat pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah, yang berarti semakin tinggi moralitas aparat pemerintah, maka kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya apabila moralitas aparat pemerintah yang rendah maka kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah akan semakin tinggi pula.

6.2 Keterbatasan

Variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 32%. Sedangkan 68% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat model riset ini. Sehingga hasil belum bisa digeneralisasi untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap

kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah. Kedua, penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam riset berikutnya bisa menggunakan metode kualitatif dan eksperimen.

6.3 Saran

Saran kepada peneliti yang akan datang sebagai berikut:

- (a) mereplikasi model penelitian ini dan selanjutnya mengujikan pada penyusun dan pengguna laporan keuangan dan akuntansi di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kalbar, karena mereka adalah penyusun laporan keuangan.;
- (b) mempertimbangkan variasi variabel kriteria yang lain seperti variabel pengendalian internal dan komitmen kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amin Widjaja. 1992, *Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Auditing)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [2] Amrizal. 2004, *Pencegahan dan Pendektesian Kecurangan Oleh Internal Auditor*, Melalui (www.google.com), Diakses [2017-07-10].
- [3] Anggraini, Arie Aviora. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Sumatera Barat*, Skripsi S1, FE UBH.
- [4] Ayal, S. Dan F. Gino. 2011, *Honest Rationales for Dishonest Behavior. In: Mikulincer, M., Shaver, P.R. (Editor), The Social Psychology of Morality, Exploring The Causes of Good and Evil*, American Psychological Association, Washington, DC.
- [5] Aranta, Petra Zulia. 2013, *Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi Terhadap*

- Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pemerintah Kota Sawahlunto)*, Skripsi Universitas Negeri Padang, Padang. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/116/103>
- [6] Ariely, D. 2013, *The Honest Truth About Dishonesty - TAM 2013*, <https://www.youtube.com>
- [7] Bertens, K.1993, *Etika*, Gramedia, Jakarta.
- [8] Bologna, G Jack., Robert J.Lindquist and Joseph T.Wells. 1993, *Investigation Audit, Fourth Edition*, Prentice-Hall&New Jersey.
- [9] Ghozali, I. 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, BP UNDIP, Semarang.
- [10] Gino, F., S. Ayal., dan D. Ariely. 2009, *Contagion and Differentiation in Unethical Behavior: The Effect of One Bad Apple on The Barrel*, *Psychological Science*, 20 (3), 393-398.
- [11] Ghozali, I. dan Hengky Latan. 2014, *Partial Least Squares Konsep, Metode, dan Aplikasi Menggunakan Program Warp PLS 4.0*, BP-UNDIP, Semarang.
- [12] Houghton, K.A. dan J. J. F. Hronsky. 1993, *The Sharing of Meaning Between Accounting Students and Members of The Accounting Profession*, *Accounting and Finance*, 33 (2), 131-147.
- [13] Hall, James A. 2001, *Sistem Informasi Akuntansi*, PT Salemba Empat, Jakarta.
- [14] Kohlberg, L. 1969, *Stage and Sequence: The Cognitive-Development Approach Moral Action to Socialization. In D. A. Goslin (Ed)*, *Handbook of Socialization Theory and Research*, RandMcNally, Chicago.
- [15] Koletar, Joseph. W. 2003, *Fraud Exposed*, John Wiley and Sons, Inc, New York.
- [16] Liyanarachi, G. dan C. J. Newdick. 2009, *The Impact of Moral Reasoning and Retaliation on Whistle-Blowing: New-Zealand Evidence*, *Journal of Business Ethics*, 89 (1), 37-57.
- [17] Maula, Kholida Atiyatul. 2017, *Analisis Pengaruh Faktor- Faktor Pendorong Tindak Kecurangan Terhadap Kecendrungan Aparatur Pemerintah Melakukan Fraud (Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Banyumas)*, Vol. 2 No. 01, *Jurnal Accountink*, Unikal.
- [18] Mazar, N. dan D. Ariely. 2006, *Dishonesty in Everyday Life and Its Policy Implication*, *Journal of Public Policy and Marketing*, 25 (1), 117-126.
- [19] Mazar, N, O. Amir dan D. Ariely. 2008, *The Dishonesty of Honest People: A Theory of Self-Concept Maintenance*, *Journal of Marketing Research* Vol. XLV (December 2008), 633–644.
- [20] Moroney, J. J. dan R. E. McDevitt. 2008, *The Effects of Moral Reasoning on Financial Reporting Decisions in a Post Sarbanes Oxley Environment*, *Behavioral Research of Accounting, Behavioral Research in Accounting*, 20 (2) 89-110
- [21] Puspasari, N. 2012, *Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen pada Konteks Pemerintahan Daerah*, Tesis, Universitas Gajah Mada.
- [22] Rest, J. R. 2000, *A Neo-Kohlbergian Approach To Morality Research*, *Journal of Moral Education*, 29 (4), 381-395.
- [23] Sawyer, L. B., M. A. Dittenhofer dan J. H. Scheiner. 2006, *Internal Auditing, Diterjemahkan oleh: Ali Akbar, Jilid 3, Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta.
- [24] Sekaran, Uma. 2006, *Metedologi Penelitian*

Bisnis, BPFE, Yogyakarta.

- [25] Simanjuntak, Ridua. 2008, “*Kecurangan: Pengertian dan Pencegahan*” (diunduh dari www.asei.co.id/internal/docs/AseiKecurangan.docs); [05/02/12].
- [26] Singleton, T. W. dan A. J. Singleton. 2010, *Fraud Auditing dan Forensic Accounting, 4 Edition*, John Wiley dan Son Inc, New Jersey.
- [27] Sumiati, Friskila Rini. 2010, *Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Badan Usaha Milik Negara di Padang*, Skripsi S1, FE UNP, Padang.
- [28] Wolfe, David T., Dana R. Hermanson. 2004, *The Fraud Diamond: Considering The Four Elements of Fraud*, The CPA Journal, p.38-42.
- [29] Wilopo. 2006, *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9, Padang, 23 – 26 Agustus 2006.
- [30] Wahyudi “*Fraud, Apa dan Mengapa?*”, Diunduh dari http://internal.dsuc.co.id/fraud_apa_dan_mengapa?, on Fri 2012-03-10 10:09.

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel yang akan dipublikasi dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian, dan pengembangan atau usulan gagasan baru yang berhubungan dengan bidang manajemen, akuntansi, ekonomi, dan kewirausahaan.
2. Artikel yang diterima penyunting ditulis dalam bahasa Indonesia baku atau bahasa Inggris dan tidak sedang dikirimkan ke jurnal/terbitan lain serta belum dipublikasikan dalam jurnal lain.
3. Naskah diketik dengan komputer menggunakan *Microsoft Word*, di atas kertas ukuran A4, 2 kolom, spasi 1,5, jenis huruf *Times New Roman* dengan ukuran 11 *point*. Naskah dapat dikirim dalam bentuk *file*. Panjang artikel sekitar 12-20 halaman termasuk daftar pustaka dan lampiran.
4. Judul Artikel harus mencerminkan dengan tepat masalah yang dibahas, dengan menggunakan kata-kata yang tepat, jelas dan mengandung unsur-unsur yang akan dibahas. Ukuran huruf untuk judul adalah *Times New Roman 16 point bold* (huruf besar). Nama penulis ditulis di bawah judul sebelum abstrak tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain apapun, asal lembaga tempat penulis bernaung dan alamat email untuk korespondensi dengan ukuran 11 *point bold*.
5. Sistematika Penulisan

a. Artikel Hasil Penelitian

- i. Abstrak dan Kata Kunci
Abstrak secara ringkas memuat uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Panjang abstrak 50-75 kata yang disusun dalam satu paragraf dengan ukuran 10 *point Times New Roman*. Kata kunci terdiri dari 3-5 kata, yakni istilah yang mewakili ide-ide atau konsep dasar yang dibahas dalam artikel.
- ii. Pendahuluan
Berisi permasalahan penelitian, batasan masalah penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian.
- iii. Landasan Teori
Berisi rancangan penelitian atau desain penelitian, sasaran dan target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.
- iv. Metode Penelitian
Berisi rancangan penelitian atau desain penelitian, sasaran dan target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.

- v. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berisi hasil analisis data, pengujian hipotesis, menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, temuan-temuan, dan menginterpretasikan temuan-temuan.
- vi. Simpulan dan Saran
Berisi ringkasan dan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Saran dapat berisi tindakan praktis, pengembangan teori baru dan penelitian lanjutan.
- vii. Daftar Pustaka
Diutamakan apabila sumber pustaka atau rujukan berasal dari lebih satu sumber seperti buku, jurnal, makalah, internet, dan lain-lain.

b. Artikel Konseptual atau non penelitian

- i. Abstrak dan Kata Kunci
Abstrak adalah ringkasan dari isi artikel yang dituangkan secara padat bukan komentar atau pengantar penulis. Panjang abstrak 50-75 kata yang disusun dalam satu paragraf dengan ukuran huruf 10 *point Times New Roman*. Kata kunci terdiri dari 3-5 kata, yakni istilah yang mewakili ide-ide atau konsep dasar yang dibahas dalam artikel.
 - ii. Pendahuluan
Menguraikan hal-hal yang menarik perhatian pembaca, memberikan konteks bagi permasalahan yang akan dibahas, serta tujuan pembahasan.
 - iii. Pembahasan
Berisi kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, dan pendirian penulis mengenai masalah yang dibahas.
 - iv. Penutup atau Simpulan
Berisi penegasan sikap penulis atas masalah yang dibahas.
 - v. Daftar Pustaka
Diutamakan apabila sumber pustaka atau rujukan berasal dari lebih satu sumber seperti buku, jurnal, makalah, internet, dan lain-lain.
6. Tabel/gambar sebaiknya diletakkan pada halaman tersendiri, umumnya diakhir teks. Penulis cukup menyebutkan pada bagian di dalam teks tempat pencantuman tabel atau gambar. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut, judul yang sesuai dengan isi tabel dan gambar, serta dilengkapi dengan sumber kutipan.
7. Daftar pustaka disusun menurut alphabet penulis atau nomor urut. Urutannya dimulai dengan penulisan nama penulis, tahun, judul, penerbit, dan kota terbit. Nama penulis mendahulukan nama keluarga atau nama dibalik, tanpa gelar. Untuk kutipan dari internet berisi nama penulis, judul artikel, alamat *website* dan tanggal akses.

8. Sumber kutipan dalam teks ditulis diantara kurung buka dan kurung tutup yang berisi nama akhir penulis, tahun, dan nomor halaman bila perlu.

Contoh :

- a. Kutipan berasal dari satu sumber dan satu penulis: (Hendra, 2008:22).
- b. Kutipan berasal dari satu sumber dan dua penulis: (Ely dan Thomas, 2001), bila lebih dari dua penulis (Jensen,et.all, 2007) atau (Mulyadi, dkk, 2009).
- c. Kutipan berasal dari dua sumber dengan penulis yang berbeda: (Hendra, 2008 dan Mulyadi, 2009).
- d. Kutipan berasal dari dua sumber dengan penulis yang sama: (Hendra, 2008, 2010), jika tahunnya sama (Hendra 2008a, 2008b).
- e. Kutipan berasal dari institusi: (BPS, 2009).

9. Daftar pustaka ditulis menurut urutan alphabet sesuai dengan nama akhir penulis tanpa gelar akademik, baik penulis asing maupun penulis Indonesia.

Contoh:

- a. Satu Pengarang
Becker, Gary S. 1993, *Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*, Third Edition, Chicago: The University of Chicago Press.
- b. Dua Pengarang
Van Horne, J. and J. M. Wachowicz. 1997, *Fundamentals of Financial Management*, Eleventh Edition, USA: Prentice Hall Inc.c. Referensi Jurnal/Majalah Ilmiah
- c. Referensi Jurnal/Majalah Ilmiah
Garbarino, E. and M.S. Johnson. 1999, "The Different Roles of Satisfaction , Trust, and Commitment in Customer Relationships", *Journal of Marketing*, Vol 63, p.70-87.
- d. Referensi dari Institusi
Ikatan Akuntansi Indonesia. 1994, "Standar Profesional Akuntan Publik", Jakarta, Devisi Penerbitan IAI.
- e. Referensi dari Makalah/Proceeding
Mayangsari, Sekar, dan Murtanto. 2002, "Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Pembentukan Komite Audit", *Proceeding Simposium Surviving Strategies to Cope With the Future* , Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FE UAJY), Yogyakarta.
- f. Referensi dari Situs Internet
Sulistyanto, H. Sri. 2003, "Good Corporate Governance: Bisakah Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat?,"<http://artikel.us/sulistyanto1.html>, diakses pada 29/08/2007.

10. Isi tulisan bukan tanggung jawab penyunting. Penyunting berhak mengedit redaksionalnya tanpa mengubah arti. Naskah yang tidak memenuhi syarat atau yang tidak akan diterbitkan tidak dikembalikan kecuali ada permintaan dari penulis.
11. Redaksi berhak menentukan naskah yang akan diterbitkan di jurnal.

BIODATA PENULIS

Abdika Jaya adalah dosen tetap prodi akuntansi universitas musi rawas lubuklinggau. Pendidikan sarjana ilmu Akuntansi telah diselesaikan pada Tahun 2004 dari Universitas sriwijaya Palembang dan pasca sarjana magister administrasi publik diselsaikan pada tahun 2008 dari Universitas sriwijaya Palembang saat ini mengampu mata kuliah akuntansi manajemen, pajak dan retribusi daerah

Cherrya Dhia Wenny dosen tetap Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang (STIE MDP). Pendidikan sarjana akuntansi diperoleh dari Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang pada tahun 2007. Tahun 2012 mendapat kesempatan menempuh pendidikan pascasarjana (S2) dalam bidang kajian utama akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Mata kuliah yang diasuh antara lain statistik bisnis, akuntansi perbankan, akuntansi sektor public, *E-government*, dan Akuntansi menengah.

Esti Dwi Rinawiyanti saat ini sedang mengejar PhD Management, School of Business, di RMIT University dengan beasiswa Pemerintah Indonesia. Ia telah lulus dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Indonesia dengan gelar Sarjana Teknik Industri dan mendapat gelar MBA dari Universitas Nuertingen-Geislingen di Jerman. Beliau pernah menjadi dosen di Jurusan Teknik Industri, Universitas Surabaya, Indonesia dengan beberapa mata kuliah pengajaran, seperti Manajemen Organisasi, Inovasi, Kewirausahaan, dan Manajemen Pemasaran. Selain mengajar, dia telah berpartisipasi aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Dia telah mendapat beberapa hibah penelitian yang berkaitan dengan inovasi dan manajemen khususnya. Dia juga telah menerbitkan beberapa artikel di jurnal nasional.

Herry Widagdo adalah dosen tetap Program Studi Manajemen STIE Multi Data Palembang. Pendidikan sarjana (S1) diselesaikan tahun 2001 dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Pendidikan pascasarjana (S2) diperoleh dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2009. Saat ini mengajar pada program studi Manajemen dengan mata kuliah yang diampuh saat ini antara lain: manajemen pemasaran, manajemen bisnis ritel, riset pemasaran dan praktek bisnis.

Kardinal adalah dosen tetap Program Studi Manajemen STIE Multi Data Palembang. Pendidikan sarjana diselesaikan tahun 1996 dari Universitas Tridinanti Palembang. Pendidikan pasca sarjana diperoleh dari universitas yang sama pada tahun 2006. Mengikuti program pendidikan konsultan keuangan Certified Financial Planner tahun 2014 dan *Qualifield Wealt Planner* pada tahun 2015. Saat ini aktif mengajar di STIE MDP Palembang untuk mata kuliah Pemasaran dan Keuangan selain itu juga menjadi pengajar dalam pelatihan *Register Financial Planner* dan *Certified Financial Planner*.

Nurussama adalah dosen tetap Program Studi Akuntansi pada Politeknik Palcomtech Palembang. Pendidikan sarjana diperolehnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi lulus pada tahun 2011. Sedangkan gelar Magister Sains (M.Si) dalam bidang manajemen diperolehnya dari Program Pascasarjana Universitas Bina Darma diselesaikan pada tahun 2015. Saat ini mengasuh mata kuliah Manajemen Kewirausahaan, Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran, Manajemen Bisnis, dan Manajemen Pemasaran.

Dimas Pratama adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang (UTP). Pendidikan sarjana diperoleh dari Universitas Tridinanti tahun 2012 dan pendidikan pascasarjana diperoleh dari Program Magister Sains Universitas Sriwijaya.

Icha Fajriana adalah alumni Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Gelar Sarjana Ilmu Administrasi, dengan konsentrasi perpajakan diperoleh pada tahun 2011. Sejak masih dibangku kuliah, beliau aktif mengikuti berbagai seminar dan workshop, khususnya yang terkait dengan ilmu perpajakan.

Raisa Pratiwi adalah dosen tetap Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE MDP). Pendidikan sarjana akuntansi diperoleh dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2011. Tahun 2012 mendapat kesempatan menempuh pendidikan pascasarjana (S2) dalam bidang kajian utama akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Mata kuliah yang diasuh antara lain Akuntansi Keuangan Lanjutan, Teori Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik dan Audit Keuangan Pemerintah.

Charisma Ayu Pramudita adalah alumni program Management of Technology dari University Utara Malaysia (UUM), lulus pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan Master Human Resource Management diselesaikan pada tahun 2012 juga University Utara Malaysia (UUM).

Usnia Wati Keristin adalah dosen tetap Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang (STIE MDP) sejak tahun 2014 hingga sekarang. Pendidikan Sarjana Ekonomi diperolehnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Palembang jurusan Akuntansi Pajak. Pendidikan Pasca Sarjana diperoleh dari Universitas Sriwijaya Palembang Jurusan Akuntansi Umum. Saat ini mengasuh mata kuliah Akuntansi Koperasi UMKM dan BLKL

Muhsin adalah Dosen tetap Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak, sejak tahun 2006 hingga sekarang. Pendidikan Sarjana Ekonomi dalam bidang Ilmu Akuntansi diperoleh dari Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, Pendidikan Magister dalam bidang Ilmu Akuntansi diperoleh dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dan Pendidikan Doktor dalam bidang Ilmu Akuntansi diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Saat ini mengasuh mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Auditing, Auditing Sektor Publik, Audit Investigasi, Metodologi Penelitian, Seminar Akuntansi Sektor Publik, Seminar Auditing, dan *Good Corpo Rate Governance*.

INDEKS PENYUNTING/MITRA BESTARI

Betri Sirajudin adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang. Pendidikan sarjana akuntansi diperolehnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 1994. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) diperoleh dari Universitas Sriwijaya tahun 2007. Sedangkan pendidikan pascasarjana dalam bidang ilmu ekonomi kajian utama akuntansi umum diperoleh dari PPS Universitas Sriwijaya tahun 2008.

Kamaludin adalah Guru Besar tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu dengan bidang keahlian manajemen keuangan dan strategik. Pendidikan magister diperolehnya dari Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang tahun 1995. Sedangkan pendidikan doctoral diperolehnya dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2005 dalam bidang ilmu manajemen keuangan. Saat ini aktif menulis artikel ilmiah di beberapa jurnal baik dalam dan luar negeri, beberapa buku yang sudah diterbitkan antara lain : Manajemen Keuangan, Teori dan Aplikasi, 2011; Manajemen Keuangan Perusahaan, 2009; Manajemen Keuangan Keputusan Jangka Pendek, 2002.

Luk Luk Fuadah adalah dosen tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (UNSRI). Pendidikan Sarjana Akuntansi diselesaikannya pada tahun 1997 dari Fakultas Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Sedangkan pendidikan pascasarjana diperoleh dari Flinders University Australia pada tahun 2004 dengan mengambil bidang Internasional Business. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan strata 3 (program doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau juga pernah mengelola jurnal ilmiah "Jurnal Akuntabilitas" F.E.

UNSRI. Selain mengajar, beliau juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah.

Sri Rahayu adalah dosen tetap Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP). Pendidikan Sarjana Ekonomi diselesaikannya pada tahun 1991 dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pendidikan pascasarjana diperoleh dari Program Magister Manajemen UNSRI pada tahun 1998 dengan mengambil bidang Manajemen Keuangan. Sedangkan pendidikan strata 3 (program doktor) diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Pancasila Jakarta pada tahun 2010.

Yulizar Kasih adalah dosen tetap Program Studi Manajemen STIE Multi Data Palembang. Pendidikan Sarjana Ekonomi (Manajemen) diselesaikannya pada tahun 1990 dari Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang. Pendidikan pascasarjana (M.Si) diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Andalas pada tahun 1998 dengan mengambil bidang Perencanaan Pembangunan. Kemudian pada tahun 2008 memperoleh gelar doctor (Dr.) dari Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang dengan spesialisasi Micro Finance. Saat ini mengasuh mata kuliah Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro dan Kewirausahaan.

Zakaria Wahab adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang. Pendidikan sarjana diperoleh dari Universitas Sriwijaya Tahun 1983 dan pascasarjana diperoleh dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2008. Saat ini aktif mengajar pada Program Studi Manajemen dengan mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran, Manajemen Strategik, dan Kewirausahaan.

ABSTRAK
JURNAL FORUM BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
VOLUME 7 NOMOR 1, 2017

**Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan
Akuntansi Pada
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas**

Abdika Jaya, SE, M.Si, Ak, CA

ABSTRACT

Fraud is an intentional mistake that can inflict a financial loss to many parties and within the scope of government, fraud is very detrimental to the public interest. The purpose of this study is to explore the perceptions of employees in government agencies on the factors that influence the tendency of the accounting fraud such as internal control and leadership commitment. This study uses primary data in the form of a questionnaire as a data source. The sample in this study is employees of SKPD in Musi Rawas amounted to 97 respondents. The sampling technique used is stratified random sampling and multiple linear regression analysis is used as data analysis method through SPSS tool. The results show that the internal control and leadership commitment are significant and negative on affecting the accounting fraud. This indicates that with better implementation of internal control, the individual opportunity to conduct accounting fraud could be minimized. Furthermore, with larger commitment, individuals tend to not rationalize the acts that contrary to the values and the achievement of organizational goals, especially the action of the accounting fraud.

Keywords: *internal control, leadership commitment, accounting fraud.*

**Pengaruh Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening
Pada Hubungan Antara Ukuran Perusahaan
Dengan Audit Delay**

Cherrya Dhia Wenny

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the effect of company size on audit delay, directly or indirectly through capital structure as variabel intervening. The data used in this study is financial statements of 2016 obtained through idx.co.id. Population used in this research is service and investment company, sub sector retail and wholesale trade counted 58 company, then sampling method using purposive sampling counted 39 company. The result of this research proves that directly company size has negative and significant effect on audit delay, firm size have a significant and positive effect on capital structure, and capital structure also have positive and significant effect on audit delay. However, the test results shows that the relationship between firm size and audit delay is an indirect relationship mediated by a capital structure.

Keywords: *company size, capital structure, audit delay.*

Identifikasi Faktor Pemicu Minat Wirausaha Pada Mahasiswa

Esti Dwi Rinawiyanti, Linda Herawati Gunawan

ABSTRACT

Students are expected to be not only as a job seeker after graduation, but they could be a job creator as an entrepreneur. Incorporating the entrepreneurship into the curriculum of higher education is carried out to prepare graduates with the hardskills and softskills of entrepreneurship. Furthermore, it should be recognized some factors that can encourage students to become entrepreneurs, so that the university can facilitate it from the beginning. This study was conducted to identify the triggering factors that can arouse the interest of entrepreneurship among students, especially at the University of Surabaya. Data obtained from the distribution of questionnaires to 405 students were analyzed that consist of descriptive analysis, analysis of the level of interest, and factor analysis. The result of those analysis can identify some key factors that trigger the interest in entrepreneurship among students. They were grouped into four factors, namely personal (internal), universities, external, and information. Considering that the university has a significant influence, so that the university should create the conducive campus environment and arrange the attractive entrepreneurship courses and programs to foster the interest of entrepreneurship among students.

Keywords: *the interest of entrepreneurship, university, factor analysis.*

Analisis Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Krupuk Kemplang Di Palembang

Herry Widagdo

ABSTRACT

This research was conducted with the aim to know how the influence of product quality and price to the decision of purchasing kerupuk kemplang in Palembang. The type of this research is quantitative descriptive research, with data collection through the distribution of questionnaires distributed to 100 respondents who have made purchases of kemplang kerupuk in Palembang by purposive sampling technique and data analysis using multiple regression. The results of this study together product and price quality influential in the amount of 11.016 with a significant level of 0.000. While partially the most dominant effect of the price of purchasing decisions of 3.244 with a significant level of 0.002. In this study the coefficient of determination (R²) of 18.5%.

Keywords: *product quality, price, purchase decision .*

Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Penggunaan Produk Keuangan Pada Mahasiswa STIE Multi Data Palembang

Kardinal, SE, MM

ABSTRACT

This study aims to determine the level of financial literacy on the use of financial products at students of the College of Economics (STIE) Multi Data Palembang. This research uses descriptive research method, data source

used is primary data obtained from questionnaire given to the respondent. The results of this study found that the level of knowledge of students at the School of Economics (STIE) Multi Data Palembang is good enough is seen from several categories that are defined, of 243 respondents who asked the percentage of entry into the low category only 8 respondents or 3.3 percent, while Which included in the category enough as many as 127 respondents or 52.3 percent and high category as much as 108 respondents or by 44.4 percent. Likewise, the overall use of financial products in all categories for Mutual Funds is 16.9 percent, insurance 36.3 percent, savings of 40 percent, bonds 4.5 percent and others (financing and pawnshops) of 2.3 percent From the distribution of data on the use of financial products is seen mahasiswa College of Economics (STIE) Multi Data Palembang is still a lot of investing in insurance products and savings (banks) only a few who menginvestasikan funds in capital market finance products such as Mutual funds, this is because students still give priority Investments in instruments that provide guaranteed security and stable returns.

Keywords: *financial literacy, use of financial products, financial instrument.*

**Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kualitas Layanan
E-Service Quality Pada Online Travel Agent**

Nurussama

ABSTRACT

Travel Agent is a business that connects purchase travel services and tourism to the service providers who provide information and advice for buyers as possible. Therefore, an Online Travel Agent should command all the information related to the travel industry to develop and sell products and services to provide satisfactory services to consumers. The purpose of the study is for the company can find a shortage of the E-service Quality of customer perception, so that the management company can improve on the shortcomings and make a profit that will come. For customers, get a better quality of service than ever before. Can evaluate variables of E-service Quality Online Travel Agent so that the company can provide better services to customers. For researchers, can know that E-service Quality is necessary for the company Online Travel Agent, so that the company can fix the flaws before. Respondents of this research comes from the users of Online Travel Agent students in Palembang. Survey methods used for the collection of primary data by distributing questionnaires to the respondents, with the distribution of questionnaires as many as 200 people. Analysis of the data using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 17. The results from the perceptions of students in the city of Palembang, Trust and Experience shows have positive influence and directly influence the E-service Quality. Besides variable Ease of Use, Website Design, Reliability, System Availability, Privacy, Empathy and Responsiveness does not have a significant effect on E-Service Quality.

Keywords: *service quality, e-service quality, travel agent.*

INDEKS JURNAL FORUM BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Vol.	Judul	Halaman	Penulis
Vol. 7 No. 1	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	1	Abdika Jaya, SE, M.Si, Ak, CA
	Pengaruh Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Hubungan Antara Ukuran Perusahaan Dengan <i>Audit Delay</i>	15	Cherrya Dhia Wenny
	Identifikasi Faktor Pemicu Minat Wirausaha Pada Mahasiswa	27	Esti Dwi Rinawiyanti, Linda Herawati Gunawan
	Analisis Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Krupuk Kemplang Di Palembang	43	Herry Widagdo
	Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Penggunaan Produk Keuangan Pada Mahasiswa STIE Multi Data Palembang	55	Kardinal, SE, MM
	Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kualitas Layanan <i>E-Service Quality</i> Pada <i>Online Travel Agent</i>	65	Nurussama